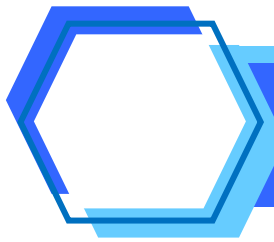




(LKPJ)

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI JEMBER TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun 2023 dapat disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember sebagai penyampaian LKPJ Bupati periode tahun 2021-2024 pada tahun ketiga. Gambaran kinerja tahunan ini merupakan akumulasi perwujudan penyelenggaraan pembangunan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan dan mitra pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Penyampaian LKPJ Bupati Jember Tahun 2023 kepada DPRD pada dasarnya memberikan informasi gambaran kinerja perangkat daerah secara utuh sepanjang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Sinergi dan kolaborasi dalam kerangka Pemerintahan Daerah antara DPRD dan Kepala Daerah serta unsur pemerintahan di bawahnya dalam rangka bersama-sama mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara DPRD, Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Akhirnya sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama

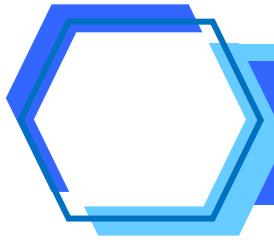


dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember selama Tahun Anggaran 2023. Semoga LKPJ Tahun 2023 dapat memberikan informasi terkait hambatan, tantangan, kekuatan, dan kelemahan pencapaian indikator kinerja sebagai evaluasi dan analisa perbaikan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Jember di tahun selanjutnya.

Jember, Maret 2024

BUPATI JEMBER

Ir. H. HENDY S, ST. IPU, ASEAN.Eng



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1-1
1.1 Dasar Hukum	1-4
1.2 Visi dan Misi	1-6
1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	1-21
1.4 Program Pembangunan Daerah	1-31
1.5 Data Umum Daerah	1-34
1.5.1 Data Geografis Wilayah	1-34
1.5.2 Jumlah Penduduk	1-58
1.5.3 Pertumbuhan Penduduk	1-58
1.5.4 Jumlah PNS	1-60
1.5.5 Realisasi APBD Tahun 2023	1-61
1.5.5.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	1-62
1.5.5.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	1-63
1.5.5.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	1-64



BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	2-1
2.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2-3
2.1.1	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	2-3
2.1.2	Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah	2-6
2.2	Pengelolaan Belanja Daerah	2-8
2.2.1	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	2-8
2.2.2	Perubahan Penjabaran Belanja Daerah	2-9
2.3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	2-11
2.3.1	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	2-11
2.3.2	Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah	2-11
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	3-1
3.1	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan & Subkegiatan	3-3
3.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	3-3
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	3-48
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	3-106
3.1.4	Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan ..	3-128
3.1.5	Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan ...	3-155
3.1.6	Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan	3-184
3.1.7	Pelaksanaan Kewilayahan Urusan Pemerintahan	3-189
3.1.8	Pelaksanaan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan	3-294
3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	3-300
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	3-346



BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN SERTA TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	4-1
4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	4-2
4.1.1	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya	4-3
4.1.2	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya	4-5
4.2	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian	4-5
BAB V	PENUTUP	5-1

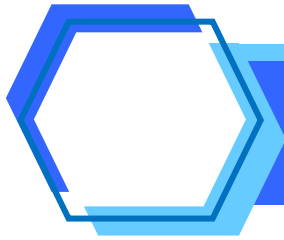


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember.....	1-23
Tabel 1.2	Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama	1-35
Tabel 1.3	Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Kabupaten Jember.....	1-36
Tabel 1.4	Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember.....	1-39
Tabel 1.5	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat	1-39
Tabel 1.6	Kemiringan Lahan Kabupaten Jember	1-41
Tabel 1.7	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng	1-41
Tabel 1.8	Kawasan Budidaya Kabupaten Jember	1-44
Tabel 1.9	Kawasan Lindung Kabupaten Jember	1-52
Tabel 1.10	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember	1-54
Tabel 1.11	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember	1-56
Tabel 1.12	Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2019 – 2023	1-58
Tabel 1.13	Jumlah Penduduk, Luas Wlayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2023	1-59
Tabel 1.14	Perkembangan Aparatur (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023	1-60
Tabel 1.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	1-63



Tabel 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	1-64
Tabel 1.17	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	1-65
Tabel 2.1	Perubahan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan pada Tahun 2023	2-3
Tabel 2.2	Penjabaran Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	2-7
Tabel 2.3	Penjabaran Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	2-10
Tabel 2.4	Penjabaran Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	2-12
Tabel 2.5	Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 – 2020	2-13
Tabel 2.6	Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021-2023	2-13
Tabel 4.1	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Diterima Tahun 2023	4-6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026	1-9
Gambar 1.2	Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Kabupaten Jember	1-13
Gambar 1.3	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan	1-38
Gambar 1.4	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023	1-59



1 Pendahuluan

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 71 mengamanatkan bahwa, Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LKPJ Tahun 2023 juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:



1. Pasal 15, bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan;
2. Pasal 16, bahwa Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya;
3. Pasal 17, bahwa hasil pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan;
4. Pasal 18, bahwa Kepala Daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
5. Pasal 19 ayat (1), bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



6. Pasal 20, bahwa Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan; dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 yang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025. Penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD merupakan upaya pembentukan keseimbangan (*checks and balances*) antara dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah) dan fungsi legislatif (DPRD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hambatan, tantangan, kekuatan, dan kelemahan pencapaian indikator kinerja tahun 2023 sebagai evaluasi dan analisa perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember di tahun selanjutnya.



1.1 Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar pijakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 ini mengacu dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023.



1.2 Visi dan Misi

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 263 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijaksanaan pembangunan, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional.

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai cita-cita luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Kabupaten Jember yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Sinergis dengan hal tersebut di atas, Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 ini di samping mengacu pada RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV, juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dirumuskan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah:



“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi Jember

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/*stunting* yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, *wis wayahe*!

Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.

Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah



menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna

mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026





Berdasarkan visi pembangunan di atas, dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun ke depan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutanan, perikanan, Kategori industri pengolahan, serta Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Kegiatan pertanian *on-farm*, perikanan, dan kegiatan hulu lainnya harus diintegrasikan dengan kegiatan industri pengolahan produk dan prasarana pendukungnya, bahkan dengan pasar sasarannya. Integrasi kegiatan ekonomi hulu-hilir pada Kategori utama penyumbang PDRB diharapkan tidak hanya menjamin ketahanan pangan melalui produktifitas hasil pertanian dan perikanan yang tinggi, tetapi juga harus didorong agar dapat meningkatkan nilai tambah setiap produk yang dihasilkan melalui industri pengolahan dan perdagangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pelaku usahanya.

Kelompok penduduk dengan jumlah populasi yang besar, seperti kelompok penduduk pelajar usia muda, termasuk yang di pesantren,

adalah sasaran strategis yang dapat dilibatkan dalam mengembangkan sektor-sektor utama dan potensial penyumbang PDRB di atas. Kelompok yang berisi generasi *baby boomer* dan *millenial* tersebut dapat diberikan pelatihan yang lebih *technology-intensive* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya dan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi kelompok penduduk yang mendominasi struktur demografi tersebut harus didorong dan difasilitasi agar lebih banyak tercipta wirausaha-wirausaha muda baru, meskipun mulai dengan skala usaha mikro dan kecil. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, mereka dapat dihimpun dan dilembagakan dalam koperasi pemuda atau koperasi pondok pesantren yang terintegrasi dalam rantai koperasi primer, koperasi produksi, koperasi sekunder, koperasi pembiayaan, dan koperasi jenis lainnya sehingga memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengakses dan menjalin kerjasama usaha dengan industri *offtaker*.

Misi 1 secara keseluruhan telah memuat pilar pembangunan ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Pilar pembangunan ekonomi yang termuat dalam misi ini mencakup antara lain, (1) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (2) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (3) Berkurangnya Kesenjangan, dan (4) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan



berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang proaktif dan kolaboratif.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif untuk mencegah malpraktik dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat; kualitas pelayanan publik yang handal, efektif, dan efisien; serta penerima manfaat pembangunan yang tepat sasaran.

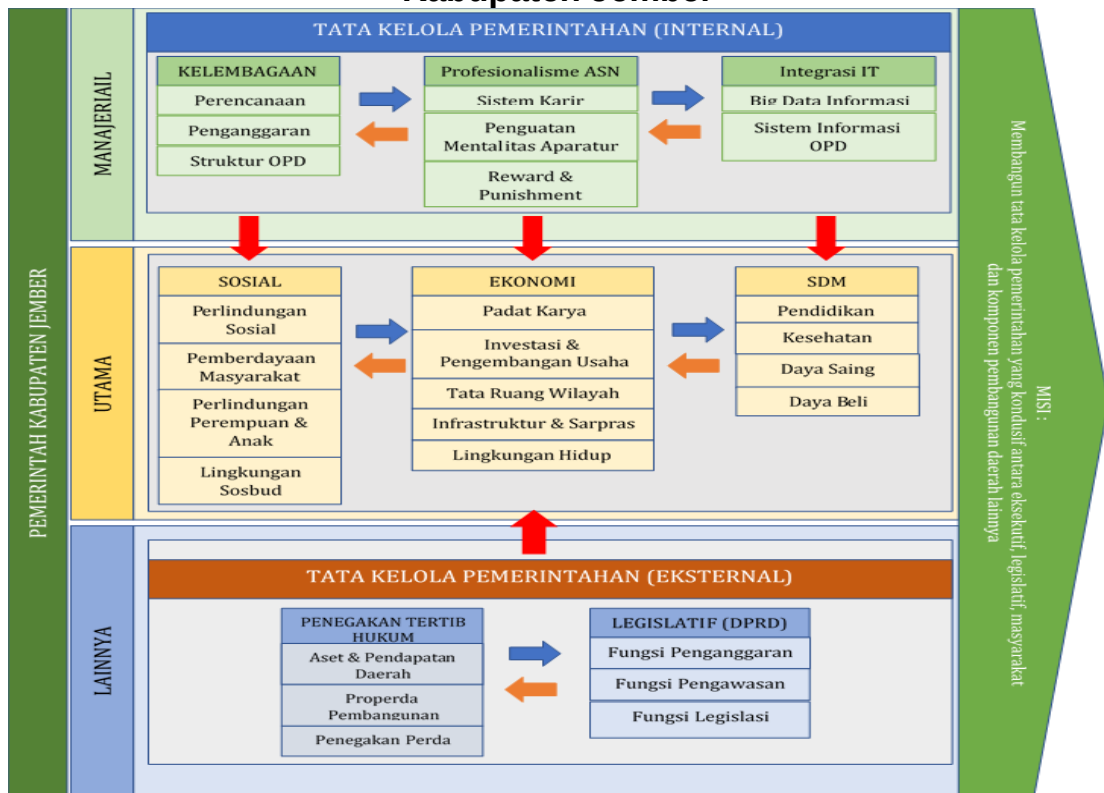
Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat dipadukan dengan partisipasi masyarakat luas melalui ormas maupun kelompok masyarakat sipil lainnya sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya untuk memoderasi agama, menumbuhkan rasa kesatuan berbangsa, dan menghargai kemajemukan yang ada di masyarakat harus terus dilakukan dan disebarluaskan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif juga dicerminkan oleh hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan lainnya. prinsip sinergi yang diusung dalam RPJMD ini mengharuskan terciptanya hubungan baik antara eksekutif dan legislatif mengacu pada kesesuaian persepsi, gagasan dan arah

kebijakan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan nantinya dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jember.

Baik sinergi internal maupun eksternal harus didorong untuk arah tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik yang partisipatoris, akuntabel, efektif dan efisien. Sinergitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember dapat digambarkan dalam peta bisnis Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai keberhasilan Misi 2 ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Pemerintah Daerah, dapat digambarkan sinergitas pencapaian Misi 2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Kabupaten Jember





Pada Gambar 1.2. di atas, dijelaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Peran legislatif dalam misi ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi yang berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember kedepan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk mereaktualisasikan perannya dalam memperkuat pembangunan daerah.

Kerja sama eksekutif dan legislatif sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Kolaborasi ini dalam kaitannya dengan hubungan eksekutif dan legislatif pada ranah 3 fungsi legislatif yang memainkan perannya dalam peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. Hubungan antara eksekutif dan legislatif secara realistis dapat dikembangkan dengan mengembangkan 3 (tiga) pola hubungan yang harus dilakukan. Ketiga hubungan itu adalah, *pertama*, bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi. *Kedua*, bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi. *Ketiga*, klarifikasi atas berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan. Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam kontek tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program pembangunan daerah. Karena itu pola hubungan yang seimbang dan egaliter antara dua lembaga tersebut perlu terus menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian,



pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*). Kemiskinan, baik oleh sebab struktural maupun sebab kultural, ditanggulangi melalui pendekatan berbasis keluarga atau rumah tangga. Kepala keluarga berpenghasilan rendah atau di bawah garis kemiskinan diberikan keterampilan kerja tambahan agar mampu mencari tambahan penghasilan di luar waktu kerjanya. Ibu rumah tangga dan perempuan kepala rumah tangga diberikan pelatihan kerja, akses permodalan dan pasar, serta pendampingan manajemen usaha agar mampu membantu atau menambah penghasilan keluarga. Anak-anak yang telah berusia kerja tapi menganggur atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan pelatihan kerja melalui balai latihan kerja, disediakan informasi bursa kerja, dilibatkan dalam kegiatan padat karya, atau diberikan akses menjadi wirausaha. Anak-anak yang masih sekolah diberikan beasiswa siswa miskin.

Masyarakat yang secara kultural terpinggirkan dalam lapangan kerja, seperti perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus, harus diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (*decent works*). Pelibatan kelompok utama dalam masyarakat, seperti pondok pesantren dan majelis taklim, dapat meningkatkan efektifitas upaya dan pelebagaan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi salah satu fokus RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. Agenda besar

pemerintah daerah adalah mendorong pemerataan kesejahteraan di setiap wilayah sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan keluarahan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan, harus diintegrasikan dan diselaraskan dengan perencanaan di tingkat kabupaten. Data penduduk dan keluarga miskin harus dikumpulkan sampai tingkat administrasi wilayah paling rendah menurut nama dan alamat (*by name, by address*). Akses penduduk terhadap berbagai alternatif sumber pangan bergizi dan terjangkau selain beras harus ditingkatkan dan dikendalikan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk itu, Misi 3 ini sejalan dengan pilar pembangunan sosial dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Di dalam pilar pembangunan sosial, kaitannya dengan Misi 3 ini adalah (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesenjangan Gender. Tujuan akhir dari Misi ini adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Masuknya investasi diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan menurunkan angka pengangguran. Investasi



juga diharapkan mampu mengungkit kapasitas ekonomi Kabupaten Jember untuk menambah alternatif sumber pendapatan asli daerah dan membuka akses pembiayaan di luar APBD bagi program-program unggulan.

Untuk menjamin keberlangsungan (*sustainability*) usaha dan kehidupan di sekitarnya, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jember harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Jember.

Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum. Iklim kemudahan berusaha harus mampu mendorong tumbuh suburnya pendirian usaha mikro dan kecil dari masyarakat Jember yang selanjutnya dapat diorganisir dalam lembaga usaha koperasi. Pengorganisasian kelompok usaha harus didorong sampai pada tingkat masyarakat akar rumput, termasuk di pesantren-pesantren.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember. Kualitas SDM, terutama pada jenjang penduduk usia 5-18 tahun, sangat penting di masa 7-20 tahun



mendatang untuk menopang bonus demografi yang berkualitas dan mencapai surplus rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan ditujukan sebagai upaya meningkatkan akses penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang memadai dan menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun maupun pendidikan nonformal sehingga angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan pada pendidikan yang lebih berkualitas juga perlu memperhatikan dan melibatkan keberadaan pendidikan madrasah diniyah yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Jember sehingga cukup signifikan mempengaruhi capaian angka partisipasi sekolah.

Peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan secara umum ditujukan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan jumlah *stunting* pada anak, disamping kematian yang disebabkan oleh penyakit. Kualitas kesehatan masyarakat secara umum harus terus ditingkatkan melalui pembinaan keluarga, terutama pada perempuan sejak saat penetapan usia perkawinan dengan mencegah perkawinan dini, pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan, penanganan kesehatan selama persalinan, dan pendampingan kesehatan anak saat balita.

Kesadaran pada pola hidup bersih dan sehat (PHBS) harus disosialisasikan secara berkelanjutan sampai tingkat komunitas terkecil dan keluarga, seperti kelompok dasa wisma, sekolah, pesantren, atau majelis taklim. Keberadaan fasilitas, layanan, dan tenaga kesehatan yang disediakan sampai tingkat desa, seperti posyandu dan bidan desa harus diperkuat untuk mendekatkan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Konektivitas ekonomi yang merata melalui pembangunan dan penyelenggaraan jalan dapat membuka akses dan meningkatkan mobilitas antar desa dan wilayah yang ada di Kabupaten Jember sehingga dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat di dan antar wilayah, baik antar wilayah utara-selatan, perkotaan-perdesaan, maupun pesisir-pegunungan.

Pemerataan infrastruktur publik, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, dapat digunakan sebagai upaya mitigasi bencana melalui penyediaan dan penetapan tempat penyelamatan (*safe haven*) saat kejadian bencana dan jalur-jalur evakuasi yang aman, jelas, dan mudah untuk digunakan sehingga kerugian material, korban jiwa, kerusakan sosial, dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dihindari.

Penyediaan infrastruktur publik yang merata harus memperhatikan dan mencakup penyediaan akses yang lebih mudah pada ekosistem lingkungan sekitarnya seperti rumah layak huni, air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan yang efektif, dan perbaikan

kualitas wilayah kumuh (*upgrading slum ares*), tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah perdesaan.

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Pengembangan Kategori pariwisata memiliki peran yang strategis dalam membangkitkan potensi ekonomi sektor-sektor yang lain dan usaha kecil menengah (UKM), seperti jasa penginapan, kuliner khas daerah, souvenir khas daerah, *fashion*, transportasi, maupun jasa pemandu wisata (*tour guide*). Rantai nilai ekonomi Kategori pariwisata yang panjang diharapkan dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Jember, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusi Kategori pariwisata pada pendapatan asli daerah dan PDRB.

Pengembangan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah juga dapat memberikan penguatan pengetahuan pada masyarakat daerah, terutama generasi muda, tentang nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah yang unggul dan luhur di Kabupaten Jember. *Event* olahraga dapat diintegrasikan ke dalam wisata alam seperti lari maraton Jember 10K atau balap sepeda Tour de Jember.

Pengetahuan tentang berbagai nilai unggul dan luhur dari kearifan lokal yang diinternalisasi dengan baik dapat membangkitkan rasa bangga menjadi warga Jember yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi energi dan modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan daerah. Modal sosial ini akan menjadi energi positif bagi upaya



membangun citra daerah (*city branding*) Kabupaten Jember. Masyarakat Jember yang bangga dengan kearifan lokal dan kondisi daerahnya akan menjadi pemasar aktif bagi industri pariwisata di daerah Jember melalui berbagai media sosial secara sukarela.

Disamping nilai-nilai luhur kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan yang kuat dan moderat, khususnya Islam, dalam masyarakat Jember harus semakin dikembangkan untuk menjaga sikap toleransi, semangat kebangsaan, dan pemahaman Islam yang rahmatan lilalamin. Upaya yang efektif dalam pencegahan paham radikalisme beragama dapat dilakukan dengan melibatkan madrasah diniyah di lingkungan pendidikan, majelis taklim di lingkungan masyarakat, dan pondok-pondok pesantren.

Pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Jember menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Potensi pariwisata dapat dikembangkan melalui beberapa kebijakan yang akan mendongkrak Kategori pariwisata sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti pengembangan inovasi dan produk unggulan Kategori pariwisata, peningkatan infrastruktur pariwisata, penguatan kerjasama dengan pihak ketiga, promosi wisata melalui kebijakan *heritage tourism*. Potensi pariwisata yang dimiliki Jember mengedepankan aspek pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik wisatawan.

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa



pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konetks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada level pelaksanaannya. Sesuai dengan agenda pembangunan tersebut, arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi di setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.	
<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming, dengan:</i> - Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan; - Meningkatkan fasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan pendirian industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; - Memberikan fasilitasi dan kemudahan perijinan usaha perdagangan pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan berbasis risiko; - Merevitalisasi fungsi gudang rabat untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian dan perikanan; dan - Mengembangkan akses pasar pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan, termasuk membuat nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>, MoU) dengan instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya dan perjanjian kerjasama (PKS).	Mengintegrasikan kegiatan hulu (<i>on-farm</i>) dengan kegiatan hilir (<i>off-farm</i>) untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi.
<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming, dengan:</i> - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian; - Menjaga ketersediaan pupuk secara mandiri; - Meningkatkan produktifitas hasil pertanian; - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perikanan budidaya maupun tangkap, seperti pengadaan <i>coldstorage</i> atau pembangunan pabrik pengalengan ikan; - Meningkatkan produktifitas hasil perikanan, seperti melalui program 1 keluarga 1 kolam ikan.	
Misi 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
<i>Wis wayahe Pelayanan Jember Handal, dengan:</i> - Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan;	Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area: - Manajemen Perubahan; - Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Penataan dan Penguatan Organisasi;



Strategi	Arah Kebijakan
- Memberikan nomor identitas setiap penduduk melalui KTP NIK nasional; - Memberikan kartu keluarga pada setiap keluarga; - Memberikan akte pada setiap kelahiran dan pernikahan; - Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat; - Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk melakukan: • Penyederhanaan struktur organisasi seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; • Penataan organisasi dan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan • Pembentukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; - Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat; - Memfasilitasi penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah; - Meningkatkan kualitas ketepatan dan penyaluran hibah dan bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan; - Meningkatkan kualitas komunikasi dan pelibatan DPRD dalam pengawasan, pembentukan dan penetapan peraturan daerah, maupun dalam menyusun dan menetapkan anggaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan daerah; - Membina berbagai organisasi masyarakat untuk menguatkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren,	- Penataan Tata Laksana; - Penataan SDM Aparatur; - Penguatan Pengawasan Internal; - Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Strategi	Arah Kebijakan
sekolah diniyah, dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur; - Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan; - Mengembangkan dokumen perencanaan yang berkualitas; - Mengembangkan dan menerapkan hasil litbang untuk inovasi proses penyelenggaraan pemerintahan; - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang aman dan <i>proper</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Memperbaiki pengelolaan seluruh aset atau barang milik daerah; - Mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak daerah;	
<i>Wis wayahe</i> Jember Satu Data, dengan: - Memfasilitasi terbentuknya basis data pembangunan yang akurat dan tidak tumpang tindih; - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik secara elektronik (<i>e-government</i>); - Membangun Jember <i>Media Centre</i>; - Membangun sistem penilaian kinerja perangkat daerah dan ASN Aparatur berbasis elektronik untuk mendukung pengembangan SDM berbasis kinerja (<i>merit system</i>); - Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.	Pemusatan data pembangunan dalam sistem basis data elektronik untuk menjamin keakuratan dan validitas data, dan pemanfaatannya bagi proses perencanaan dan pemantauan pencapaian pembangunan daerah.
Misi 3: Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.	
<i>Wis wayahe</i> Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya), dengan: - Melakukan pendataan keluarga, warga miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) <i>by name, by address</i> secara partisipatif dan transparan	Mengidentifikasi data penduduk dan keluarga miskin <i>by nama by address</i> sampai tingkat desa untuk menjamin keakuratan penerima bantuan, ketepatan intervensi program, dan jenis pelibatan desa sebagai perpanjangan tangan



Strategi	Arah Kebijakan
pada tingkat desa untuk mendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); - Membangun pangkalan data kemiskinan dan program intervensinya; - Memberikan bantuan sosial pada PMKS dan warga miskin dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun perguruan tinggi; - Meningkatkan fasilitasi penataan dan pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara elektronik ((<i>smart villages</i>)); - Memfasilitasi pemberdayaan desa untuk menjadi desa mandiri dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa. - Mengembangkan alternatif sumber pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama warga miskin, untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.	pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	
<i>Wis wayahe</i> Jember Tumbuh, dengan: - Meningkatkan kualitas dan kemudahan perijinan berusaha (<i>ease-of-doing-business</i>) berbasis risiko bagi calon investor dalam negeri maupun luar negeri; - Mensertifikasi pasar-pasar daerah; - Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru; - Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi <i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya; - Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya koperasi bagi pengembangan usaha kecil dan mikro, terutama di kelompok dominasi pesantren - Membina dan memberikan bimbingan teknis pada usaha kecil/mikro dan koperasi agar tumbuh sehat; - Memberikan latihan kerja pada pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi; - Membuka kerjasama penempatan kerja dengan usaha/industri melalui <i>job fair</i>; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara;	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis risiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro, dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup.



Strategi	Arah Kebijakan
- Optimalisasi penyediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).	
Misi 5: Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi	
<i>Wis wayahe</i> SDM Jember Unggul, dengan: - Memperluas akses pendidikan melalui pembangunan prasarana ruang kelas baru atau unit sekolah baru untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, termasuk program kesetaraan dan sekolah inklusif; - Memperluas akses beasiswa bagi siswa sekolah menengah dan mahasiswa untuk meningkatkan harapan lama sekolah; - Meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas sekolah; - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk memperbaiki kesejahteraan GTT dan PTT serta pengadaan Guru Pendamping Khusus; dan - Memperluas hibah dan bantuan sosial pendidikan ke pesantren atau sekolah diniyah (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, termasuk merevitalisasi RSUD atau membangun Jember Healthy Centre; - Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, terutama pesantren dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kesadaran pencegahan pernikahan dini; - Meningkatkan kesadaran pengaturan jarak kelahiran; - Meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan pemeriksaan ibu hamil; - Meningkatkan kualitas layanan dan penanganan persalinan; - Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi balita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita atau Gemar Jelita); - Meningkatkan kualitas penanganan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; - Meningkatkan kualitas penanganan orang dalam gangguan jiwa; - Meningkatkan implementasi kebijakan responsif gender; - Meningkatkan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak; dan - Mengendalikan laju angka pertumbuhan penduduk; - Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah dan pengelolaannya; - Meningkatkan kompetensi tenaga	Mendorong dan menciptakan akses seluas-luasnya pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember tanpa terkecuali, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.



Strategi	Arah Kebijakan
pustakawan melalui diklat perpustakaan;	
Misi 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember	
<i>Wis wayahe</i> Infrastruktur Jember Mantab, dengan: - Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan jalan (dan jembatan) kabupaten untuk membangun konektifitas ekonomi antar wilayah, seperti pembangunan Jember Outer Ring Roads (JORR) dan pengembangan pemanfaatan Jember Sport Garden (JSG); - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan drainase; - Memperluas ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum; - Meningkatkan kualitas dan luas jaringan irigasi; - Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang; - Meningkatkan akses masyarakat pada rumah layak huni; - <i>Upgrading</i> wilayah kumuh; - Optimalisasi pengelolaan air limbah; - Memperluas akses air bersih dan air layak minum bagi masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan; - Meningkatkan rasio elektrifikasi yang merata di seluruh desa. - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, termasuk pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara; - Optimalisasi sarana angkutan umum; - Penertiban lalu lintas melalui ketersediaan dokumen dan uji kir; - Menyediakan prasarana mitigasi bencana seperti jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (<i>safe heaven</i>); - Meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana; - Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana;	Menyelenggarakan pembangunan yang berkualitas, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan melalui pembangunan konektifitas ekonomi antar wilayah sehingga dapat mengeliminasi ketimpangan pembangunan.
Misi 7: Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya	



Strategi	Arah Kebijakan
<i>Wis wayahe</i> Jember Permata Jawa dengan: - Mengembangkan destinasi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religius; - Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata; - Membangun identitas Kabupaten Jember dengan mengembangkan <i>city branding</i>; - Meningkatkan promosi pariwisata; - Meningkatkan peran Dewan Kebudayaan Jember (DKJ) dalam pengembangan/pemberdayaan <i>heritage tourism</i>; - Merevitalisasi obyek cagar budaya dan kearifan budaya lokal; - Membina organisasi kepemudaan untuk aktif mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan teknologi melalui Jember Creative Centre; - Mengintegrasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk menunjang pariwisata, seperti Jember 10K, Tour de Jember, atau <i>sport event</i> yang memanfaatkan Jember Sport Garden (JSG).	Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki rantai ekonomi panjang, sehingga melibatkan lebih banyak masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal lainnya.



PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER



1.4 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jember periode tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”, maka disusun 9 (sembilan) Strategi Unggulan yang merupakan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2021-2026.

1. Wes Wayahe Jember Satu Data.
 - a. Jember satu Data
 - b. Digitalisasi pelayanan publik
 - c. Jember media center
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
 - a. PENDIDIKAN
 - 1) Perbaikan kesejahteraan GTT dan PTT Beasiswa
 - 2) Sekolah inklusi
 - 3) Guru pendamping khusus
 - b. KESEHATAN
Gemar Jelita, Jember Bangga, Jember Safety Center, Revitalisas RSUD
 - c. KESEJAHTERAAN
Kemiskinan dan Pengangguran
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantab
 - a. Jember Outer Ring Road (JORR)
 - b. Transportasi Interkonektivitas wilayah



- c. Pembangunan Dermaga dan Peningkatan Kelas Bandara
- d. Optimalisasi JSG
- e. Lingkungan Hidup Lestari dan Pengelolaan Persampahan
- 4. Wes Wayahe Jember *Industrial Farming*
 - a. Satu Keluarga Satu Kolam (2SK)
 - b. Mandiri Pupuk
 - c. Coldstorage dan Pabrik Pengalengan Ikan
 - d. Modernisasi Alat Tangkap
 - e. Integrasi Produk Pertanian dan UMKM
- 5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
 - a. Wirausahawan Pesantren
 - b. Koperasi Pesantren
 - c. Festival Inovasi dan Kepeloporan Santri
- 6. Wes Wayahe Gerda Jaya
 - a. Aplikasi Informatika *Smart Village*
 - b. Sinergi Pemdes dengan arah kebijakan Pemkab
 - c. BUMDes untuk Desa Maju dan Mandiri
- 7. Wes Wayahe Jember Tumbuh
 - a. Revitalisasi Koperasi dan UMKM
 - b. Revitalisasi Perusahaan Daerah
 - c. Sertifikasi Pasar
- 8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
 - a. Jember Creative Center
 - b. Pembukaan dan Pengembangan Destinasi Wisata
 - c. Pembangunan Gedung Seni Budaya
 - d. Promosi dan Pemasaran Budaya, Seni dan Pariwisata
- 9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal
 - a. Penataan Birokrasi
 - b. Pengembangan Pusat Pemerintahan dan Perkantoran
 - c. Respon Cepat Pengaduan Pelayanan Publik



d. Pelayanan Investasi yang terintegrasi

Selanjutnya, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program, wajib menjamin keseimbangan anggaran berdasarkan 3 prioritas yakni:

1. Prioritas Pertama (P1) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua (P2) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga (P3) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Urgensi lain adalah karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji- janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi.



Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif balanced scorecard. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat/layanan adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Perspektif kelembagaan yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

1.5 Data Umum Daerah

1.5.1 Data Geografis Wilayah

A. Letak dan kondisi Geografis

Kabupaten Jember secara geografis berada pada posisi 113⁰15'47" sampai 114⁰02'35" Bujur Timur dan 7⁰58'06" sampai 8⁰33'44" Lintang



Selatan. Berdasarkan dokumen Kabupaten BPS Kab. Jember, Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Wilayah Kabupaten Jember terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dengan rentang ketinggian berkisar antara 0-500 mdpl.

Kabupaten Jember secara administratif merupakan bagian timur dari Provinsi Jawa Timur dan terletak ±200 km dari arah timur Kota Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu:

Batas Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
 Batas Barat : Kabupaten Lumajang
 Batas Timur : Kabupaten Banyuwangi
 Batas Selatan : Samudera Indonesia

Tabel 1.2

Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama

No.	Nama Pulau	Perkiraan Luas (Ha)	Beberapa Penggunaan Tanah Utama	Fungsi Kawasan	Keberadaan Tempat Penting
1	Nusa Barong	7.482,00	Hutan	Suaka Alam	-
2	Gilen	6,25	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
3	Leande/ Bt. Mandi	1,87	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
4	Endokdokan	3,75	Semak Belukar / Rumput	-	-
5	Watuajir	0,89	Batu karang / Rumput	-	-
6	Matikan	7,50	Semak Belukar / Rumput	-	-
7	Sraja	16,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
8	Meran	6,78	Semak Belukar / Rumput	-	-
9	Moestaka	29,89	Semak Belukar / Rumput	-	-
10	Loe Toeng	42,26	Semak Belukar / Rumput	-	-
11	Karang Bolong	28,98	Semak Belukar / Rumput	-	-
12	Watoepager	1,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
13	Pisang	3,91	Semak Belukar / Rumput	-	-
14	Bandealit	33,94	Semak Belukar / Rumput	-	-
15	Singa	11,24	Semak Belukar / Rumput	-	-
16	Merue	8,75	Semak Belukar / Rumput	-	-

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024)



Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km², dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km². Secara garis besar bagian timur Kabupaten Jember merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Bagian barat laut terdapat Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088m). Bagian selatan wilayah adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong, pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Terdapat sekitar 67 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya yang belum memiliki nama.

Wilayah administrasi Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 248 desa/kelurahan, dan 976 dusun. Kecamatan Kaliwates memiliki luas wilayah terkecil yaitu 24,94 km² atau sebesar 0,77% sedangkan Kecamatan Tempurejo merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jember dengan luas wilayah sebesar 524,46 km² atau sebesar 16,24%. Jumlah desa/kelurahan terbanyak dalam satu kecamatan terdapat pada Kecamatan Puger, Kalisat, dan Sukowono, yaitu sebanyak 12 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Kencong dan Sukorambi dengan jumlah masing-masing sebanyak 5 desa/kelurahan.

Tabel 1.3

Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Kabupaten Jember

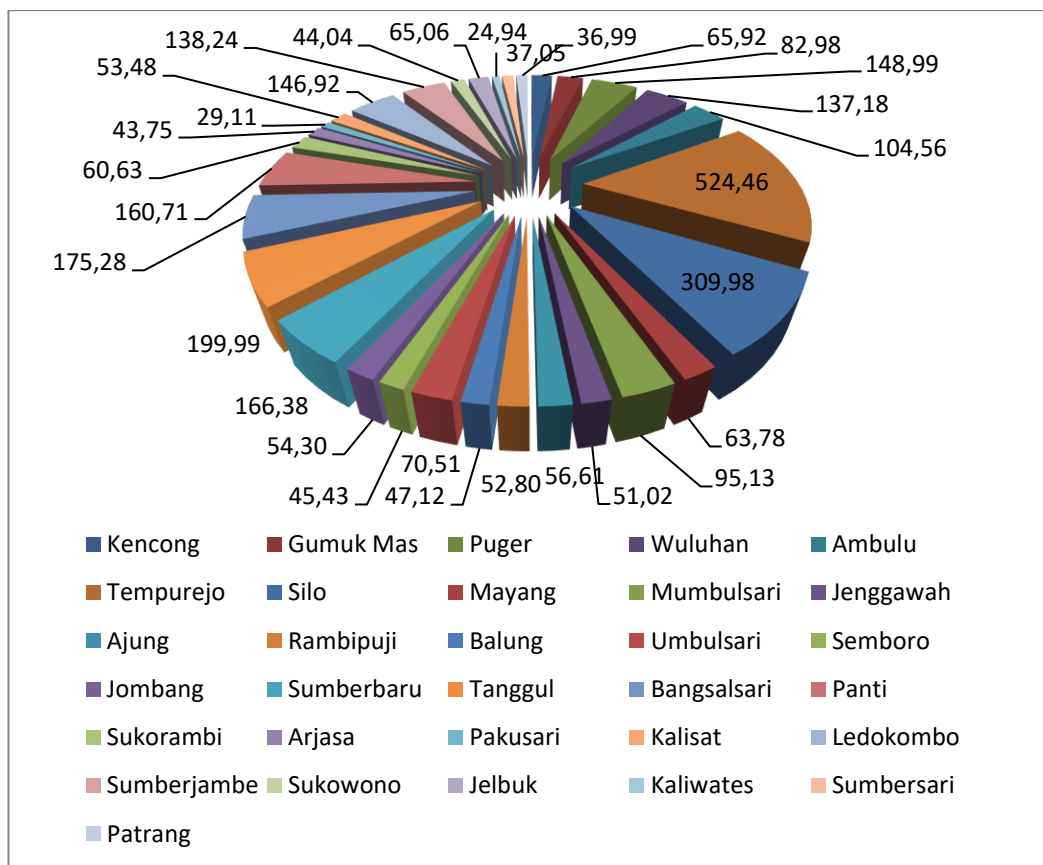
No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kencong	5	24	43,15	65,92	1,85
2.	Gemukmas	8	24	35,34	82,98	2,82
3.	Puger	12	37	29,23	148,99	4,84
4.	Wuluhan	7	25	25,50	137,18	3,89



No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas (Km ²)	Persentase (%)
5.	Ambulu	7	27	22,17	104,56	3,53
6.	Tempurejo	8	29	24,35	524,46	16,24
7.	Silo	9	41	17,44	309,98	9,76
8.	Mayang	7	24	10,76	63,78	1,74
9.	Mumbulsari	7	26	10,83	95,13	2,6
10.	Jenggawah	8	36	12,37	51,02	1,7
11.	Ajung	7	35	9,11	56,61	1,82
12.	Rambipuji	8	42	11,21	52,80	1,65
13.	Balung	8	28	22,00	47,12	1,51
14.	Umbulsari	10	28	29,70	70,52	2,18
15.	Semboro	6	14	28,73	45,43	1,44
16.	Jombang	6	17	41,30	54,30	1,68
17.	Sumberbaru	10	36	34,77	166,37	4,78
18.	Tanggul	8	24	27,61	199,99	6,05
19.	Bangsalsari	11	42	18,58	175,28	4,82
20.	Panti	7	29	7,51	160,71	5,5
21.	Sukorambi	5	16	4,27	60,63	1,37
22.	Arjasa	6	26	7,20	43,75	1,06
23.	Pakusari	7	26	6,39	29,11	0,92
24.	Kalisat	12	53	12,72	53,48	1,59
25.	Ledokombo	10	39	24,05	146,92	3,99
26.	Sumberjambe	9	58	18,12	138,24	3,93
27.	Sukowono	12	27	19,25	44,04	1,52
28.	Jelbuk	6	42	14,00	65,06	2,2
29.	Kaliwates	7	33	3,10	24,94	0,77
30.	Sumbersari	7	33	1,75	37,05	1,1
31.	Patrang	8	35	2,46	36,99	1,13
Jumlah		248	976		3.293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024 - data diolah)

Gambar 1.3
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024 - data diolah)

B. Topografi

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian daerah perkotaan Jember lebih kurang 87 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 26 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 501 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut, 6,85% pada ketinggian 1.001 m sampai dengan 2.500 m dan 0,95% pada ketinggian lebih dari 2.500 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan



dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.

Tabel 1.4
Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember

No.	Ketinggian	Luas	
		Km ²	%
1	0 – 25 meter	591,2	17,95
2	26 – 100 meter	681,69	20,70
3	101 – 500 meter	1.243,08	37,75
4	501 – 1000 meter	520,43	15,80
5	1001 – 2500 meter	225,62	6,85
6	> 2.500 meter	31,33	0,95
	Jumlah	3.293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024 - data diolah)

Tabel 1.5
Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat

No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)						Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-25	25-100	100-500	500-1000	1000-2005	>2005	
1	Kencong	65,92	-	-	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,47	1,16	0,34	0,01	-	-	82,98
3	Puger	81,8	45,7	21,49	-	-	-	148,99
4	Wuluhan	87,18	25	25	-	-	-	137,18
5	Ambulu	56,51	38,28	9,77	-	-	-	104,56
6	Tempurejo	17,97	178,12	240,48	85,94	1,95	-	524,46
7	Silo	-	0,39	167,79	137,87	3,93	-	309,98
8	Mayang	-	1,76	60,07	1,95	-	-	63,78
9	Mumbulsari	-	35,94	52,94	6,25	-	-	95,13
10	Jenggawah	-	50,7	0,3	0,02	-	-	51,02
11	Ajung	-	56,61	-	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	-	52,8	-	-	-	-	52,8
13	Balung	25,84	17,97	3,31	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	64,46	6,05	-	-	-	-	70,51
15	Semboro	17,93	19,6	7,9	-	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	24,1	31,64	75,67	15,55	19,42	-	166,38
18	Tanggul	7,08	40,54	64,88	42,19	45,16	0,14	199,99
19	Bangsalsari	6,64	52,15	61,8	17,97	27,34	9,38	175,28
20	Panti	-	7,81	50,78	28,12	61,02	12,98	160,71
21	Sukorambi	-	11,72	24,17	19,27	5,47	-	60,63
22	Arjasa	-	-	33,53	9,67	0,55	-	43,75
23	Pakusari	-	-	29,11	-	-	-	29,11



No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)						Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-25	25-100	100-500	500-1000	1000-2005	>2005	
24	Kalisat	-	-	53,48	-	-	-	53,48
25	Ledokombo	-	-	72,06	44,55	25	5,31	146,92
26	Sumberjambe	-	-	49,96	62,11	23,05	3,12	138,24
27	Sukowono	-	-	44,04	-	-	-	44,04
28	Jelbuk	-	-	32,64	19,29	12,73	0,4	65,06
29	Kaliwates	-	3,69	17,34	3,91	-	-	24,94
30	Sumbersari	-	0,36	11,72	24,97	-	-	37,05
31	Patrang	-	3,69	32,51	0,79	-	-	36,99
	Jumlah	591,20	681,69	1.243,08	520,43	225,62	31,33	3.293,34

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024)

Kabupaten Jember merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki bentang alam lengkap hal ini dikarenakan terdapat laut, pesisir, pegunungan, dan gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kabupaten Jember memiliki 3 (tiga) jenis gumuk yang berbeda dari jenis batuan yang terkandung yaitu gumuk batu, gumuk batu piring dan gumuk pasir. Formasi gumuk ini memberikan beberapa manfaat bagi lingkungan sekitar mulai dari ekologi, iklim makro, pemecah angin hingga penyumbang oksigen bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan adanya gumuk, temperatur di sekitar gumuk menjadi relatif lebih dingin karena banyaknya jenis tanaman yang terdapat di gumuk sehingga menurunkan temperatur sekitar kawasan.

Jumlah gumuk di Kabupaten Jember sebanyak 1.670 buah yang sudah terinventarisir dan 285 buah belum terinventarisir. Keberadaan Gumuk tersebar di beberapa Kecamatan, antara lain: Kecamatan Arjasa, Summersari, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Ledokombo, Mayang dan Sumberjambe. Lima tahun terakhir jumlah gumuk mengalami penurunan dan kerusakan sampai 11%. Penurunan dan kerusakan gumuk terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Gumuk yang dieksploitasi terutama di wilayah

Kecamatan Sumbersari. Eksploitasi tersebut bisa saja terus meningkat dan akan berdampak besar bagi kerusakan ekosistem makro di Kabupaten Jember.

Tabel 1.6
Kemiringan Lahan Kabupaten Jember

No.	Kelas Lereng	Luas	
		Km ²	%
1	Datar (0 – 2 ⁰)	1.205,47	36,60
2	Landai (2 – 15 ⁰)	673,76	20,46
3	Agak curam (15 – 40 ⁰)	384,04	11,66
4	Sangat Curam (> 40 ⁰)	1.030,07	31,28
Jumlah		3.293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024 - data diolah)

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2⁰, sehingga daerah ini baik untuk kawasan kegiatan pertanian tanaman semusim. Untuk wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40⁰ menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihutankan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15⁰ menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40⁰ menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air.

Tabel 1.7
Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng

No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-2°	2°-15°	15°- 40°	> 40°	
1	Kencong	65,92	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,56	-	0,75	0,67	82,98
3	Puger	68,6	0,94	24,12	55,34	149
4	Wuluhan	92,23	2,01	4,95	38	137,19



No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-2°	2°-15°	15°- 40°	> 40°	
5	Ambulu	82,55	2,09	8,34	11,58	104,56
6	Tempurejo	84,63	33,22	41,13	365,48	524,46
7	Silo	-	89,06	76,81	144,12	309,99
8	Mayang	23,77	15,12	18,71	6,19	63,79
9	Mumbulsari	58,37	15,05	21,71	-	95,13
10	Jenggawah	48,55	2,01	-	0,46	51,02
11	Ajung	56,61	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	51,58	1,22	-	-	52,8
13	Balung	47,12	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	70,52	-	-	-	70,52
15	Semboro	43,71	1,72	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	38,44	54,83	37,97	35,13	166,37
18	Tanggul	27,81	45,81	44,24	82,14	200
19	Bangsalsari	54,76	59,62	14,24	46,66	175,28
20	Panti	12,44	36,28	14,83	97,16	160,71
21	Sukorambi	12,94	24,29	2,97	20,43	60,63
22	Arjasa	5,63	13,03	6,98	18,11	43,75
23	Pakusari	26,84	2,27	-	-	29,11
24	Kalisat	8,31	45,03	0,15	-	53,49
25	Ledokombo	3,03	69,75	33,22	40,92	146,92
26	Sumberjambe	10,43	73,5	18,38	35,94	138,25
27	Sukowono	8,98	34,91	0,15	-	44,04
28	Jelbuk	1,02	24,61	9,32	30,11	65,06
29	Kaliwates	22,76	2,18	-	-	24,94
30	Sumbersari	37,05	-	-	-	37,05
31	Patrang	5,03	25,25	5,08	1,64	37
Jumlah		1.205,47	673,76	384,04	1.030,07	3.293,34

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024)

C. Geologi

Dataran wilayah Kota Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Khusus untuk area gumuk jenis tanah utamanya adalah regosol. Tekstur tanah di gumuk cenderung *sandy clay loam* yaitu tahanan alluvial terdampak dari hasil pelapukan batuan vulkanik. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm.



D. Hidrologi

Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Kondisi hidrologi di Kota Jember sangat dipengaruhi oleh air permukaan tanah dangkal, sumber-sumber mata air dan aliran-aliran sungai yang melintasinya. Sungai yang melintasi Kota Jember adalah Sungai Bedadung.

E. Klimatologi

Karakteristik cuaca dan curah hujan di Kabupaten Jember menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau tiap tahunnya. Musim kemarau terjadi di bulan April - September, sedangkan musim penghujan terjadi di bulan Januari - Maret dan Oktober - November. Sedangkan rata-rata curah hujan selama satu tahun di Kabupaten Jember yakni 153,47 mm Kelembapan rata-rata (*humidity average*) di Kabupaten Jember sebesar 80,02% dengan suhu rata-rata 27,06°C.

F. Penggunaan Lahan

Dominasi penggunaan lahan di wilayah Kota Jember adalah kegiatan pertanian yakni seluas 5.099,283 Ha atau 51,47% dari total luas wilayah kota. Kemudian berturut-turut adalah tanah tegalan seluas 1.477,9 Ha atau 14,92%, perumahan seluas 2.679,655 Ha atau 27,05%, kolam ikan seluas 1,0 Ha atau 0,01 % dan penggunaan tanah lain-lainnya seluas 416,415 Ha atau 4,20%.

G. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Tabel 1.8



menjelaskan secara detail distribusi luas lahan berdasarkan jenis kawasan budidaya.

Tabel 1.8
Kawasan Budidaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		29.079	1) Kecamatan Puger; 2) Kecamatan Wuluhan; 3) Kecamatan Ambulu; 4) Kecamatan Silo; 5) Kecamatan Mayang; 6) Kecamatan Mumbulsari; 7) Kecamatan Rambipuji; 8) Kecamatan Sumberbaru; 9) Kecamatan Tanggul; 10) Kecamatan Bangsalsari; 11) Kecamatan Panti; 12) Kecamatan Arjasa; 13) Kecamatan Ledokombo; 14) Kecamatan Sumberjambe; 15) Kecamatan Jelbuk; dan 16) Kecamatan Tempurejo.
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat		91.108	Berada di seluruh kecamatan terdiri dari jenis tanaman Jati, Mahoni, Sonokeling, Sengon Laut, Gmelina, Mindi, Bayur, dan lain-lain
3	Kawasan Peruntukan Pertanian			
	Kawasan Pertanian Lahan Basah		86.598 Ha Sawah Beririgasi dan 81.081 Ha Lahan Pertanian Pangan	1) Sentra Padi tersebar di seluruh kecamatan. 2) Sentra Jagung tersebar di seluruh kecamatan; 3) Sentra Kedelai : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Balung; Kecamatan Jombang; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Ajung; Kecamatan Kencong; Kecamatan Gumukmas; dan Kecamatan Tanggul. 4) Sentra Kacang Tanah : Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan 5) Sentra Ubi Jalar : Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono 6) Sentra Ubi Kayu : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Bangsalsari; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Panti; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi
	Kawasan Pertanian Lahan Kering		33.037 Ha Lahan Kering dan 20.522 Ha lahan pertanian berkelanjutan	
	Kawasan Budidaya Holtikultura			1) Sentra Buah Salak : Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Semboro 2) Sentra Buah Manggis : Kecamatan SUMBERbaru; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; kecamatan Sukorambi 3) Sentra Buah Durian : Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbug; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Panti; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Patrang; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sukorambi 4) Sentra buah Jeruk : Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Kencong 5) Sentra Buah Alpukat : Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Patrang 6) Sentra Buah Belimbing : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ajung; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Semboro; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kencong 7) Sentra Buah Duku/Langsar : Kecamatan Patrang; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; dan Kecamatan Panti. 8) Sentra Buah Rambutan tersebar di seluruh Kecamatan 9) Sentra buah Mangga : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Kencong; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Kalisat 10) Sentra Buah Nangka : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari 11) Sentra Buah Pisang : Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; dan Kecamatan Patrang. 12) Sentra Cabe Rawit : Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Mayang; dan Kecamatan Pakusari. 13) Sentra Cabe Besar : Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ajung; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Tempurejo 14) Sentra Kacang Panjang : Kecamatan AMbulu; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ldeokombo 15) Sentra Tomat : Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Ajung; Kecamatan Panti; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mayang 16) Sentra Semangka : Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Puger
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan		87.448,71	1) Sentra tembakau Kasturi: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Puger; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Kaliwates; dan Kecamatan Ajung. 2) Sentra tembakau Rajang: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Mumbulsari Kecamatan Puger; dan Kecamatan Sukowono. 3) Sentra tembakau White Burley:



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Puger; Kecamatan Balung; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Mumbulsari. 4) Sentra tembakau na-oogst: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Panti; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Puger; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Ajung; dan Kecamatan Mumbulsari. 5) Sentra tanaman kelapa berada di seluruh Kecamatan 6) Sentra tanaman kapuk berada di seluruh Kecamatan 7) Sentra tanaman lada: Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Silo; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Bangsalsari. 8) Sentra tanaman cengkeh: Kecamatan Silo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe, dan Kecamatan Sumberbaru. 9) Sentra tanaman karet: Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Silo; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; dan Kecamatan Sumberbaru. 10) Sentra tanaman kakao: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Rambipuji; dan Kecamatan Mumbulsari. 11) Sentra tanaman kopi: Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Silo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; dan Kecamatan Sumberbaru. 12) Sentra tanaman teh berada Perkebunan Gunung Gambir Kecamatan Sumberbaru 13) Sentra tanaman tebu berada di seluruh Kecamatan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
5	Kawasan Peruntukan Peternakan			1) Ternak sapi potong berada di seluruh kecamatan. 2) Ternak aspi perah: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Silo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Patrang; Kecamatan Kaliwates; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Balung 3) Ternak kuda: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Mayang. 4) Ternak kerbau: Kecamatan Jombang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Ledokombo; dan Kecamatan Kencong.
6	Kawasan peruntukan perikanan			1) Kawasan budidaya kolam air tawar tersebar diseluruh kecamatan 2) Kawasan budidaya air payau meliputi: Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; dan Kecamatan Gumukmas. 3) Kawasan minapadi meliputi: Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Ledokombo. 4) Pengembangan Pelabuhan perikanan pantai berada di Kecamatan Puger 5) Kawasan perikanan tangkap meliputi: Kecamatan Kencong; Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Tempurejo; dan Kecamatan Gumukmas.
7	Kawasan peruntukan pariwisata			1) Daya Tarik Wisata Alam terdiri atas: a) Pantai meliputi: 1. Pantai Watu Ulo, Pantai Seruni dan Pantai Payangan berada di Kecamatan Ambulu; 2. Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3. Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4. Pantai Pancer berada di Kecamatan Puger; 5. Pantai Bandalit berada di



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Kecamatan Tempurejo; dan 6. Pantai Rowo Cangak berada di Kecamatan Tempurejo. b) Air terjun meliputi: 1. Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2. Air terjun Manggis berada di Kecamatan Tanggul; dan 3. Air terjun lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe. 2) Daya Tarik Wisata Budaya meliputi: a. Upacara Larung Saji berada di Kecamatan Puger, Kecamatan Kencong dan Kecamatan Ambulu; b. Tarian Lahbako berada di Kecamatan Patrang; c. Kuda Kencak berada di Kecamatan Tanggul; d. Egrang di Kecamatan Ledokombo; e. Can Macanan Kaduk, Ge jenggean (ta' butaan) dan Pencak Silat Seni di Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jelbuk; f. Pegon, Reog dan Wayang di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Wuluhan; g. Janger dan Jaranan di Kecamatan Mumbulsari; h. Makam Turba Condro berada di Kecamatan Kaliwates; i. Makam Habib Sholeh di Kecamatan Tanggul; j. Makam Kyai Umar di Kecamatan Sukowono; k. Petilasan Sembah Demang di Kecamatan Patrang; l. Tugu Mastrip I dan II berada di Kecamatan Jelbuk; m. Tugu Muhammad Sroedji di Kecamatan Mumbulsari; dan n. <i>Sarchopagus</i> berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa. 3) Daya Tarik Wisata Buatan Manusia meliputi: a. Jember Fashion Carnaval di Kecamatan Sumbersari; b. Taman rekreasi Oleng Sibutong berada di Kecamatan Arjasa c. Pemandian Patemon berada di Kecamatan Tanggul; d. Pemandian Kebonagung berada di Kecamatan Kaliwates; e. Pemandian Niagara Waterpark dan Pontang Jaya berada di Kecamatan Ambulu; f. Pemandian Tiara Waterpark di kecamatan Sumbersari; g. Wisata Agro Glantangan di Kecamatan Tempurejo; h. Wisata Agro Puslit Kopi dan Kakao di Kecamatan Rambipuji; i. Wisata Agro Gunung Gumitir di Kecamatan Silo; j. Wisata Agro Mumbul Garden di Kecamatan Mumbulsari; k. Rest Area



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Jubung (di area Perhutani) di Kecamatan Sukorambi; l. Taman Botani Sukorambi di Kecamatan Sukorambi; m. Wisata Agro Kebun teh Gunung Gambir di Kecamatan Sumberbaru; n. Wisata Agro Gunung Pasang di Kecamatan Panti; o. Wisata Rembangan dan Perkebunan Rayap berada di Kecamatan Arjasa; p. Lapangan Golf Glantangan berada di Kecamatan Tempurejo. q. Agro wisata dan loko tour Garahan - silo berada di Kecamatan Silo; dan r. Jember Sport Garden berada di Kecamatan Ajung.
8	Kawasan Peruntukan Industri			1) Kawasan peruntukan industri berada di seluruh kecamatan 2) sentra industri meliputi: Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Puger; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; dan Kecamatan Bangsalsari.
9	Kawasan peruntukan Permukiman		47,2	1) Kawasan permukiman perkotaan meliputi seluruh kawasan perkotaan 2) Kawasan permukiman perdesaan meliputi seluruh kawasan perdesaan
10	Kawasan Peruntukan Lainnya			1) Kawasan pertahanan dan keamanan; a. Area latihan militer meliputi: a) Gunung Mayang Komplek di Kecamatan Mayang; b) Kecamatan Ambulu; c) Kecamatan Wuluhan; dan d) Kecamatan Puger b. Perkantoran militer meliputi: a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 berada di Kecamatan Patrang; b) Brigif 9 Kosttrad di Kecamatan Patrang; c) Batalyon Infanteri 515 Kostrad di Kecamatan Tanggul; d) Batalyon Infanteri 509 Kostrad di Kecamatan Sumbersari; e) Batalyon Arteleri Medan 8 Kostrad di Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Ambulu; f) Sub Denpom di Kecamatan Sumbersari; dan g) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan. c. Perkantoran kepolisian meliputi: a)



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kaliwates; dan b) Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan. d. Sekolah calon bintangara (Secaba) terdapat di Kecamatan Sumber Sari 2) Kawasan perdagangan dan jasa meliputi a) Kawasan perkotaan PKW; b) Kawasan perkotaan PKLp; c) Kawasan perkotaan PPK. 3) Kawasan pemerintahan meliputi a) Pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten berada di wilayah Kabupaten Jember; b) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan berada di seluruh kecamatan; dan c) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan akan diatur dalam rencana detail tata ruang. 4) Kawasan sektor informal meliputi di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Jember

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

H. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Perencanaan Kawasan lindung Kabupaten Jember tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Rencana Kawasan lindung meliputi:

a) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung terdapat seluas 45.139 hektar yang meliputi wilayah: Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalasari, Kecamatan Panti, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Silo, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Ledokombo dan Kecamatan Puger.

b) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya adalah Kawasan resapan air yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Arahkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya meliputi rehabilitasi lingkungan dan penanaman pohon lindung dalam kawasan resapan air.

c) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar waduk, Kawasan ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan, Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sekitar mata air.

Tabel 1.9
Kawasan Lindung Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan sempadan sungai	1) DAS Jember berada di Desa Andongrejo 2) DAS Curah Sari berada di Desa Andongrejo 3) DAS Sumbing berada di Desa Andongrejo 4) DAS Kumbu berada di Desa Andongrejo 5) DAS Klabang berada di Desa Andongrejo 6) DAS Curah Grembyak berada di Desa Andongrejo 7) DAS Kebonpantai berada di Desa Andongrejo 8) DAS Curah Sumbi berada di Desa Andongrejo 9) DAS Curah Jati berada di Desa Andongrejo 10) DAS Curah Kekeh berada di Desa Andongrejo 11) DAS Curah Nongko Hilir berada di Desa Andongrejo 12) DAS Curah Nongko Hulu berada di Desa Curah Nongko 13) DAS Rowocangak berada di Desa Curah Nongko–Desa Andongrejo 14) DAS Mayang berada di Desa Mayang – Desa Sabrang 15) DAS Gemunting berada di Desa Sumber Rejo 16) DAS Sumber rejo berada di Desa Sumber Rejo 17) DAS Sumber Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 18) DAS Curah Lo berada di Kecamatan Wuluhan 19) DAS Lodong berada di Kecamatan Wuluhan 20) DAS Curah Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 21) DAS Badeng Loje Hulu berada di Kecamatan Wuluhan 22) DAS Curah Loje berada di Kecamatan Wuluhan 23) DAS Kuning berada di Kecamatan Wuluhan 24) DAS Sogol berada di Kecamatan Wuluhan 25) DAS Lojejer Hilir berada di Kecamatan Wuluhan 26) DAS Lojejer Tengah berada di Kecamatan Wuluhan 27) DAS Lojejer berada di Kecamatan Wuluhan 28) DAS Banteng Jejer berada di Kecamatan Wuluhan 29) DAS Bedadung berada di Desa Rowosari – Desa Puger Kulon 30) DAS Jatiroto berada di Desa Darungan – Desa Puger Kulon



No.	Jenis Kawasan	Letak
		31) DAS Besini berada di Desa Karang Duren – Desa Mojosari 32) DAS Tanggul berada di Desa Tanggul Kulon – Desa Kepanjen 33) DAS Nusa Barong berada di Desa Puger Kulon
2	Kawasan sekitar waduk	Kawasan sekitar Waduk Antrokan berada di Kecamatan Tanggul; Kawasan sekitar Dam meliputi: 1) Dam Talang, di Kecamatan Jenggawah; 2) Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan 3) Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
3	Kawasan RTH Taman dan Hutan Kota	1) Taman Mastrip; 2) Taman depan DPRD; 3) Taman Sukorejo; 4) Taman Tugu Koperasi; 5) Taman Loka Dharma; 6) Taman <i>Double Way</i> GOR; 7) Taman Semanggi; 8) Taman Alun-alun; 9) Taman Batas kota Jubung; 10) GOR PKPSO; 11) Stadion Notohadinegoro; 12) Lapangan Sukorejo Kecamatan Sumbersari; 13) Lapangan Talangsari Kecamatan Kaliwates; 14) Lapangan Mangli Kecamatan Kaliwates; 15) Jember <i>Sport Garden</i> (JSG) di Kecamatan Ajung; 16) RTH Perkotaan Kecamatan Tanggul; 17) RTH Perkotaan Kecamatan Kencong; 18) RTH Perkotaan Kecamatan Balung; 19) RTH Perkotaan Kecamatan Kalisat; 20) RTH Perkotaan Kecamatan Rambipuji; 21) RTH Perkotaan Kecamatan Arjasa; 22) RTH Perkotaan Ambulu; dan 23) RTH Perkotaan Kecamatan Mayang. 24) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jelbuk; 25) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Silo; 26) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jombang; 27) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Sumberbaru; 28) Hutan Kota di Kecamatan Ajung; 29) Hutan Kota di Kecamatan Patrang; 30) Hutan Kota di Kecamatan Kaliwates; dan 31) Hutan Kota di Kecamatan Sumbersari.
4	RTH Jalur Hijau	1) Taman Baratan; 2) Taman Pagah; 3) Taman <i>Double Way</i> ; dan 4) Jalur dalam kota.
5	RTH Fungsi Tertentu	1) Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang; 2) Makam Cukil; 3) Makam Wetan Kantor; 4) Makam Kebonsari; 5) Makam Sukorejo; 6) Makam Kreongan; 7) Makam Non Muslim Kaliwates; dan



No.	Jenis Kawasan	Letak
		8) Makam Gebang.
6	Kawasan Sempadan Pantai	Memanjang dari perbatasan Kabupaten Lumajang sampai ke batas Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kencong – Gumukmas - Wuluhan – Puger - Ambulu – Tempurejo

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember meliputi : 1) Suaka Margasatwa; 2) Cagar Alam; 3) Taman Nasional; 4) Taman Wisata Alam; dan 5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Tabel 1.10

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Suaka Margasatwa	4.375,00	1) Kecamatan Panti 2) Kecamatan Bangsalsari
2	Kawasan Cagar Alam	7.654,70	1) Suaka Margasatwa Nusa Barong seluas kurang lebih 7.635,9 hektar di Kecamatan Puger; 2) Cagar Alam Watangan Puger seluas ± 2 Ha di Kecamatan Wuluhan; dan 3) Cagar Alam Curah Manis Sempolan I – VIII seluas kurang lebih 16,8 Ha di Kecamatan Silo.
3	Kawasan Taman Nasional	37.585,00	Taman Nasional Meru Betiri
4	Kawasan Wisata Alam	174,90	Pantai meliputi : 1) Pantai Watu Ulo berada di Kecamatan Ambulu; 2) Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3) Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4) Pantai Puger berada di Kecamatan Puger; 5) Pantai Bandelait berada di Kecamatan Tempurejo; dan 6) Pantai Canga'an berada di Kecamatan Tempurejo. Air terjun meliputi : 1) Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2) Air terjun Manggis berada di kecamatan Tanggul; 3) Air terjun Lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe; 4) Air terjun Pasaran berada di Kecamatan Sumberjambe; 5) Air terjun Antrokan berada di Kecamatan Ledokombo; dan 2) Air terjun Slateng berada di Kecamatan Ledokombo.



No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan berupa Situs Purbakala		1) Koleksi cagar budaya bergerak Kabupaten Jember; 2) Koleksi Situs Kamal di Arjasa yang terdiri dari Situs Kendal, Klanceng, dan Duplang; 3) Situs Dolmen Sukosari Sukowono terdiri dari Situs Mojo dan Situs Srino; 4) Situs Seputih Mayang terdiri dari Situs sarchopagus dan Situs Batu Kangkang; 5) Situs Sucopangepok terdiri dari Situs Pakel dan Lengkong; 6) Situs SukoJember terdiri dari Situs Suko; 7) Situs Prasasti Batu Gong di Kecamatan Rambipuji; 8) Situs Prasasti Congapan di Karangbayat Kecamatan Sumberbaru; 9) Situs Candi Deres di Kecamatan Gumukmas; dan 10) Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.
6	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu pengetahuan berupa Bangunan Cagar Budaya		1) Rumah Dokter Naryo (sebelah Kantor Puslit Kakao); 2) Eks. Kantor PT. Tjipta Niaga; 3) Eks Kantor Pemkab Jember; 4) Gedung GNI Jember; 5) SDK Maria Fatima; 6) Eks Kantor BRI; 7) SMP 1 Jember; 8) Kantor PTPN XII; 9) Hangar Tembakau PTPN XII; 10) Universitas Tawang Alun; 11) Hotel dan Pemandian Rembangan; 12) Eks. Pabrik Beras Redjoagung Mangli; 13) Masjid Raya Jember; 14) Konter Telisa jalan PB. Sudirman; 15) Toko Nanyang jalan Sultan Agung; 16) Kodim 0824 Jember; 17) Kantor Camat Wuluhan; 18) Water Tourent pasar Tanjung; 19) Pos Militer jalan PB. Sudirman; 20) Stasiun Jember; 21) Perumahan dan Kantor PG. Semboro di Kencong; 22) Sekolah Mulo (SMK belakang Pemkab Jember) jalan Kartini; 23) Sekolah Jepang (Yon Armed 8 Jember); 24) Sekolah Tehnik (SMP 10 Jember); 25) Goa Jepang; 26) Lembaga Kemasyarakatan Jember; 27) Rumah Pecinan di jalan Imam Syafii

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035



Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035, kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana. Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Jember secara detail disajikan pada berikut

Tabel 1.11
Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan rawan tanah longsor	a. Kecamatan Arjasa; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Sukorambi; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul; f. Kecamatan Sukowono; g. Kecamatan Sumberjambe; h. Kecamatan Silo; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Sumberbaru; k. Kecamatan Panti; l. Kecamatan Rambipuji; m. Kecamatan Mumbulsari. n. Kecamatan Ledokombo; o. Kecamatan Patrang; dan p. Kecamatan Mayang.
2	Kawasan rawan letusan gunung api	a. Kecamatan Sukowono; b. Kecamatan Ledokombo; c. Kecamatan Sumberjambe; d. Kecamatan Silo; e. Kecamatan Kalisat; f. Kecamatan Mayang; g. Kecamatan Jelbuk; h. Kecamatan Arjasa; i. Kecamatan Patrang; j. Kecamatan Sukorambi; k. Kecamatan Tanggul; dan l. Kecamatan Sumberbaru.
	Kawasan rawan angin kencang dan puting beliung	meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan tsunami	a. Kecamatan Kencong; b. Kecamatan Gumukmas; c. Kecamatan Puger; d. Kecamatan Wuluhan; e. Kecamatan Ambulu; dan f. Kecamatan Tempurejo
	Kawasan rawan banjir	a. Kecamatan Panti; b. Kecamatan Tempurejo; c. Kecamatan Kencong; d. Kecamatan Rambipuji; e. Kecamatan Jengawah; dan



No.	Jenis Kawasan	Letak
		f. Kecamatan Silo.
	Kawasan rawan gempa bumi	Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan bencana kekeringan	a. Kecamatan Patrang; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Arjasa; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul; f. Kecamatan Sumberbaru; g. Kecamatan Panti; h. Kecamatan Sumbersari; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Pakusari; k. Kecamatan Silo; dan l. Kecamatan lainnya sesuai dengan hasil identifikasi

Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan menghitung Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Jember sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 disebutkan bahwa parameter yang digunakan dalam penyusunan IRB diantaranya yaitu:

1. Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupadata frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempabumi, tsunami, dan lain-lain;
2. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.



1.5.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data “Kabupaten Jember Dalam Angka 2024” yang dirilis BPS Kab. Jember, jumlah penduduk Kabupaten Jember pada Tahun 2023 mencapai 2.600.663 jiwa yang terdiri atas 1.298.852 jiwa penduduk laki-laki dan 1.301.811 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jember pada Tahun 2023 mencapai 784,72 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kaliwates dengan kepadatan sebesar 5.139,69 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Tempurejo sebesar 157,98 jiwa/Km².

1.5.3 Pertumbuhan Penduduk

Pada Tahun 2023 Penduduk Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 0,63%. Sedangkan angka rasio jenis kelamin Tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,77.

Tabel 1.12

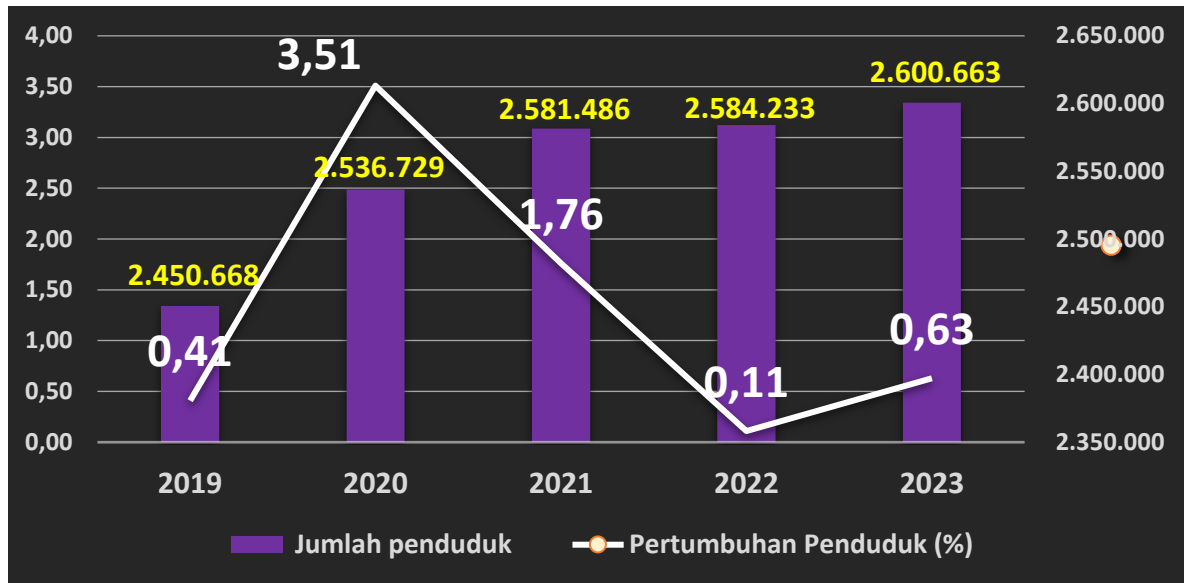
Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.450,668	2.536.729	2.581.486	2.584.233	2.600.663
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,41	3,51	1,76	0,11	0,63
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	744.13	770,26	783,85	784,68	784,72
Sex Ratio (L/P) (%)	96,68	99,46	99,69	99,75	99,77
% Penduduk Menurut Kelompok Umur					
0 – 14 tahun (%)	22,78	20,86	20,39	20,23	20,53
15 – 64 tahun (%)	68,76	68,48	70,35	72,13	69,43
> 65 tahun (%)	8,17	8.74	8,79	9,24	10,03

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024 – data diolah)

Gambar 1.4

Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024 – data diolah)

Tabel 1.13

Jumlah Penduduk, Luas Wlayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1	Kencong	71.327	2,74	65,92	1.090,63
2	GumukMas	89.412	3,44	82,98	987,65
3	Puger	125.496	4,83	148,99	789,43
4	Wuluhan	128.426	4,94	137,18	922,20
5	Ambulu	120.660	4,64	104,56	1.189,82
6	Tempurejo	81.515	3,13	524,46	157,98
7	Silo	111.292	4,28	309,98	323,13
8	Mayang	52.550	2,02	63,78	917,42
9	Mumbulsari	70.018	2,69	95,13	777,98
10	Jenggawah	91.175	3,51	51,02	1.488,81
11	Ajung	85.662	3,29	56,61	1.455,85
12	Rambipuji	88.426	3,40	52,8	1.607,75
13	Balung	84.240	3,24	47,12	1.705,61
14	Umbulsari	79.247	3,05	70,51	1.108,97
15	Semboro	50.049	1,92	45,43	1.107,28
16	Jombang	56.229	2,16	54,3	1.043,40
17	Sumberbaru	115.692	4,45	166,38	718,41
18	Tanggul	93.921	3,61	199,99	463,53



No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
19	Bangsalsari	127.888	4,92	175,28	790,65
20	Panti	66.933	2,57	160,71	369,80
21	Sukorambi	42.416	1,63	60,63	904,01
22	Arjasa	42.597	1,64	43,75	1.187,21
23	Pakusari	46.826	1,80	29,11	1.497,95
24	Kalisat	80.687	3,10	53,48	1.531,93
25	Ledokombo	70.455	2,71	146,92	526,41
26	Sumberjambe	64.765	2,49	138,24	487,21
27	Sukowono	62.335	2,40	44,04	1.381,23
28	Jelbuk	33.692	1,30	65,06	459,14
29	Kaliwates	127.156	4,89	24,94	5.139,69
30	Sumbersari	136.528	5,25	37,05	3.794,55
31	Patrang	103.048	3,96	36,99	2.807,08
Jumlah/Total		2.600.663	100	3.293,34	784,72

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024)

1.5.4 Jumlah PNS

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jember Tahun 2023 sejumlah 9.441 orang dengan komposisi 4.293 pegawai laki-laki dan 5.148 pegawai perempuan sebagaimana berikut:

Tabel 1.14

Perkembangan Aparatur (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	6.638	5.782	5.252	4.829	4.293
2.	Perempuan	6.473	6.001	5.591	5.473	5.148
	Jumlah	13.111	11.783	10.843	10.302	9.441

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Jember

Data di atas menjelaskan perkembangan PNS dari tahun 2019-2023 berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui terdapat penurunan PNS dari tahun 2019-2023. Dari tahun ke tahun, kebutuhan aparatur pemerintah terus meningkat, seiring dengan meningkatnya tugas pelayanan kepada masyarakat, di samping tentunya

untuk mengisi kekosongan pegawai karena memasuki masa purna tugas (pensiun) atau karena proses mutasi, terutama pegawai yang meninggalkan wilayah Kabupaten Jember dan memilih tempat tugas di daerah lain namun tidak sebanding dengan jumlah formasi pengangkatan PNS baru.

1.5.5 Realisasi APBD Tahun 2023

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan langkah konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan penyesuaian titik berat pembangunan pada program-program prioritas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

APBD disusun menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), yaitu pendekatan penganggaran dengan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, terkait dengan tingkat pelayanan dari hasil yang dapat dicapai.

Dalam pelaksanaannya, ABK adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Melalui ABK keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diidentifikasi, sehingga program dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, jika ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.



Berkaitan dengan hal tersebut, total realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan	:	3.957.291.914.806,93
2. Belanja	:	3.802.222.061.677,92
Surplus/Defisit	:	155.069.853.129,01
3. Pembiayaan		
a. Pembiayaan Penerimaan	:	121.391.026.149,85
b. Pembiayaan Pengeluaran		
Pembiayaan Netto	:	121.391.026.149,85

1.5.5.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di tahun anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 3.996.941.711.054 dapat terealisasi sebesar Rp.3.957.291.914.806,93 atau 99,01%. Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain berasal dari 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/ (KURANG)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	845.987.143.485	764.361.566.432,93	90,35	(81.625.577.052,07)
1.1.1	Pajak Daerah	322.450.000.000	288.016.184.866,00	89,32	(34.433.815.134,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	30.283.548.920	27.374.994.636,00	90,40	(2.908.554.284,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.400	7.189.012.400,00	100,00	-
1.1.4	Lain – lain PAD yang Sah	486.064.582.165	441.781.374.537,18	90,89	(44.283.207.627,82)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.149.862.264.569	3.191.994.244.040,00	101,34	42.131.979.471,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.828.602.388.348	2.845.857.792.619,00	100,61	17.255.404.271,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	321.259.876.221	346.136.451.421,00	107,74	24.876.575.200,00
1.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.092.303.000	936.104.334,00	85,70	(156.198.666,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.092.303.000	936.104.334,00	85,70	(156.198.666,00)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.996.941.711.054	3.957.291.914.806,93	99,01	(39.649.796.247,07)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

1.5.5.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Jember di tahun anggaran 2023 yang dialokasikan sebesar Rp. 4.118.279.658.762 dapat terealisasi sebesar Rp.3.802.222.061.677,92 atau 92,33%. Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 secara garis besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG
2.1	BELANJA OPERASI	3.288.813.950.585	3.015.559.884.677,66	91,69	(273.254.065.907,34)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.506.793.438.014	1.361.120.333.591,47	90,33	(145.673.104.422,53)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.472.091.271.603	1.354.258.354.206,19	92,00	(117.832.917.396,81)
2.1.5	Belanja Hibah	277.187.318.968	270.995.238.880,00	97,77	(6.192.080.088,00)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	32.741.922.000	29.185.958.000,00	89,14	(3.555.964.000,00)
2.2	BELANJA MODAL	260.564.465.920	232.163.748.376,26	89,10	(28.400.717.543,74)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.421.865.814	79.716.522.691,50	80,18	(19.705.343.122,50)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.165.714.406	54.635.641.878,00	90,81	(5.530.072.528,00)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.736.033.942	43.233.220.730,76	94,53	(2.502.813.211,24)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.734.987.026	54.351.340.328,00	99,30	(383.646.698,00)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	45.162.296.180	31.854.315.147,00	70,53	(13.307.981.033,00)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	45.162.296.180	31.854.315.147,00	70,53	(13.307.981.033,00)
2.4	BELANJA TRANSFER	523.738.946.077	522.644.113.477,00	99,79	(1.094.832.600,00)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000	22.500.000.000,00	100	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	501.238.946.077	500.144.113.477,00	99,78	(1.094.832.600,00)
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.118.279.658.762	3.802.222.061.677,92	92,33	(316.057.597.084,08)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

1.5.5.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember di tahun anggaran 2023 berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan sebesar Rp.



121.337.947.707 dapat terealisasi sebesar Rp. 121.391.026.149,85 atau 100,04%. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/ (KURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	121.337.947.707	121.391.026.149,85	100,04	53.078.442,85
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	121.337.947.707	121.391.026.149,85	100,04	53.078.442,85
PEMBIAYAAN NETTO		121.337.947.707	121.391.026.149,85	100,04	53.078.442,85

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

2**Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Melalui Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dalam implementasi arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan program prioritas.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses perencanaan dan penganggaran Kabupaten Jember sudah menggunakan SIPD yang mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola Keuangan Daerah telah mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh sumberdaya keuangan daerah untuk dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, Tema Pembangunan Kabupaten Jember pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**“Pembangunan Ketahanan Sosial dan Ekonomi untuk
Kesejahteraan Masyarakat”**

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut maka pembangunan Kabupaten Jember tahun 2023 diarahkan pada tujuh prioritas yaitu:

- Prioritas Jember 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
- Prioritas Jember 2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
- Prioritas Jember 3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Prioritas Jember 4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.
- Prioritas Jember 5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.
- Prioritas Jember 6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.
- Prioritas Jember 7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 bahwa pada Tahun 2023 terdapat 162 Program, 417 Kegiatan dan 930 Sub-kegiatan. Berikut disampaikan penjabaran perubahan besaran program kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023.

Tabel 2.1
Perubahan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan pada Tahun 2023

PROGRAM				KEGIATAN				SUB-KEGIATAN			
RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	P-APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	P-APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	P-APBD 2023
162	162	162	145	408	417	417	376	889	930	930	1062

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah secara umum diukur dengan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan persentase kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri meliputi penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama PAD yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai kegiatan operasional baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan



Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah adalah:

1. Meningkatkan pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan Daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
9. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Transfer; dan
10. Optimalisasi peningkatan PAD melalui kajian dan pendataan potensi sumber sumber pajak/retribusi baru, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak/retribusi, pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penagihan piutang pajak/retribusi.
11. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sampai ditingkat desa/kelurahan, peningkatan kualitas sarana prasarana pemungutan



pajak daerah, dan retribusi daerah serta kerja sama dengan lembaga keuangan/non keuangan dalam pemungutan pajak daerah.

12. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif.
13. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif pilihan model layanan pembayaran dengan memperbanyak jaringan tempat pembayaran seluas-luasnya berkerja sama dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan guna mewujudkan digitalisasi transaksi daerah sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital.
4. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah bersinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah, pembentukan dan sinkronisasi data dengan pihak terkait



serta pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dimana kepada wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah.

5. Mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
6. Mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian/perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
9. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

2.1.2 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 semula Rp.3.923.045.237.662 bertambah sebesar Rp.73.896.473.392 atau 1,88% menjadi Rp. 3.996.941.711.054 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp. 851.853.426.102 berkurang sebesar Rp.5.866.282.617 atau 0,69% menjadi Rp.845.987.143.485



- b. Pendapatan Transfer semula Rp.3.071.191.811.560 bertambah sebesar Rp. 78.670.453.009 atau 2,56% menjadi Rp.3.149.862.264.569
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula tidak dianggarkan dalam APBD TA 2023 pada APBD Perubahan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.092.303.000.

Rincian Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Penjabaran Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	851.853.426.102	845.987.143.485	(5.866.282.617)
1.1.1	Pajak Daerah	346.314.000.000	322.450.000.000	(23.864.000.000)
1.1.2	Restribusi Daerah	50.098.719.343	30.283.548.920	(19.815.170.423)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.102.248.169	7.189.012.400	1.086.764.231
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	449.338.458.590	486.064.582.165	36.726.123.575
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.071.191.811.560	3.149.862.264.569	78.670.453.009
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.786.893.734.000	2.828.602.388.348	41.708.654.348
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar daerah	284.298.077.560	321.259.876.221	36.961.798.661
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.092.303.000	1.092.303.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	1.092.303.000	1.092.303.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.923.045.237.662	3.996.941.711.054	73.896.473.392

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember 2024



2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/ kegiatan.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2023 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi: (1) Perencanaan yang tepat, (2) Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas, (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel, (4) Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif, (5) Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin. Sedangkan arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 adalah pada:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;



5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 lebih diarahkan pada pemulihan perekonomian masyarakat, juga diarahkan pada penuntasan program kegiatan yang dipastikan dapat tercapai output yang terukur dan berdampak langsung kepada pelayanan publik. Disamping itu adalah optimalisasi stimulus sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Jember.

2.2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 semula Rp.4.222.514.747.747 berkurang sebesar Rp. 104.235.088.985 atau 2,53% menjadi Rp. 4.118.279.658.762 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi semula Rp.3.154.064.839.270 bertambah sebesar Rp. 134.749.111.315 atau 4,27% menjadi Rp. 3.288.813.950.585
- b. Belanja Modal semula Rp.500.949.147.978 berkurang sebesar Rp. 240.384.682.058 atau 47,98% menjadi Rp. 260.564.465.920
- c. Belanja Tak Terduga semula Rp.54.393.322.343 berkurang sebesar Rp.9.231.026.163 atau 16,97% menjadi Rp.45.162.296.180
- d. Belanja Transfer semula Rp.513.107.438.156 bertambah sebesar Rp.10.631.507.921 atau 2,07% menjadi Rp.523.738.946.077

Rincian Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.3
Penjabaran Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.1	BELANJA OPERASI	3.154.064.839.270	3.288.813.950.585	134.749.111.315
2.1.1	Belanja Pegawai	1.480.923.576.811	1.506.793.438.014	25.869.861.203
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.533.081.691.421	1.472.091.271.603	(60.990.419.818)
2.1.5	Belanja Hibah	106.708.699.038	277.187.318.968	170.478.619.930
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.350.872.000	32.741.922.000	(608.950.000)
2.2	BELANJA MODAL	500.949.147.978	260.564.465.920	(240.384.682.058)
2.2.1	Belanja Modal tanah	3.402.694.100	-	(3.402.694.100)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.985.594.126	99.421.865.814	(30.563.728.312)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.848.608.620	60.165.714.406	(45.682.894.214)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.469.330.489	45.736.033.942	(130.733.296.547)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	89.948.657.143	54.734.987.026	(35.213.670.117)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	294.263.500	505.864.732	211.601.232
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	54.393.322.343	45.162.296.180	(9.231.026.163)
2.4	BELANJA TRANSFER	513.107.438.156	523.738.946.077	10.631.507.921
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000	22.500.000.000	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	490.607.438.156	501.238.946.077	10.631.507.921
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.222.514.747.747	4.118.279.658.762	(104.235.088.985)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember 2024

2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan Daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit atau surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan Daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Salah satu sumber penerimaan daerah selain Pendapatan Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan bersumber dari SILPA. Mempedomani Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa SILPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2.3.2 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 semula Rp.299.469.510.085 berkurang sebesar Rp.178.131.562.377 atau 59,48% menjadi Rp. 121.337.947.708.

Rincian Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Penjabaran Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

NO	PEMBIAYAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)
Pembiayaan Netto		299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember 2024

Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Hal itu bermakna bahwa APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

APBD juga diarahkan pada pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan APBD Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 – 2020

URAIAN	TAHUN	
	2019	2020
Pendapatan	3.815.931.626.881,96	3.665.003.964.118,68
Pendapatan Asli Daerah	667.598.426.909,96	660.367.999.055,62
Pendapatan Transfer	2.402.647.387.288,00	2.240.229.530.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	745.685.812.684,00	764.406.435.063,06
Belanja	3.876.912.578.274,08	4.271.921.483.957,88
Belanja Tidak Langsung	2.000.732.096.702,49	2.673.960.829.952,36
Belanja Langsung	1.876.180.481.571,59	1.597.960.654.005

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember 2024

Tabel 2.6
Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021-2023

URAIAN	TAHUN		
	2021	2022	2023
Pendapatan	3.681.432.575.560,00	3.852.241.731.262,00	3.996.941.711.054,00
Pendapatan Asli Daerah	719.879.915.600,00	694.849.881.962,00	845.987.143.485,00
Pendapatan Transfer	2.743.316.319.429,00	3.115.610.203.172,00	3.149.862.264.569,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	218.236.340.531,00	41.781.646.128,00	1.092.303.000,00
Belanja	4.376.974.822.454,00	4.421.761.557.082,00	4.118.279.658.762,00
Belanja Operasi	3.121.862.751.642,00	3.048.139.447.557,00	3.288.813.950.585,00
Belanja Modal	735.350.920.728,00	855.741.991.069,00	260.564.465.920,00
Belanja Tidak Terduga	40.357.565.574,00	4.906.113.987,00	45.162.296.180,00
Belanja Transfer	519.761.150.084,00	512.974.004.469,00	523.738.946.077,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember 2024

APBD Kabupaten Jember setiap tahunnya harus tetap ditujukan untuk belanja pelayanan dasar/publik yang berorientasi pada rakyat, sebagai upaya mencapai sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat Jember.

APBD Kabupaten Jember harus secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan agar mampu memecahkan persoalan-persoalan sosial yang mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi.

3**Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, pembagian urusan juga mengalami penyesuaian yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, Kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.



Urusan Pemerintahan juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan), Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah), Unsur Kewilayahan (Kecamatan) dan Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Berikut adalah Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta capaian Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan urusan :

3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berikut adalah Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2023 yang mencakup Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja yang telah disusun:

***Keterangan :** Kolom Tindaklanjut Rekomendasi DPRD berisi Kode yang mengacu pada Subbab 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (Halaman 3-346 s/d 3-498)

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.0.00.0 .00.1..0000		DINAS PENDIDIKAN										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Rp813.871.200	4	Rp785.981.500	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.6
1.01.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Rp101.694.400	2	Rp91.550.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp350.980.000	4	Rp324.715.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 1.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Rp2.393.247.900	4	Rp2.108.488.100	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 1.03				Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4	Rp206.000.000	4	Rp187.500.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.01.2.0 2				Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15626	Rp787.259.569.406	15152	Rp755.727.558.553	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Rp8.972.288.898	1	Rp7.878.366.900	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 3				Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.01.01.2.0 3.05				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Rp434.160.000	1	Rp259.865.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 6				Administrtasi Umum Perangkat Daerah								
1.01.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp100.000.000	1	Rp98.609.498	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp1.027.017.840	1	Rp976.023.700	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp449.596.200	1	Rp431.083.888	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp131.301.787	1	Rp125.025.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp1.278.598.000	1	Rp1.086.367.783	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.01.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp8.919.000	1	Rp1.100.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp540.174.135	1	Rp506.020.953	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Rp47.688.800	10	Rp47.612.526	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110	Rp266.786.600	97	Rp242.607.698	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Rp407.939.200	29	Rp406.600.357	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang diadakan Pemeliharaan Rutin/Berkala	5	Rp1.239.525.407	4	Rp958.564.300	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.01.2.0 5				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH								
1.01.02			MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah							
1.01.02.2.0 1				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
1.01.02.2.0 1.02				Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas yang telah dibangun	50	Rp1.919.670.400	34	Rp1.471.549.120	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Rp748.386.000	4	Rp693.685.070	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.05				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	5	Rp866.896.000	3	Rp785.857.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.02.2.0 1.06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5	Rp2.014.369.500	3	Rp1.714.975.555	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.24				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1036	Rp224.804.400	386	Rp83.915.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.7
1.01.02.2.0 1.25				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200	Rp140.751.300	91	Rp64.813.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.27				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200	Rp15.462.220.800	1170	Rp15.020.220.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.3
1.01.02.2.0 1.29				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1040	Rp162.889.160.000	975	Rp162.842.489.675	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.30				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65	Rp48.328.000	55	Rp41.430.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.08				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	13	Rp12.391.162.546	11	Rp11.517.803.532	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.03				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala yang dibangun	5	Rp454.156.000	3	Rp440.864.130	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.09				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala yang direhabilitasi sedang/berat	10	Rp236.031.000	6	Rp150.337.650	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.11				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang yang direhabilitasi sedang/berat	10	Rp130.034.000	4	Rp68.938.300	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.02.2.0 1.12				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	10	Rp80.589.000	9	Rp79.085.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.22				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150	Rp2.554.200.000	150	Rp2.459.772.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.23				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1093	Rp42.050.000	849	Rp32.675.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.31				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	25	Rp3.793.248.000	21	Rp3.392.957.645	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 1.40				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	200	Rp188.420.000	106	Rp99.900.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
1.01.02.2.0 2.14				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Di Rehabilitasi	7	Rp6.966.783.500	5	Rp5.938.987.750	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.35				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	169	Rp857.812.000	152	Rp857.165.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.37				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	94	Rp588.016.000	64	Rp353.180.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17000	Rp42.930.271.100	13863	Rp37.052.203.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.8
1.01.02.2.0 2.42				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	349	Rp86.261.060.000	281	Rp86.146.542.809	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.02.2.0 2.43				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21	Rp46.900.000	20	Rp45.500.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.06				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10	Rp11.846.944.000	8	Rp10.529.004.300	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.12				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	Rp7.296.634.000	8	Rp6.690.307.900	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.17				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	3	Rp245.000.000	2	Rp220.981.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	25000	Rp46.900.000	13512	Rp25.350.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.02				Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas yang telah dibangun	5	Rp1.696.330.400	3	Rp1.247.822.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.18				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Rp825.000.000	2	Rp625.112.700	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 2.53				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	350	Rp238.589.200	340	Rp224.975.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 3				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1.01.02.2.0 3.02				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7	Rp611.177.150	5	Rp483.964.500	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 3.12				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	250	Rp112.881.100	241	Rp108.600.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 3.15				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	6108	Rp24.035.888.000	6088	Rp23.730.814.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 3.18				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1877	Rp42.702.848.000	974	Rp41.446.992.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.02.2.0 3.03				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang direhabilitasi sedang/berat	7	Rp1.158.560.000	6	Rp975.651.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 3.27				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	500	Rp50.000.000	489	Rp49.000.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	
1.01.02.2.0 4				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
1.01.02.2.0 4.12				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1000	Rp150.000.000	980	Rp147.000.000	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.2
1.01.02.2.0 4.17				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14	Rp2.307.940.000	7	Rp1.235.220.650	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.2
1.01.02.2.0 4.01				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	10	Rp1.586.497.600	8	Rp1.234.503.850	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.2
1.01.02.2.0 4.13				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14	Rp163.600.000	11	Rp130.737.500	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.2 , A.4
1.01.04			MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tendik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan							
1.01.04.2.0 1				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
1.01.04.2.0 1.01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	Rp353.156.500	1	Rp345.633.100	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.1

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.01.04.2.0 1.02				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	14	Rp80.192.568.918	14	Rp77.019.710.134	kegiatan telah terlaksana	sudah sesuai kebutuhan	A.5, A.1
1.02.0.00.0 .00.1..0000		DINAS KESEHATAN										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.02.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp371.743.338	4	Rp351.358.433	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1837	Rp143.479.223.437	1837	Rp138.604.254.043	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp2.185.880.000	12	Rp1.713.001.519	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.02.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp23.569.360	1	Rp23.454.000	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Rp144.052.562	6	Rp119.615.500	kegiatan sedang berproses pada tahap persiapan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	
1.02.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Rp48.758.970	2	Rp40.734.000	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp78.580.000	2	Rp14.264.000	kegiatan sedang berproses pada tahap persiapan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	
1.02.01.2.0 6.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	136	Rp219.559.000	135	Rp125.945.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	
1.02.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Rp492.320.200	150	Rp440.333.138	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp22.500.000	12	Rp13.000.000	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp401.250.000	12	Rp347.091.600	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Rp315.000.000	8	Rp283.985.850	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	
1.02.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp95.005.000	1	Rp82.567.800	kegiatan sedang berproses pada tahap persiapan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Rp500.485.000	12	Rp470.822.675	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp99.128.850	1	Rp95.838.100	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	perlu dilakukan evaluasi percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran	
1.02.02			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat vaksin dan alat kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.0 1				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.0 1.10				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Rp1.046.431.100	1	Rp880.299.076	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	E.2
1.02.02.2.0 1.14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	Rp4.352.705.888	4	Rp4.282.763.648	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.02.2.0 1.15				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	5	Rp60.444.500	5	Rp51.848.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	perlu dilakukan evaluasi percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran	
1.02.02.2.0 1.16				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	23	Rp3.798.957.731	23	Rp3.703.456.233	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.02.2.0 1.17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3	Rp14.070.868.758	3	Rp12.037.179.822	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.02.2.0 1.21				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	50	Rp24.520.000	50	Rp5.892.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	
1.02.02.2.0 2				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.0 2.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36442	Rp5.256.212.900	29052	Rp4.069.243.700	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	B.6, E.2
1.02.02.2.0 2.04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173043	Rp130.400.000	141358	Rp130.139.250	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	B.6, E.2
1.02.02.2.0 2.16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Rp4.800.000	1	Rp4.800.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	
1.02.02.2.0 2.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Rp7.284.645.600	1	Rp6.898.335.750	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.02.2.0 2.19				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Rp75.123.000	1	Rp66.185.000	kegiatan sedang berproses pada tahap persiapan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	
1.02.02.2.0 2.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai target	14	Rp3.942.048.200	14	Rp3.163.737.711	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.02.2.0 2.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Rp123.239.487.651	1	Rp123.137.207.261	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	B.1, B.2, E.2

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.02.2.0 2.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Rp7.001.158.000	1	Rp6.800.858.000	sesuai	sudah sesuai kebutuhan	B.7, E.2
1.02.02.2.0 2.05				Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321215	Rp768.320.000	207064	Rp681.500.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Telah dilakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	E.2
1.02.02.2.0 2.08				Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	767032	Rp80.720.000	178902	Rp58.904.000	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.02.2.0 2.09				Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38018	Rp422.400.000	38018	Rp422.100.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	E.2
1.02.02.2.0 2.10				Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2480	Rp16.000.000	2480	Rp16.000.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	E.2
1.02.02.2.0 2.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29736	Rp417.371.797	29736	Rp329.081.200	kinerja telah sesuai target akan tetapi belum ada realisasi anggaran	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	E.2
1.02.02.2.0 2.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33469	Rp480.000.000	33469	Rp269.180.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi belum ada realisasi anggaran	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	E.2
1.02.02.2.0 2.13				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	Rp992.000.000	1	Rp265.800.000	kinerja telah sesuai target akan tetapi realisasi anggaran belum sesuai target	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	
1.02.02.2.0 2.20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Rp62.080.000	1	Rp18.720.000	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.02.2.0 2.39				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1100	Rp84.894.200	1100	Rp83.689.000	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.02.2.0 3				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								
1.02.02.2.0 3.02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Rp308.000.000	1	Rp303.032.000	kegiatan sedang berproses pada tahap persiapan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	
1.02.02.2.0 4				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.0 4.03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	58	Rp1.067.034.891	52	Rp952.787.330	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	B.8, B.11
1.02.02.2.0 4.04				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Rp6.979.426.310	1	Rp6.863.606.340	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	B.10
1.02.03			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan dengan nakes standar							
1.02.03.2.0 2				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
1.02.03.2.0 2.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2602	Rp9.503.646.468	2602	Rp8.138.131.568	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	B.3, B.4, B.5, E.2
1.02.04			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sarana produksi pangan IRT sesuai standar							
1.02.04.2.0 3				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.04.2.0 3.01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	22	Rp190.227.000	21	Rp111.835.000	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.04.2.0 6				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.0 6.01				Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	22	Rp158.800.000	21	Rp113.417.028	kegiatan sedang berproses pada tahap persiapan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Melakukan Percepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan	
1.02.05			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat							
1.02.05.2.0 1				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.05.2.0 1.01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Rp40.079.870.790	1	Rp37.072.770.995	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	B.9
1.02.01.2.1 0.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	1	Rp122.290.089.377	1	Rp92.669.609.584	Tidak Ada Permasalahan	sudah sesuai kebutuhan	
1.02.0.00.0 .00.2..0000		RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.1 0				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD								
1.02.01.2.1 0.01				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	1	Rp74.026.239.572	1	Rp71.139.841.738	Klaim JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan) yang belum lancar sehingga mempengaruhi pendapatan rumah sakit	Melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak lain/dinas kesehatan	
1.02.0.00.0 .00.3..0000		RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.1 0				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.01.2.1 0.01				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	Rp229.616.568.353	1	Rp219.193.972.148	Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan di RSD dr.Soebandi yang terdiri atas 3 belanja utama (Pegawai, Barang dan Jasa serta Modal), untuk Belanja Modal telah terlaksana sebagian (mebeleur, Alat Kedokteran dan Komputer) sedangkan kegiatan fisik (bangunan) masih dalam proses pelaksanaan, dan masa kontrak kegiatan fisik (bangunan) tersebut habis pada bulan Desember	Pencapaian kinerja sudah mencapai 99% dalam upaya tersebut RSD dr. soebandi berupaya mempercepat pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan di RSD dr.Soebandi	
1.02.0.00.0 .00.4..0000		RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.1 0				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.02.01.2.1 0.01				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Rp42.674.348.447	1	Rp33.895.299.213	Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan di RSD kalifat yang terdiri atas 3 belanja utama (Pegawai, Barang dan Jasa serta Modal), untuk melaksanakan belanja tergantung tingkat pendapatan BLUD.	Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan di RSD kalifat diprioritaskan untuk kegiatan rutin terlebih dahulu.	
1.03.0.00.0 .00.1..0000		DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.03.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.03.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3	Rp34.309.000	3	Rp31.575.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.03.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan kepada ASN	6916	Rp43.575.114.046	5607	Rp40.036.536.380	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	Rp4.950.044.460	600	Rp4.011.436.185	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.01.2.0 5.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50	Rp5.400.000	50	Rp5.400.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.03.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat kelistrikan dan penerangan bangunan kantor	1	Rp16.157.800	1	Rp14.780.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor penunjang administrasi	20	Rp139.531.150	20	Rp135.027.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Kebutuhan Alat Kantor	1	Rp117.397.575	1	Rp116.536.150	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah Dokumen Yg digandakan Dalam Satu Tahun	13	Rp23.371.750	13	Rp18.363.625	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun	12	Rp6.000.000	12	Rp4.960.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhi kebutuhan akan rapat koordinasi keluar daerah	12	Rp49.318.952	12	Rp42.747.672	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.03.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	4	Rp360.984.800	4	Rp350.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.03.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhi kebutuhan komunikasi, air dan kelistrikan	12	Rp491.183.200	12	Rp436.631.146	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	30	Rp55.816.000	30	Rp48.355.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan sajian makan dan minum pegawai yg disediakan	70	Rp182.160.000	70	Rp181.980.458	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.03.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil jabatan yang terpelihara	1	Rp61.469.000	1	Rp38.445.204	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.03.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dalam Satu Tahun	10	Rp279.177.450	10	Rp269.745.903	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.01.2.0 9.03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang dirawat / diperbaiki	53	Rp695.628.755	53	Rp643.404.612	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang dirawat/diperbaiki	9	Rp137.636.821	9	Rp124.371.539	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.02			MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penambahan irigasi kabupaten dalam kondisi baik							
1.03.02.2.0 1				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.02.2.0 1.61				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah I/G/HIPPA yang telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan Jumlah kelembagaan I/G/HIPPA yang telah dibentuk Jumlah legalitas kelembagaan I/G/HIPPA yang telah diterbitkan	100	Rp137.426.000	100	Rp104.071.424	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.02.2.0 1.62				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Permohonan penerbitan Rekomendasi Teknis	75	Rp62.667.375	68	Rp40.142.290	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.02.2.0 1.46				Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dinormalisasi	10	Rp418.076.100	10	Rp405.544.425	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.02.2.0 2				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.02.2.0 2.01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terpenuhinya Rencana Teknis Untuk Konstruksi Irigasi	100	Rp66.598.250	75	Rp37.680.910	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.02.2.0 2.14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran yang direhabilitasi	100	Rp8.471.007.000	99	Rp8.395.152.121	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	C.5
1.03.02.2.0 2.21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah lahan daerah irigasi yang dilayani Panjang saluran yang terpelihara	10	Rp1.149.932.392	10	Rp1.072.674.825	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.02.2.0 2.22				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang terpelihara Jumlah daerah irigasi yang tersedia air Jumlah dokumen manual DI yang dicetak	8	Rp49.039.200	8	Rp47.817.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.06			MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat							
1.03.06.2.0 1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.06.2.0 1.05				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang jaringan drainase dan Dinding Penahan yang dibangun	10000	Rp8.253.539.592	9703	Rp8.009.035.016	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	C.5
1.03.06.2.0 1.09				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Jaringan Drainase yang Perlu Pemeliharaan	2000	Rp2.329.361.200	1973	Rp2.298.010.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.07			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	--							
1.03.07.2.01				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.07.2.01.04				Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang dilakukan Koordinasi dan Pembinaan	226	Rp778.254.450	195	Rp754.184.427	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.10			MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)							
1.03.10.2.01				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
1.03.10.2.01.02				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Terpenuhinya Lahan Untuk Penyelenggaraan Jalan	4000	Rp606.004.875	528	Rp304.816.375	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.10.2.01.04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terpenuhinya Data Teknis Kondisi Jalan dan Jembatan	100	Rp352.422.150	92	Rp322.868.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	C.1
1.03.10.2.01.05				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan	540	Rp6.908.731.808	540	Rp6.716.987.187	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	C.5
1.03.10.2.01.11				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kabupaten yang perlu dilakukan pemeliharaan rutin	25	Rp9.962.249.700	25	Rp9.730.466.767	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.10.2.01.18				Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	205	Rp3.264.527.100	203	Rp3.199.647.036	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	C.5
1.03.10.2.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	700	Rp1.478.662.606	666	Rp1.413.405.869	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sudah sesuai yang direncanakan	
1.03.1.04.2.10.1.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA										

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.03.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.03.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp386.401.830	10	Rp343.010.702	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan di Tahun 2024 sesuai dengan rencana	
1.03.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.03.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	Rp10.101.004.132	97	Rp9.083.018.898	terpenuhinya jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.03.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang terselesaikan	2	Rp8.695.500	2	Rp8.211.596	kinerja sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target	
1.03.01.2.0 2.08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24	Rp122.152.250	24	Rp119.003.198	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.03.01.2.0 3.06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Rp86.962.940	2	Rp78.881.080	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.03.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Rp31.489.923	4	Rp31.279.561	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Rp660.328.727	4	Rp516.593.208	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp661.945.220	4	Rp581.069.804	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Rp55.572.150	4	Rp49.907.407	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp396.101.533	12	Rp335.030.869	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.03.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp7.325.475	12	Rp452.000	Karena kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebagian sudah dilaksanakan di kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun 2024 kegiatan penyediaan jasa surat menyurat akan dijadikan satu dengan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1.03.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp42.325.676.230	12	Rp42.276.662.221	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Rp188.500.089	24	Rp142.072.783	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Rp3.565.286.516	24	Rp3.267.066.176	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.03.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp87.752.128	1	Rp74.420.740	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	Rp2.144.323.535	63	Rp2.017.406.870	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp784.693.288	3	Rp556.461.714	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.01.2.0 9.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Rp100.173.388	2	Rp84.217.969	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.03			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penduduk yang memiliki akses air minum							
1.03.03.2.0 1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.03.2.0 1.04				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	250	Rp194.464.526	250	Rp162.492.717	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target	
1.03.03.2.0 1.11				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15	Rp87.788.400	15	Rp72.937.093	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	E.2

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.03.2.0 1.19				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang dikembangkan	15	Rp7.355.466.831	15	Rp7.044.284.679	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	E.2
1.03.03.2.0 1.07				Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50	Rp609.918.960	50	Rp578.959.286	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	E.2
1.03.03.2.0 1.03				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	1000	Rp51.800.000	1000	Rp47.420.000	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.05			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rumah tinggal bersanitasi								
1.03.05.2.0 1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.05.2.0 1.06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1950	Rp15.919.580.476	1950	Rp14.612.968.389	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	E.2
1.03.05.2.0 1.15				Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	1800	Rp2.106.769.256	1800	Rp1.571.609.156	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.08			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Bangunan ber-IMB per satuan bangunan								
1.03.08.2.0 1				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.08.2.0 1.01				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1000	Rp1.548.777.185	1000	Rp1.429.620.253	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	E.2
1.03.08.2.0 1.02				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25	Rp458.516.800	25	Rp437.876.800	Realisasi yang dicapai sudah sesuai dengan target yg ditentukan, Realisasi anggaran belum terserap maksimal karena masih dalam proses di pusat pemerintahan	Selalu koordinasi dengan pihak terkait, dan memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun berikutnya	
1.03.08.2.0 1.13				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	25	Rp12.339.717.880	25	Rp11.857.910.500	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.08.2.0 1.05				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp776.978.485	1	Rp762.850.500	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.12			MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun							
1.03.12.2.0 3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.0 3.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	180	Rp344.612.942	180	Rp298.716.345	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	C.3

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.12.2.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.04.04				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6	Rp241.391.286	6	Rp148.016.225	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.03.12.2.01				PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA								
1.03.12.2.01.01				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Rp484.899.000	1	Rp348.800.812	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	C.2
1.03.10			MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN --								
1.03.10.2.01				PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA								
1.03.10.2.01.05				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	12	Rp29.895.016.680	12	Rp29.358.134.500	Realisasi kinerja yang dicapai sudah sesuai dengan target yg ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	C.5
1.03.06			MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE --								
1.03.06.2.01				Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.03			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Unit rumah dalam permukiman layak huni							
1.04.03.2.01				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.04.03.2.0 1.01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	20	Rp206.243.100	20	Rp186.969.221	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.04.03.2.0 2				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
1.04.03.2.0 2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10	Rp185.740.300	10	Rp156.832.227	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.04.03.2.0 3				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
1.04.03.2.0 3.02				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	86	Rp3.087.829.250	86	Rp3.068.030.280	Realisasi Kinerja yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, E.2
1.04.05			---	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
1.04.05.2.0 1				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
1.04.05.2.0 1.02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	31	Rp23.817.515.549	31	Rp19.540.012.684	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	C.4, E.2

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.04.02			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Unit rumah layak huni							
1.04.02.2.03				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA								
1.04.02.2.03.01				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terrehabilitasi	5	Rp184.385.000	5	Rp157.500.000	Realisasi kinerja sudah tercapai sesuai dengan target yg ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
1.05.0.00.0.00.1..0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.05.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Rp1.000.000	1	Rp951.900	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	Rp1.042.000	1	Rp720.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2	Rp1.091.000	2	Rp1.042.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	Rp1.428.992	3	Rp1.320.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 1.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Rp1.298.200	3	Rp1.298.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji Tunjangan ASN	13	Rp13.067.841.088	13	Rp11.879.349.441	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	12	Rp421.098.000	12	Rp302.595.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Rp103.170.500	1	Rp101.266.000	Kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.05.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	4	Rp4.360.011	4	Rp4.321.400	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Rp138.200.300	1	Rp112.555.000	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	Rp3.117.069	4	Rp3.083.000	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Rp72.025.866	12	Rp71.867.866	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Rp22.538.075	6	Rp22.328.200	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp342.545.000	12	Rp325.982.905	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp41.550.304	12	Rp29.691.141	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Rp56.200.000	12	Rp49.299.332	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	Rp3.717.493.500	12	Rp3.609.925.923	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp64.141.500	1	Rp63.676.040	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	33	Rp455.165.147	33	Rp439.775.972	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02			TERJAGANYA KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat pelanggaran K3 (ketertiban ketenteraman keindahan) yang terselesaikan							
1.05.02.2.0 1				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.02.2.0 1.01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, pengamanan, dan pengawasan	9	Rp142.540.000	9	Rp139.424.000	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	E.1
1.05.02.2.0 1.03				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	11	Rp267.637.400	10	Rp254.932.730	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02.2.0 1.04				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	7	Rp185.765.000	4	Rp183.401.000	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02.2.0 1.05				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan masyarakatnya	56	Rp318.084.600	22	Rp300.264.690	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	E.4
1.05.02.2.0 1.06				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	Rp12.000.000	12	Rp10.830.000	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	E.1
1.05.02.2.0 2				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.02.2.0 2.01				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat atau pelaku usaha	20	Rp7.091.978.569	18	Rp6.826.140.860	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02.2.0 2.02				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	6	Rp100.772.731	3	Rp89.410.000	Nihil	kegiatan telah dilaksanakan	E.1
1.05.02.2.0 2.03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	30	Rp1.576.101.700	15	Rp1.185.050.000	Nihil	kegiatan telah dilaksanakan	E.1
1.05.03			MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN BENCANA DAERAH.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA --								
1.05.03.2.0 2				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
1.05.03.2.0 2.02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	465	Rp53.724.000	435	Rp50.309.000	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	E.3, E.4
1.05.04			TERJAGANYA KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (posko)/Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit)								
1.05.04.2.0 1				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.04.2.0 1.02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50	Rp437.775.600	29	Rp414.521.334	kegiatan termasuk wajib	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.04.2.0 1.03				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2	Rp16.682.000	2	Rp9.392.500	Nihil	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.4.01.0 .00.1..0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.05.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp38.972.000	2	Rp908.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai kebutuhan	
1.05.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp12.320.000	0	Rp6.352.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp10.505.500	1	Rp8.508.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp4.150.500	0	Rp0	Tidak ada serapan anggaran dikarenakan seluruh dokumen dikerjakan menggunakan fasilitas kantor	Penyerapan anggaran akan dimaksimalkan lagi	
1.05.01.2.0 1.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp4.720.000	1	Rp2.042.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai kebutuhan	
1.05.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Tersedianya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	26	Rp4.856.732.438	26	Rp3.149.905.514	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Anggaran sudah sesuai kebutuhan	
1.05.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran HR Tim Pengadaan Barang Jasa dan Hr Pengelola Keuangan	2	Rp201.960.000	2	Rp197.210.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai kebutuhan	
1.05.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp12.169.800	1	Rp7.974.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 2.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Rp3.894.000	12	Rp1.670.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Penyerapan anggaran akan lebih dimaksimalkan lagi	
1.05.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75	Rp271.971.000	75	Rp214.087.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.01.2.0 5.05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi yang dilaksanakan dan Tereadanya Dana untuk Honor TBO BPBD	4	Rp32.160.000	0	Rp0	Tidak melakukan penyerapan anggaran dikarenakan kegiatan akan dimaksimalkan ditahun berikutnya	Penyerapan anggaran akan dimaksimalkan tahun berikutnya	
1.05.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.05.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Rp22.057.000	3	Rp22.057.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp113.722.100	1	Rp89.153.100	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Rp2.099.340.700	6	Rp1.673.169.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan teredanya Bahan Logistik Kantor	1	Rp231.049.500	1	Rp217.555.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp16.221.000	2	Rp7.055.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp502.404.000	2	Rp291.136.636	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp4.200.000	1	Rp3.900.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Rp207.828.000	2	Rp122.077.179	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Rp1.511.270.000	2	Rp1.282.543.304	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp99.025.200	1	Rp70.715.062	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Rp1.106.181.500	27	Rp825.795.033	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp55.081.000	10	Rp22.204.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Rp90.000.000	2	Rp90.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.03			MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN BENCANA DAERAH.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (satlinmas/10000 penduduk))							
1.05.03.2.0 1				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
1.05.03.2.0 1.02				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500	Rp662.597.400	190	Rp583.900.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	E.3

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.03.2.0 2				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
1.05.03.2.0 2.02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300	Rp1.111.206.900	280	Rp968.912.233	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya	E.3
1.05.03.2.0 2.03				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	24	Rp243.307.000	24	Rp152.700.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.03.2.0 2.06				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2	Rp545.950.800	2	Rp386.267.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	E.3
1.05.03.2.0 4.06				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	150	Rp2.134.698.000	80	Rp1.702.276.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.03.2.0 2.08				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25	Rp473.005.000	25	Rp444.631.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.03.2.0 2.10				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelaksanaan Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana	1	Rp788.700.000	1	Rp567.518.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.03.2.0 3				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.05.03.2.0 3.02				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3	Rp403.738.352	3	Rp380.957.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
1.05.03.2.0 3.04				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	Rp1.599.729.524	320	Rp1.500.778.024	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	E.3
1.06.0.00.0 .00.1..0000		DINAS SOSIAL										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.06.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.06.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.06.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Rp85.400.000	1	Rp71.580.000	Tidak terdapat Permasalahan, merupakan kegiatan Rutin Kantor	Dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat yang mengajukan ijin rumah pemondokan	
1.06.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.06.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26	Rp4.592.813.613	26	Rp3.640.869.960	Tidak terdapat permasalahan, merupakan kegiatan Rutin kantor untuk memenuhi Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	dilaksanakan berdasarkan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
1.06.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.06.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Rp75.194.500	1	Rp73.089.680	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dilaksanakan berdasarkan Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	
1.06.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	1	Rp119.932.300	1	Rp109.566.000	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	dilaksanakan berdasarkan Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	
1.06.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Rp93.247.607	1	Rp79.012.921	Nihil	Nihil	
1.06.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan perundang-undangan yang disediakan	2	Rp3.750.000	2	Rp1.860.000	Nihil	Nihil	
1.06.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Rp231.547.600	1	Rp191.983.600	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
1.06.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2400	Rp5.550.000	2400	Rp4.400.000	Tidak terdapat permasalahan dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dilaksanakan berdasarkan penyediaan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	
1.06.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp197.499.445	12	Rp146.499.176	Tidak terdapat permasalahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
1.06.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp4.159.758.000	12	Rp3.923.445.583	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.06.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya	3	Rp181.765.500	3	Rp144.194.739	Tidak terdapat permasalahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya	
1.06.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	9	Rp540.490.000	9	Rp382.835.425	Tidak terdapat permasalahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	
1.06.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	Rp60.000.000	15	Rp48.355.100	Nihil	Nihil	
1.06.01.2.0 9.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Rp927.310.623	3	Rp798.029.800	Nihil	Nihil	
1.06.02			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							
1.06.02.2.0 3				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.0 3.01				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	1500	Rp989.243.000	1500	Rp855.302.500	Usulan dari masyarakat dalam Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.06.02.2.0 3.04				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	8	Rp762.476.000	8	Rp576.804.000	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	
1.06.04			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial							
1.06.04.2.0 1				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.0 1.05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten /kota	60	Rp2.167.710.500	60	Rp1.898.001.930	Nihil	Nihil	
1.06.04.2.0 1.06				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penerima bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	462	Rp864.668.000	462	Rp814.403.200	Tidak terdapat permasalahan dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	dilaksanakan berdasarkan Jumlah penerima bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	F.5, F.6
1.06.04.2.0 1.10				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	80	Rp78.351.500	80	Rp20.455.000	Tidak terdapat permasalahan dalam pemberian layanan kedaruratan	dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.06.04.2.0 1.01				Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	1000	Rp589.640.000	1000	Rp581.752.980	tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penyediaan Permakanan	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	
1.06.04.2.0 1.03				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	100	Rp249.355.000	100	Rp161.613.000	tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penyediaan Alat Bantu dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat	dilaksanakan berdasarkan Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	
1.06.04.2.0 2				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.0 2.14				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kab/kota	67	Rp264.940.000	67	Rp233.635.000	tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan masyarakat	dilaksanakan berdasarkan Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kab/kota	
1.06.04.2.0 2.07				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	25000	Rp1.675.462.000	25000	Rp1.625.565.250	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial sesuai dengan usulan dari masyarakat	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	
1.06.05			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.06.05.2.0 1				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								
1.06.05.2.0 1.03				Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1000	Rp218.920.000	1000	Rp194.355.000	tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar usulan dari masyarakat	Dilaksanakan berdasarkan Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota usulan dari masyarakat	E.2
1.06.05.2.0 1.01				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	100	Rp254.642.500	100	Rp229.293.750	Tidak terdapat permasalahan usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat terkait Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	E.2
1.06.05.2.0 2				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.05.2.0 2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	397140	Rp906.632.000	397140	Rp811.676.000	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	F.1, F.2, F.4
1.06.05.2.0 2.04				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kab/kota	175	Rp24.000.000	0	Rp0	Dialihkan untuk kegiatan lain	Dialihkan untuk kegiatan lain	
1.06.05.2.0 2.03				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	63335	Rp35.583.154.500	63335	Rp31.900.634.849	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Bekerjasama dengan Bank Jatim untuk pendistribusian bantuan BLT menggunakan VE, sehingga kegiatan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin	
1.06.06			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat							
1.06.06.2.0 1				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.06.06.2.0 1.04				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kab/kota	770	Rp4.736.521.100	770	Rp4.525.472.500	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat untuk penanganan Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kab/kota	
1.06.07			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Jumlah TMP yang dirawat								
1.06.07.2.0 1				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
1.06.07.2.0 1.02				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kab/Kota	825	Rp339.170.088	825	Rp281.662.000	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dilaksanakan berdasarkan Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kab/Kota	

*Keterangan: Kolom Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD berisi Kode yang mengacu pada Subbab 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
1.03.1.04.2 .10.1..0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2.10.10			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas lahan bersertifikat							
2.10.10.2.0 1				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.10.2.0 1.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Rp369.096.842	12	Rp238.745.397	Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditentukan	Melakukan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2024 sesuai dengan target yang ditentukan	
2.07.0.00.0 .00.1..0000		DINAS TENAGA KERJA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2.07.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.07.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.07.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Rp37.984.500	8	Rp37.428.500	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	-	
2.07.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.07.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp3.296.289.159	25	Rp2.548.274.463	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.07.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Rp136.320.000	2	Rp136.320.000	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	-	
2.07.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.07.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Rp7.555.500	4	Rp7.555.500	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	-	
2.07.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Rp264.320.100	3	Rp236.203.400	Semua kegiatan pada tahun 2023 telah terlaksana	evaluasi perencanaan dan efisiensi anggaran untuk tahun 2024	
2.07.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp25.708.800	1	Rp25.195.000	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	-	
2.07.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Rp3.000.000	2	Rp2.015.000	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	-	
2.07.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Rp206.158.000	20	Rp119.584.085	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	Evaluasi perencanaan dan efisiensi anggaran untuk Tahun 2024	
2.07.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.07.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Rp14.513.600	2	Rp14.512.000	Telah terlaksana semua kegiatan dalam Tahun 2023 dengan baik	-	
2.07.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.07.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Rp4.275.000	1	Rp3.850.000	Telah terlaksana semua kegiatan dengan baik	-	
2.07.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp80.770.800	12	Rp61.270.589	Semua kegiatan pada tahun 2023 telah terlaksana dengan baik	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.07.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp359.573.356	12	Rp348.923.768	Telah terlaksana semua kegiatan dalam tahun 2023	Evaluasi perencanaan anggaran untuk Tahun 2024	
2.07.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.07.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp42.043.500	1	Rp36.105.700	Telah terlaksana semua kegiatan dalam tahun 2023	-	
2.07.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	Rp84.891.500	17	Rp63.537.245	Telah terlaksana semua kegiatan dalam tahun 2023	Evaluasi kembali rencana anggaran tahun 2024	
2.07.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Rp30.000.000	27	Rp28.732.800	Telah terlaksana semua kegiatan dalam tahun 2023 dengan baik	-	
2.07.03			MENINGKATKAN ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi								
2.07.03.2.0 1				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
2.07.03.2.0 1.01				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	170	Rp7.290.242.400	170	Rp6.477.257.300	Telah terlaksana semua kegiatan dalam tahun 2023	Evaluasi perencanaan anggaran untuk tahun 2024	
2.07.03.2.0 2				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
2.07.03.2.0 2.01				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	21	Rp21.748.900	21	Rp16.060.700	Telah terlaksana semua kegiatan di Tahun 2023	Evaluasi rencana anggaran untuk Tahun 2024	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.07.04			MENINGKATNYA ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja yang ditempatkan							
2.07.04.2.01				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.04.2.01.05				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	60	Rp94.294.000	50	Rp84.827.100	Telah terlaksana semua kegiatan tahun 2023	Evaluasi rencana penganggaran Tahun 2024	G.1
2.07.04.2.04				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.04.2.04.01				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2000	Rp186.337.000	2000	Rp180.598.739	Telah terlaksana semua kegiatan Tahun 2023	-	G.5,G.6, G.7
2.07.04.2.03				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
2.07.04.2.03.03				Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	200	Rp1.163.780.000	200	Rp1.149.282.500	Telah terlaksana semua kegiatan tahun 2023	-	G.1, G.2, G.3
2.07.05			MENINGKATNYA ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Kasus HI							
2.07.05.2.01				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.05.2.01.03				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	50	Rp1.500.000.000	50	Rp1.407.664.459	Telah terlaksana semua kegiatan di Tahun 2023 dengan baik	-	
2.07.05.2.02				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.07.05.2.0 2.03				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25	Rp143.356.400	10	Rp133.756.400	Telah terlaksana semua kegiatan di Tahun 2023 dengan baik	-	E.2
2.07.05.2.0 2.04				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	5	Rp277.706.600	5	Rp221.630.000	Telah terlaksana semua kegiatan di Tahun 2023	Evaluasi rencana penganggaran untuk Tahun 2024	
2.07.05.2.0 2.02				Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30	Rp37.670.000	30	Rp18.531.000	Telah terlaksana semua kegiatan Tahun 2023	Evaluasi penganggaran untuk Tahun 2024	G.2, G.3, G.4
2.08.2.14.0 .00.1..0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.08.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.08.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	12	Rp4.966.910.697	12	Rp4.398.742.953	-	-	
2.08.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pembayaran gaji, honor dan lembur 100%	12	Rp621.743.500	12	Rp621.593.200	-	-	
2.08.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.08.01.2.0 5.04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase kapasitas kinerja aparatur 100%	12	Rp428.329.000	8	Rp406.500.000	-	-	
2.08.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.08.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan kerja kantor OPD dan UPTD Kecamatan	1	Rp143.349.000	1	Rp123.048.800	-	-	
2.08.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	Rp81.044.700	1	Rp56.563.200	-	-	
2.08.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Biaya perjalanan dinas 100%	12	Rp309.768.000	12	Rp269.681.579	-	-	
2.08.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.08.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran telepon, listrik, internet dan air 100%	12	Rp103.218.059	12	Rp65.628.487	-	-	
2.08.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.08.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	12	Rp84.593.400	12	Rp59.609.663	-	-	
2.08.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	12	Rp282.246.300	12	Rp227.517.799	-	-	
2.08.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan gedung kantor 100%	1	Rp258.217.250	1	Rp219.395.900	-	-	
2.08.02			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.08.02.2.0 1				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.0 1.03				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tercapainya kebijakan PUG dan PPRG di OPD	1	Rp101.621.200	1	Rp80.749.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	E.2, H.1
2.08.02.2.0 2				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.0 2.01				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	bimbingan teknis sekolah perempuan dan operasional kegiatan dharma wanita	12	Rp252.236.700	9	Rp248.471.870	-	-	E.2, H.4
2.08.03			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu							
2.08.03.2.0 2				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.0 2.01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12	Rp67.700.000	6	Rp55.811.000	-	-	E.2, H.2
2.08.03.2.0 2.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase layanan pecegahan kekerasan terhadap perempuan terpenuhi	100	Rp113.667.900	100	Rp103.809.424	-	-	E.2, H.2
2.08.03.2.0 1				PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.08.03.2.0 1.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	1	Rp54.740.000	1	Rp50.955.000	-	-	E.2, H.2
2.08.07			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu							
2.08.07.2.0 2				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.0 2.04				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak sebesar tingkat ke 5	12	Rp375.000.200	6	Rp366.152.200	-	-	E.2, H.3
2.08.07.2.0 2.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase pendampingan anak korban kekerasan terpenuhi	100	Rp140.835.300	100	Rp109.913.800	-	-	E.2, H.4
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2.14.02			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.14.02.2.0 2				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
2.14.02.2.0 2.02				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	31	Rp260.400.000	31	Rp243.700.000	-	-	
2.14.02.2.0 2.13				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya jasa internet di balai kb	39	Rp192.000.000	20	Rp171.478.350	-	-	
2.14.03			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT.	PROGRAM PEMBINAAN Total Fertility Rate (TFR) KELUARGA BERENCANA (KB)								
2.14.03.2.0 2				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.0 2.01				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kegiatan untuk PPKBD/Sub PPKBD se kabupaten Jember	1	Rp180.000.000	1	Rp179.600.000	-	-	
2.14.03.2.0 2.04				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	0	Rp492.000.000	0	Rp491.800.000	-	-	
2.14.03.2.0 3				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
2.14.03.2.0 3.08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	persentase pemakaian kontrasepsi MKJP di Kabupaten Jember meningkat	2	Rp46.179.000	2	Rp39.159.000	-	-	
2.14.03.2.0 3.03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	1000	Rp3.320.474.723	600	Rp3.085.815.000	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.14.03.2.0 3.01				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Seluruh faskes terlayani alkon	31	Rp90.000.000	31	Rp50.151.500	-	-	
2.14.03.2.0 4				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2.14.03.2.0 4.03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pembinaan pada petugas KB dan Kader KB di Kampung KB	31	Rp806.000.160	20	Rp798.500.900	-	-	
2.14.03.2.0 1				PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL								
2.14.03.2.0 1.04				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tercapainya promosi dan KIE program KKBPK	3	Rp150.000.000	3	Rp147.567.750	-	-	
2.14.03.2.0 1.01				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2	Rp119.580.000	1	Rp102.095.700	-	-	
2.14.03.2.0 1.06				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya minilokarya di tingkat kecamatan	31	Rp403.050.700	31	Rp396.989.000	-	-	
2.14.03.2.0 1.07				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tercapainya pengelolaan balai penyuluhan KKBPK	30	Rp849.598.058	30	Rp603.453.772	-	-	
2.14.03.2.0 1.08				Pengendalian Program KKBPK	0	3	Rp79.995.600	3	Rp65.679.500	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.14.04			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa							
2.14.04.2.01				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
2.14.04.2.01.05				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Biaya pulsa untuk 5.265 kader	5265	Rp12.105.273.000	5265	Rp11.720.371.875	-	-	H.2
2.09.3.27.0.00.1..0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2.09.02			TERCUKUPINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio produksi padi/jagung/kedelai dibanding kebutuhan pangan							
2.09.02.2.01				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.09.03			TERCUKUPINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah olahan pangan baru							
2.09.03.2.01				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
2.09.03.2.01.03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Rp121.009.200	1	Rp116.661.500	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.09.03.2.04				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								
2.09.03.2.04.02				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok penerima bantuan P2L	2	Rp386.354.300	2	Rp385.633.527	-		
2.09.04			TERCUKUPINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Desa/kelurahan rawan pangan							
2.09.04.2.01				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
2.09.04.2.01.01				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Rp23.750.000	1	Rp11.399.500	-		
2.09.04.2.02				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.09.04.2.02.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1	Rp16.852.400	1	Rp13.962.637	-		
2.09.05			TERCUKUPINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan yang teruji							
2.09.05.2.01				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								
2.09.05.2.01.03				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	10	Rp8.923.400	10	Rp6.683.500	-		
2.11.0.00.0.00.1..0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.11.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.11.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.11.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	243	Rp19.698.219.714	243	Rp18.723.996.574	Terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Telah Dilaksanakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.11.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260	Rp182.100.000	191	Rp172.230.000	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Telah Dilaksanakannya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
2.11.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.11.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Rp3.474.500	5	Rp3.441.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.11.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Rp44.528.000	24	Rp37.983.000	Terlaksananya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Telah Dilaksanakannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2.11.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372	Rp71.552.000	222	Rp64.205.359	Terpenuhinya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telah Dilaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.11.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp334.301.100	3	Rp312.620.000	Terpenuhinya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Telah Dilaksanakannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.11.01.2.0 6.05				penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	24	Rp5.207.800	10	Rp5.204.800	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.11.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.11.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp1.350.000	2	Rp1.100.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.11.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp101.998.202	12	Rp69.835.493	Dilaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telah dilaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.11.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp781.237.800	12	Rp771.852.600	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Telah Dilaksanakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.11.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.11.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Rp104.941.200	12	Rp86.133.250	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Telah Dilaksanakannya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.11.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	Rp141.619.033	1	Rp74.072.580	Telah Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	
2.11.02			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat							
2.11.02.2.0 1				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								
2.11.02.2.0 1.01				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Rp178.784.400	1	Rp107.508.300	Terpenuhinya Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Terlaksananya Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	
2.11.02.2.0 2				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								
2.11.02.2.0 2.02				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	1	Rp759.253.300	1	Rp480.475.225	Terpebuhinya Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	Terlaksananya Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.11.03			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara/Tutupan Lahan							
2.11.03.2.0				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2.11.03.2.0 1.01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Rp131.373.500	1	Rp106.634.700	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Telah Dilaksanakannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
2.11.03.2.0 1.02				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim	1	Rp364.908.000	1	Rp359.633.768	Terlaksananya Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim	Telah Dilaksanakannya Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim	
2.11.03.2.0 1.03				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	140	Rp502.092.000	50	Rp495.753.681	Terpenuhinya Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Telah Dilaksanakannya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2.11.03.2.0 1.03				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	140	Rp502.092.000	100	Rp495.753.681	Terpenuhinya Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Telah Dilaksanakannya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2.11.03.2.0 3				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.11.03.2.0 3.04				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah bibit tanaman yang di tanam di sumber mata air	1	Rp230.878.300	1	Rp220.234.300	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Telah Dilaksanakannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	
2.11.05			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
Pengendalian Limbah B3												
2.11.05.2.0 1				Penyimpanan Sementara Limbah B3								
2.11.05.2.0 1.02				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah b3	45	Rp39.377.000	12	Rp21.264.400	Terpenuhinya Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah b3	Telah Dilaksanakannya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	
2.11.06			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
Binwas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten												
2.11.06.2.0 1				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.11.06.2.0 1.01				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	22	Rp147.512.400	19	Rp121.044.701	Terpenuhinya Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	Telah Dilaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.11.09			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan bidang lingkungan hidup yang diraih							
2.11.09.2.01				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.11.09.2.01.01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah buku IKPLHD Jumlah sekolah Adiwiyata	35	Rp246.141.100	35	Rp147.004.600	Terpenuhinya Jumlah buku IKPLHD Jumlah sekolah Adiwiyata	Telah Dilaksanakan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2.11.10			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani							
2.11.10.2.01				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
2.11.10.2.01.01				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang yang di tindak lanjuti	12	Rp27.463.000	11	Rp17.151.000	Terpenuhinya Jumlah Kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang yang di tindak lanjuti	Telah Dilaksanakannya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	
2.11.11			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sampah yang tertangani							
2.11.11.2.01				Pengelolaan Sampah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.11.11.2.0 1.03				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	315	Rp2.819.011.300	192	Rp2.754.190.000	Terpenuhinya Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Telah Dilaksanakannya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
2.11.11.2.0 1.04				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan bank sampah	70	Rp140.888.000	70	Rp140.162.000	Terpenuhinya Jumlah orang yang mengikuti pelatihan bank sampah	Telah Dilaksanakan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
2.11.11.2.0 1.07				Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Persampahan di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	34	Rp10.428.781.348	31	Rp10.174.593.100	Terpenuhinya Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Telah Dilaksanakannya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/Kota	
2.12.0.00.0 .00.1..0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.12.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.12.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp2.000.000	1	Rp1.202.515	Dengan keterbatasan waktu yang ada sehingga kegiatan masih rendah	Kegiatan akan dioptimalkan pada tahun berikutnya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.12.01.2.0 1.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Rp12.100.000	16	Rp12.100.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.12.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp3.329.788.199	21	Rp2.756.870.661	Karena Adanya pejabat 2 (dua) Struktural dan 2(dua) fungsional yang masih belum terisi atau kosong sehingga serapan kegiatan masih rendah	Upaya untuk mengatasi masalah kegiatan ini kekurangan pejabat harus terisi dan akan dioptimalkan pada tahun berikutnya	
2.12.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp200.840.000	12	Rp180.190.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.12.01.2.0 5.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74	Rp130.000.000	74	Rp128.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.12.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Rp2.237.158.000	20	Rp1.886.517.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	1.3
2.12.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Rp100.184.000	3	Rp99.913.015	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp36.507.700	2	Rp30.441.250	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	Rp10.500.000	2	Rp10.500.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp363.217.200	2	Rp362.109.142	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.12.01.2.0 6.07				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Rp231.149.200	3	Rp209.048.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Rp5.011.200	3	Rp4.785.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.12.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Rp49.822.500	4	Rp32.071.586	Efisiensi anggaran pada kegiatan terkait Blanko KTP elektronik, sehingga tetap memenuhi target kinerja sesuai dengan kebutuhan	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
2.12.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Rp343.737.628	6	Rp314.541.460	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Rp2.085.680.000	13	Rp2.058.215.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.12.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp53.500.000	1	Rp50.869.875	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Rp308.450.000	19	Rp243.491.299	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 9.08				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3	Rp300.960.000	3	Rp300.090.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.12.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Rp82.000.000	25	Rp71.918.750	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.01.2.0 7				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
2.12.01.2.0 7.09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Rp301.000.000	2	Rp212.413.700	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.02			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk							
2.12.02.2.0 1				Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
2.12.02.2.0 1.05				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Pelaporan Kependudukan (KK)	4	Rp9.600.000	4	Rp9.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	E.2
2.12.02.2.0 2				Penataan Pendaftaran Penduduk								
2.12.03			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan akta kelahiran							
2.12.03.2.0 1				Pelayanan Pencatatan Sipil								
2.12.03.2.0 1.01				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan)	4	Rp28.828.000	4	Rp28.390.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	E.2
2.12.03.2.0 2				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
2.12.03.2.0 2.06				Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3	Rp39.097.500	3	Rp38.550.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.04			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.12.04.2.03				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2.12.04.2.03.03				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan	12	Rp37.777.200	12	Rp33.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.04.2.03.05				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang terlaksana	2	Rp53.973.200	2	Rp48.616.700	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	I.1
2.12.05			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi							
2.12.05.2.01				Penyusunan Profil Kependudukan								
2.12.05.2.01.01				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Data kependudukan Kabupaten/Kota	2	Rp45.000.000	2	Rp41.250.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	
2.12.05.2.01.02				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	Rp136.516.000	1	Rp129.776.700	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai perencanaan	I.2
2.13.0.00.0.00.1..0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.13.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.13.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.13.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27	Rp3.867.104.832	27	Rp3.462.751.666	Target kegiatan dalam bentuk jumlah aparatur asn yang dikelola gaji dan tunjangannya	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.13.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2	Rp320.710.000	2	Rp320.410.000	Target kegiatan dalam bentuk dokumen	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.13.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Rp5.859.600	1	Rp5.794.100	Target kegiatan dalam bentuk paket	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Rp45.905.450	1	Rp41.954.996	Sub Kegiatan dianggarkan pada PAPBD T.A 2023 sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan November	Proses pengadaan barang/belanja modal telah selesai dilaksanakan, dan realisasi kinerja 1 paket pengadaan telah dipenuhi	
2.13.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Rp4.924.700	1	Rp4.789.700	Target kegiatan dalam bentuk paket	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	Rp2.223.000	1	Rp2.223.000	Target kinerja dalam bentuk paket pengadaan barang cetak dan penggandaan	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	Rp172.604.600	4	Rp172.325.504	Target kegiatan dalam bentuk laporan	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.13.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Rp119.293.500	1	Rp113.609.471	Target kegiatan dalam bentuk laporan	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Rp834.470.200	1	Rp830.797.703	Target kegiatan dalam bentuk laporan	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.13.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp58.535.000	1	Rp49.552.778	Target kegiatan dalam bentuk unit kendaraan	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	21	Rp90.887.450	21	Rp80.545.295	Target kegiatan dalam bentuk unit kendaraan	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, realisasi kinerja mengikuti bulan dilaksanakannya pemeliharaan kendaraan operasional	
2.13.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	77	Rp30.000.000	77	Rp29.770.000	target kegiatan dalam bentuk unit peralatan kantor yang dipelihara/diperbaiki	Realisasi anggaran sesuai kebutuhan	
2.13.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Rp48.724.350	1	Rp47.757.121	Sub Kegiatan dianggarkan pada PAPBD T.A 2023 sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan November	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	
2.13.04			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa							
2.13.04.2.0 1				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
2.13.04.2.0 1.04				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	3	Rp54.636.300	3	Rp54.473.000	Sosialisasi perbup DD ADD BGH melalui kegiatan yang mengundang desa dan dipusatkan di tiap-tiap kecamatan	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, Koordinasi baik secara langsung maupun via telfon ke Biro hukum dan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.13.04.2.0 1.05				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	226	Rp2.820.000.000	226	Rp2.790.824.360	Karena keterbatasan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa tidak dapat dilaksanakan, tetapi anggaran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Aparatur desa yang teranggarkan di sub kegiatan ini tetap dilaksanakan	Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dan mengundang DPMD Kabupaten Jember sebagai Narasumber Pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Kesehatan untuk Kades dan Perangkat desa direalisasikan sesuai kebutuhan	
2.13.04.2.0 1.07				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	28	Rp14.405.000	28	Rp9.445.000	28 Kecamatan telah melaksanakan proses verifikasi dokumen pengajuan penyaluran BK Desa (DD, ADD, BGH)	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, capaian kegiatan mengikuti bulan dilaksanakannya kegiatan	J.1
2.13.04.2.0 1.08				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	45	Rp475.446.000	45	Rp434.315.000	Kegiatan Rapat Koordinasi BUMDesa se Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 8-9 Desember 2023 di desa Rowosari, kecamatan Sumberjambe dengan materi pendaftaran badan hukum, kerjasama dengan BPJSTK, peluang usaha BUMDesa, dan penetapan potensi BUMDesa	Kegiatan Fasilitasi BUMDesma dan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan, dan target kegiatan	J.1
2.13.04.2.0 1.09				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1	Rp651.408.600	1	Rp628.278.000	Kegiatan Pilkades di Kabupaten Jember, baik serentak maupun PAW, telah dilaksanakan	Laporan Kegiatan Pilkades serentak dan PAW Kabupaten Jember Tahun 2023 telah disusun, dan dilaporkan kepada Bupati jember, serta diteruskan ke DPMD Provinsi Jawa Timur	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.13.04.2.0 1.01				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	20	Rp1.683.250.000	20	Rp1.576.467.500	1. Proses permasalahan di desa berdasarkan pengajuan dari desa maupun sebagai tindaklanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan 2. Anggaran BKK Provinsi yang berupa honor untuk kepala desa dan perangkat desa telah selesai proses administrasi dan telah disalurkan kepada Kades dan Perangkat Desa sesuai data	1. Fasilitasi permasalahan sesuai dengan tusi DPMD 2. Koordinasi dengan desa sebagai penerima terkait konfirmasi penyaluran Anggaran BKK Provinsi yang berupa honor untuk kepala desa dan perangkat desa	J.2, J.3
2.13.04.2.0 1.18				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	248	Rp133.000.000	248	Rp124.540.600	Untuk total 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Jember telah melaksanakan input pada aplikasi epdeskel	Pendampingan dalam tindaklanjut desa atas hasil evaluasi input data yang telah dilakukan, dan akan dilaksanakan pada tahun 2024	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.13.04.2.0 1.15				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	226	Rp91.940.000	226	Rp81.402.500	- Desa yang telah terverifikasi oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) sebanyak 77 Desa dan telah mendapatkan Berita Acara dari BIG sebanyak 30 Desa sedangkan 47 Desa masih dalam proses revisi. Proses lebih lanjut untuk desa lain di Kabupaten Jember akan dilaksanakan pada tahun 2024 - Dinas PMD tidak memiliki sarana IT yang sesuai spesifikasi teknis untuk verifikasi hasil pemetaan oleh desa	- Fasilitasi dan sosialisasi telah dilaksanakan untuk 226 desa di Kabupaten Jember dengan metode partisipatif yang merupakan inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, selama tahun 2023 telah terlaksana sejumlah desa yang telah menindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan penegasan Batas Desa sebanyak 210 Desa. Proses lebih lanjut untuk desa lain di Kabupaten Jember akan dilaksanakan pada tahun 2024 - Menganggarkan pengadaan laptop dengan mempertimbangkan spesifikasi yang dibutuhkan dan kemampuan anggaran	J.2
2.13.05			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa maju dan mandiri/PKK Aktif							
2.13.05.2.0 1				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarak								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.13.05.2.0 1.02				Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Rp2.528.784.000	1	Rp2.502.850.860	Target kegiatan dalam bentuk laporan	Realisasi anggaran berupa pembayaran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT/RW se-Kabupaten Jember sudah sesuai kebutuhan	
2.13.05.2.0 1.04				Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10	Rp109.496.000	10	Rp78.715.500	Proses pelaksanaan penyaluran BKK Provinsi Jawa Timur (Jatim Puspa, Desa Berdaya, BUMDesa) telah dilaksanakan pada semua lokasi sasaran (12 desa)	Pendampingan proses pelaporan pertanggungjawaban penyaluran BKK	
2.13.05.2.0 1.05				Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5	Rp100.040.000	5	Rp14.960.500	Karena keterbatasan anggaran, pelatihan usaha ekonomi hanya dilaksanakan di 3 titik/desa	Kegiatan pelatihan usaha ekonomi telah dilaksanakan dan indikator sub kegiatan menyesuaikan titik/desa dilaksanakannya pelatihan mempertimbangkan ketersediaan anggaran	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.13.05.2.0 1.06				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Rp60.615.500	2	Rp49.804.000	Telah dilaksanakan pelatihan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan materi terkait digital marketing melalui media sosial dan terkait pengolahan kopi dengan mengundang narasumber sesuai bidangnya.	Realisasi kegiatan dan anggaran mengikuti kebutuhan	
2.13.05.2.0 1.09				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	31	Rp1.205.381.000	31	Rp1.109.109.850	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal pelaksanaan dari masing-masing pokja, sedangkan untuk kegiatan di tingkat kabupaten telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi TP PKK Kabupaten	Realisasi kegiatan dan anggaran mengikuti kebutuhan Indikator kegiatan terpenuhi dengan laporan akhir tahun kegiatan TP PKK	
2.13.05.2.0 1.07				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	3	Rp396.276.500	3	Rp357.212.200	target kegiatan dalam bentuk 3 laporan	Rangkaian kegiatan dalam sub kegiatan terlaksana dengan kegiatan TMMD ke 117 Kodim 0824 T.A 2023 di Kabupaten Jember di desa klungkung kecamatan sukorambi, kegiatan lomba BBGRM Tingkat Kabupaten Jember, dan peningkatan kapasitas KPM (Kader Pembangunan Manusia) tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran	J.4
2.15.0.00.0 .00.1..0000		DINAS PERHUBUNGAN										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.15.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.15.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.15.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	4	Rp103.183.400	4	Rp98.381.400	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	Rp40.905.000	3	Rp29.446.000	Penyusunan laporan evaluasi disertai dengan data dukung yang hasilnya sudah melalui verifikasi dan valid	Mengkoordinasikan dengan bidang dan UPT dalam upaya pencukupan data dukung	
2.15.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.15.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	75	Rp8.740.187.326	66	Rp7.800.321.989	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Rp5.935.485.714	12	Rp5.882.675.708	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan atau trisemesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan atau triwulanan /trisemesteran SKPD	12	Rp46.499.600	12	Rp46.197.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan sesuai kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.15.01.2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
2.15.01.2.04.07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	4	Rp1.960.627.770	4	Rp1.940.640.300	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.15.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	450	Rp39.600.000	450	Rp39.600.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.15.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Rp13.906.400	1	Rp13.695.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Rp92.876.200	9	Rp87.389.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Rp13.966.200	2	Rp9.745.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	Rp853.795.000	10	Rp766.777.500	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.15.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	Rp290.812.000	50	Rp290.693.101	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.15.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	Rp771.199.150	12	Rp593.663.905	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	Rp604.674.850	3	Rp546.690.294	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.15.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	70	Rp393.183.200	67	Rp358.932.500	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	Rp58.000.000	19	Rp57.254.000	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02			TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas jalan							
2.15.02.2.0 2				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.15.02.2.0 2.01				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan di kabupaten/kota yang terbangun	4	Rp197.000.000	4	Rp194.000.000	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 2.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	100	Rp3.252.588.000	100	Rp3.231.396.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 2.03				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4	Rp1.922.016.540	4	Rp1.908.654.530	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 2.04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	50	Rp659.683.000	50	Rp649.876.000	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 3				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
2.15.02.2.0 3.03				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah PAD dari retribusi terminal	43887960	Rp18.095.000	43887960	Rp17.974.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Sesuai kebutuhan pada akan memproyeksikan tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 4				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
2.15.02.2.0 4.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PAD dari retribusi parkir berlangganan	1237258260 0	Rp4.935.434.100	1237258260 0	Rp4.807.608.500	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 5				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.15.02.2.0 5.01				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah PAD dari retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala	1516017600	Rp132.608.100	1326515400	Rp122.065.569	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 5.07				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pendapatan asli daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor	6	Rp107.500.000	6	Rp105.750.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 6				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.0 6.04				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	48	Rp471.090.000	46	Rp471.062.370	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	K.4
2.15.02.2.0 6.05				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	12	Rp11.000.000	12	Rp10.995.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02.2.0 9				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.0 9.01				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang tersedia	261	Rp170.160.000	261	Rp167.460.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	K.3
2.15.02.2.1 4				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.15.02.2.1 4.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	2	Rp401.220.000	2	Rp386.475.624	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.04			TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Sarana dan prasarana bandara untuk meningkatkan frekuensi penerbangan							
2.15.04.2.0 1				Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter								
2.15.04.2.0 1.01				Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah penumpang berangkat dan turun di bandara	108	Rp343.920.400	108	Rp327.971.800	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	K.1, K.2, K.5
2.15.05			TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang							
2.15.05.2.0 2				Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.05.2.0 2.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang	2	Rp647.392.800	2	Rp634.987.600	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.15.03			TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dokumen database akses transportasi							
2.15.03.2.1 2				PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL								
2.15.03.2.1 2.01				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Data Base Obyek Wisata Perairan baik Sungai, Danau/ Embung dan Laut yang terakses transportasi	1	Rp7.680.000	1	Rp7.660.000	Kembali target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.16.2.20.2 .21.1..0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.16.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.16.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	Rp3.552.063.214	22	Rp3.297.482.831	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Realisasi anggaran sesuai dengan jumlah pegawai di Diskominfo	
2.16.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp284.800.000	12	Rp284.800.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Realisasi anggaran sesuai dengan jumlah yang ada di SK	
2.16.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.16.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp1.110.000	1	Rp1.054.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.16.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	3	Rp108.211.000	3	Rp68.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Rp116.892.500	9	Rp107.796.750	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp13.171.500	1	Rp12.827.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Rp1.025.000	2	Rp620.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp1.500.000	10	Rp391.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp135.685.094	12	Rp132.289.065	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp1.730.469.000	12	Rp1.652.952.252	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp57.110.000	1	Rp55.965.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Rp66.300.000	6	Rp62.301.792	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.16.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp16.801.500	1	Rp16.751.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	Rp32.152.400	20	Rp25.283.250	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.01.2.0 5				Administrasi kepegawaian perangkat daerah								
2.16.01.2.0 5.02				pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Rp50.000.000	1	Rp49.950.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.02			MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan							
2.16.02.2.0 1				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.02.2.0 1.02				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	Rp9.416.600	6	Rp8.432.950	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan monev PPID	
2.16.02.2.0 1.03				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Rp492.284.600	12	Rp462.163.110	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat setiap bulan	
2.16.02.2.0 1.04				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	45	Rp125.938.000	8	Rp86.188.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan	L.4, L.6
2.16.02.2.0 1.05				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1460	Rp48.320.000	708	Rp44.909.480	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan	L.4, L.6
2.16.02.2.0 1.06				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	8	Rp266.561.200	8	Rp225.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Laporan disusun pada akhir triwulan	L.2, L.4, L.6
2.16.02.2.0 1.07				Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	88	Rp5.674.085.000	88	Rp5.460.902.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	E.2, L.5

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.16.02.2.0 1.12				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	8	Rp292.737.600	8	Rp245.995.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	L.3
2.16.02.2.0 1.13				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31	Rp96.815.000	8	Rp96.500.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Pengadaan telah dilaksanakan pada bulan Mei	
2.16.03			MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Cakupan layanan telekomunikasi								
2.16.03.2.0 1				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.0 1.03				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3	Rp2.340.086.800	3	Rp2.305.330.578	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sistem jaringan telah terpasang pada 22 titik	
2.16.03.2.0 1.02				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15	Rp20.540.000	13	Rp10.228.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Realisasi kinerja berdasarkan pengajuan sub domain dari perangkat daerah	
2.16.03.2.0 2				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.0 2.03				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Rp659.698.900	1	Rp627.229.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.03.2.0 2.07				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4	Rp950.000.000	4	Rp948.494.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Pembuatan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan permintaan perangkat daerah	L.1

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.16.03.2.0 2.09				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	10	Rp6.052.525.675	10	Rp5.728.866.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.16.03.2.0 2.04				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	Rp938.000	0	Rp0	-	-	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2.20.02			MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku "kabupaten dalam angka"							
2.20.02.2.0 1				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
2.20.02.2.0 1.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Rp105.550.000	1	Rp83.030.530	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.20.02.2.0 1.02				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek statistik	400	Rp119.220.000	400	Rp115.475.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.20.02.2.0 1.03				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	Rp46.520.000	1	Rp42.390.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2.21.02			MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.21.02.2.0 1				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.21.02.2.0 1.02				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat-alat untuk pengolahan data/persandian	6	Rp2.144.000	4	Rp2.100.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.21.02.2.0 1.01				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	Rp4.020.000	3	Rp3.830.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.21.02.2.0 1.04				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10	Rp146.192.000	10	Rp134.557.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Telah terlaksana layanan TTE kepada seluruh perangkat daerah, camat dan kepala desa	
2.17.0.00.0 .00.1..0000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.17.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.17.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.17.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Rp2.690.000	2	Rp2.670.500	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	
2.17.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Rp4.010.000	1	Rp3.944.000	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.17.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	Rp2.504.400	1	Rp2.493.500	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD y dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	Rp6.112.000	1	Rp5.878.500	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	
2.17.01.2.0 1.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	Rp6.176.000	1	Rp6.063.900	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	
2.17.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Rp2.307.400	1	Rp2.286.000	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 1.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	Rp1.402.000	1	Rp1.376.250	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.17.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	294	Rp3.448.682.905	224	Rp3.104.366.421	Sudah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	Sudah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	
2.17.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	Rp167.500.000	2	Rp162.739.600	Sudah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	Sudah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	
2.17.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.17.01.2.0 5.01				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	5	Rp87.865.000	3	Rp87.691.750	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.17.01.2.0 5.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implemntasi peraturan perundang-undangan	21	Rp3.300.000	21	Rp3.165.000	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	
2.17.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.17.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Rp6.579.300	1	Rp6.561.000	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Rp15.664.100	3	Rp15.609.300	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Rp43.953.700	2	Rp43.013.200	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paker barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Rp12.842.500	2	Rp12.833.000	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Rp4.500.000	1	Rp4.470.000	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300	Rp165.328.000	167	Rp164.989.391	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.17.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Rp3.585.000	1	Rp2.366.000	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Rp207.342.000	2	Rp203.754.446	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2	Rp544.074.732	1	Rp517.882.871	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.17.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.17.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	Rp115.500.000	14	Rp111.598.750	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan bayarkan pajak dan perizinanya	228	Rp13.000.000	57	Rp12.247.000	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21	Rp30.000.000	6	Rp29.822.000	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	
2.17.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Rp41.205.327	1	Rp41.201.578	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan	
2.17.04			---	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI --								
2.17.04.2.0 1				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.05			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Cakupan diklat untuk koperasi								
2.17.05.2.0 1				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.05.2.0 1.01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta Bimtek Pemasaran Hasil Usaha,Bimtek Akuntansi Dasar serta Bimtek Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	300	Rp824.123.500	60	Rp792.675.201	Realisasi sesuai kebutuhan	Teralisasi sesuai dengan kebutuhan	M.1
2.17.05.2.0 2				PENDIDIKAN DAN LATIHAN UKM BAGI UKM DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.17.06			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mendapatkan perlindungan							
2.17.06.2.01				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.06.2.01.01				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	JUmlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	800	Rp2.627.773.500	388	Rp1.273.571.200	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	M.1
2.17.07			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMK aktif							
2.17.07.2.01				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
2.17.07.2.01.04				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	100	Rp431.419.750	99	Rp431.210.700	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	Terealisasi Sesuai Kebutuhan	M.3
2.17.08			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan UMK							
2.17.08.2.01				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								
2.17.08.2.01.01				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang tefasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran,SDM serta desain dan teknologi	150	Rp742.624.400	20	Rp657.386.800	Sudah terealisasi	Teralisasi sesuai kebutuhan	M.1, M.2, M.5

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.17.03			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan koperasi							
2.17.03.2.01				PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
2.17.03.2.01.01				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan kesehatan kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	300	Rp60.000.000	300	Rp59.607.000	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi	
2.18.2.10.0.00.1..0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2.10.02			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah Izin							
2.10.02.2.01				Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.18.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.18.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	210	Rp2.500.864.157	209	Rp1.784.204.394	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	Rp724.140.000	120	Rp626.573.600	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.18.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp17.753.000	0	Rp0	tidak ada penyerapan	Bersamaan dengan renovasi gedung DPMPSTSP yang dilaksanakan oleh cipta karya	
2.18.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp87.993.800	1	Rp83.446.850	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	Rp356.464.400	223	Rp305.455.544	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.0 6.07				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Rp131.647.484	1	Rp115.524.350	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.18.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	Rp7.969.000	154	Rp5.860.000	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp297.835.904	12	Rp191.314.230	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Rp783.624.900	48	Rp634.782.774	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.18.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp95.753.200	1	Rp65.776.620	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.18.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Rp121.349.000	7	Rp76.616.100	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.01.2.0 9.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp343.366.464	1	Rp268.679.278	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	-	
2.18.03			MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)								
2.18.03.2.0 1				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.03.2.0 1.02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Rp33.526.800	3	Rp20.495.311	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	Tidak ada permasalahan dan akan di tingkatkan lagi pada tahun selanjutnya	
2.18.03.2.0 1.01				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Rp170.837.576	1	Rp167.857.800	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	Tidak ada permasalahan dan akan di tingkatkan lagi pada tahun selanjutnya	
2.18.04			MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)								
2.18.04.2.0 1				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.18.04.2.0 1.01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6670	Rp832.228.000	2415	Rp812.605.000	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	Tidak ada permasalahan dan akan di tingkatkan lagi pada tahun selanjutnya	N.1
2.18.04.2.0 1.02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	8170	Rp430.871.500	314	Rp357.655.650	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	Tidak ada permasalahan dan akan di tingkatkan lagi pada tahun selanjutnya	
2.18.05			MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Peningkatan nilai realisasi PMDN								
2.18.05.2.0 1				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.05.2.0 1.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman	30	Rp10.732.000	0	Rp0	tidak ada penyerapan	Tidak ada penyerapan di tahun 2023. Akan di perbaiki dan di tingkatkan lagi pada tahun 2024	
2.18.05.2.0 1.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30	Rp312.668.000	30	Rp307.299.100	Tidak ada permasalahan yang di hadapi	Tidak ada permasalahan dan akan di tingkatkan lagi pada tahun selanjutnya	
2.19.0.00.0 .00.1..0000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.19.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.19.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.19.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp2.000.000	2	Rp2.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan perencanaan	
2.19.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.19.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	23	Rp3.519.644.855	23	Rp3.172.246.090	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	24	Rp575.903.940	22	Rp568.345.609	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.19.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	Rp62.500.000	6	Rp62.416.874	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Rp25.125.000	7	Rp25.110.977	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Rp38.794.040	6	Rp38.785.688	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 6.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp639.687.580	12	Rp637.694.501	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 6.07				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Rp67.839.283	12	Rp66.986.513	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.19.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	12	Rp2.705.225.053	12	Rp2.694.159.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan perencanaan	
2.19.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.19.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Rp3.150.000	4	Rp3.150.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp94.588.727	12	Rp81.900.378	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Rp185.509.800	10	Rp181.868.552	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	Rp949.993.000	13	Rp917.473.261	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.19.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	Rp139.854.835	8	Rp127.137.896	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	Rp1.262.970.555	5	Rp1.255.818.374	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.02			MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Organisasi kepemudaan aktif							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.19.02.2.01				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
2.19.02.2.01.09				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan pelatihan	75	Rp757.126.200	75	Rp732.252.410	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.02.2.01.08				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	500	Rp760.179.000	496	Rp757.398.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.03			MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pelatih olahraga yang bersertifikat							
2.19.03.2.02				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.19.03.2.02.01				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	5	Rp5.808.904.600	5	Rp5.681.417.036	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	0.5
2.19.03.2.02.03				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300	Rp344.260.000	297	Rp316.881.900	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	0.6
2.19.03.2.03				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
2.19.03.2.03.01				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	900	Rp549.771.271	889	Rp381.370.100	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.19.03.2.0 3.02				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	Rp718.002.293	1	Rp683.075.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	O.1
2.19.03.2.0 3.04				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan	300	Rp2.500.000.000	300	Rp2.493.005.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	O.3
2.19.03.2.0 5				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								
2.19.03.2.0 5.01				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	3	Rp924.539.700	3	Rp839.246.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.03.2.0 5.05				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	12	Rp120.480.000	12	Rp114.750.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.03.2.0 4				PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA								
2.19.03.2.0 4.01				Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2	Rp28.393.700	2	Rp7.500.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.19.03.2.0 4.02				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	2	Rp190.000.000	2	Rp184.844.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	O.2
2.19.04			MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Gugus kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.19.04.2.01				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								
2.19.04.2.01.05				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan	4	Rp93.859.600	4	Rp79.565.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.22.3.26.0.00.1..0000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.22.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.22.02			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Festival kebudayaan kesenian tradisional dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah							
2.22.02.2.02				pengolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota								
2.22.02.2.01.01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10	Rp1.839.035.000	10	Rp1.834.967.630	Kegiatan dilaksanakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	P.1, P.2, P.3,P.4,P.5
2.22.05			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola Pemda							
2.22.05.2.02				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
2.22.05.2.01				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	480	Rp471.534.000	480	Rp470.901.000	Kegiatan dilaksanakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
2.22.06			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Museum yang dikelola							
2.22.06.2.01				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.22.06.2.0 1.04				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	Rp87.568.000	1	Rp74.500.000	-	-	
2.23.2.24.0 .00.1..0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.23.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.23.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan Gaji dan tunjangan	25	Rp3.162.626.696	15	Rp2.297.683.345	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pendukung administrasi dan operasional yang tersedia	12	Rp146.640.000	11	Rp142.640.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.23.01.2.0 5.05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan movev dan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	12	Rp12.716.000	7	Rp12.247.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.23.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	1	Rp8.902.300	1	Rp8.157.300	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor yang disediakan	3	Rp251.365.300	3	Rp220.607.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	3	Rp36.656.800	3	Rp31.192.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang diikuti	80	Rp364.881.600	80	Rp357.189.298	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.23.01.2.0 6.07				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Rp98.167.900	1	Rp93.744.300	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 6.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp13.400.000	10	Rp9.789.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.23.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan pendukung administrasi surat menyurat yang dibutuhkan	12	Rp5.800.500	5	Rp1.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan listrik, air dan telpon	12	Rp178.911.046	12	Rp165.610.858	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum yang tersedia	12	Rp860.113.104	11	Rp841.705.429	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.23.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1	Rp58.500.000	1	Rp49.765.750	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	16	Rp220.910.000	16	Rp150.241.261	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dirawat atau dipelihara	100	Rp40.000.000	91	Rp38.829.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/ direhab	1	Rp144.492.900	1	Rp142.292.627	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.02			MENINGKATNYA TINGKAT LITERASI MASYARAKAT	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.23.02.2.01				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.01.09				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan koleksi perpustakaan daerah yang ditingkatkan	3888	Rp385.858.500	3888	Rp356.623.298	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	Q.2, Q.3
2.23.02.2.01.06				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	40	Rp70.887.800	40	Rp62.446.400	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.02.2.02				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.02.01				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan masyarakat pedesaan	10	Rp145.424.400	10	Rp113.734.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	Q.1
2.23.02.2.02.04				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan yang diselenggarakan	4	Rp69.254.700	4	Rp61.385.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.23.02.2.02.03				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	12	Rp59.765.600	12	Rp52.135.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2.24.02			MENINGKATNYA TINGKAT LITERASI MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku							
2.24.02.2.01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								
2.24.02.2.01.01				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah kegiatan layanan dan pengelolaan arsip dinamis	20000	Rp212.549.600	8873	Rp207.270.900	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.24.02.2.02				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.24.02.2.0 2.02				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan layanan dan pengelolaan arsip statis	2600	Rp156.982.000	2600	Rp143.662.128	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.24.02.2.0 3				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
2.24.02.2.0 3.02				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan yang dibutuhkan	1	Rp262.701.025	1	Rp253.502.980	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
2.24.02.2.0 3.01				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	50	Rp119.591.200	32	Rp115.975.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

*Keterangan: Kolom Tindaklanjut Rekomendasi DPRD berisi Kode yang mengacu pada Subbab 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
2.09.3.27.0.00.1..0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN										
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.27.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang di susun	1	Rp2.686.200	1	Rp2.667.000	-	-	
3.27.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1	Rp1.651.500	1	Rp1.274.000	-	-	
3.27.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	1	Rp1.704.500	1	Rp1.272.000	-	-	
3.27.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA yang disusun	1	Rp867.500	1	Rp790.000	-	-	
3.27.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.27.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	Rp6.412.530.801	14	Rp5.529.565.510	-	-	
3.27.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan OPD selama 10 Bulan	1	Rp168.589.000	1	Rp168.494.000	-	-	
3.27.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	1	Rp1.907.800	1	Rp1.808.250	-	-	
3.27.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.27.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan selama 1 tahun	1	Rp2.756.000	1	Rp2.516.000	-	-	
3.27.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 tahun	1	Rp99.058.700	1	Rp81.368.900	-	-	
3.27.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase ketersediaan bahan logistik kantor selama 1 tahun	1	Rp118.933.000	1	Rp118.876.500	-	-	
3.27.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Rp5.477.000	1	Rp5.067.600	-	-	
3.27.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp100.908.400	1	Rp100.794.760	-	-	
3.27.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.27.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa listrik, air dan komunikasi	1	Rp131.495.608	1	Rp123.875.340	-	-	
3.27.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan ketersediaan tenaga pendukung operasional kantor	1	Rp1.043.700.000	1	Rp1.037.200.000	-	-	
3.27.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.27.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dirawat	1	Rp33.447.800	1	Rp31.241.740	-	-	
3.27.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil operasional yang dirawat	2	Rp42.559.050	2	Rp37.737.415	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.27.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang di rawat selama 1 tahun	25	Rp20.000.000	25	Rp19.665.000	-	-	
3.27.01.2.0 9.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi "	5	Rp10.000.000	4	Rp4.431.000	-	-	
3.27.02			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Populasi ternak sapi potong/sapi perah/kambing/domba/ayam buras/ayam petelur/ayam pedaging/itik								
3.27.02.2.0 2				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								
3.27.02.2.0 2.02				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak yang di tingkatan kualitasnya di UPT Pembibitan Ternak	1	Rp485.710.000	1	Rp484.122.760	-	-	
3.27.02.2.0 5				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.02.2.0 5.01				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Bulan Pendampingan Kelompok peternak	60	Rp2.757.000.000	60	Rp2.743.590.000	-	-	
3.27.02.2.0 5.05				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bulan Validasi kelompok peternak	1	Rp370.582.700	1	Rp365.696.996	-	-	
3.27.04			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Angka Kematian Ternak								
3.27.04.2.0 1				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.04.2.0 1.01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang diperiksa dan diobati secara gratis	10	Rp174.796.600	10	Rp167.792.000	-	-	
3.27.04.2.0 3				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.27.04.2.0 3.01				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Sample yang diamati	8	Rp16.427.800	2	Rp12.133.800	-	-	
3.27.04.2.0 3.02				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kecamatan sasaran surveillance penyakit ternak	9	Rp1.102.801.400	9	Rp1.089.388.014	-	-	
3.27.04.2.0 4				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								
3.27.04.2.0 4.02				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dalam 1 tahun	8	Rp7.896.000	8	Rp6.132.000	-	-	
3.27.03			---	PROGRAM PENYEDIAAN -- DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
3.27.03.2.0 2				PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN								
3.27.03.2.0 2.07				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Bangunan RPH yang direhabilitasi	12	Rp105.217.400	12	Rp104.578.500	-	-	
3.27.03.2.0 2.09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah unit bangunan Puskesmas yang dibangun	10	Rp289.280.000	5	Rp288.496.400	-	-	
2.22.3.26.0 .00.1..0000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN										
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3.26.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.26.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.26.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448	Rp4.229.664.103	448	Rp3.581.714.001	Gaji dan TPP di belanjakan Sesuai dengan kebutuhan	Efisiensi Anggaran	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.26.01.2.06				administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.26.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp4.718.400	12	Rp4.534.800	-	-	
3.26.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp36.760.400	12	Rp36.629.400	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	
3.26.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Rp48.854.000	12	Rp48.821.700	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Rp13.316.400	12	Rp13.212.300	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Rp188.386.800	48	Rp110.808.593	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Rp9.955.600	12	Rp9.955.600	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.26.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp3.150.000	12	Rp2.400.000	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp378.479.200	12	Rp285.812.908	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp2.963.720.000	12	Rp2.953.717.000	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.26.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Rp24.500.000	10	Rp22.545.000	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Rp5.387.300	10	Rp5.375.000	Anggaran Di Realisasikan Sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Rp116.500.000	11	Rp114.997.517	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.0 9.12				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	12	Rp40.800.000	9	Rp39.958.702	Anggaran di belanjakan sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.01.2.0 9.06				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehabilitasi	1	Rp5.387.300	1	Rp5.375.000	Anggaran Di Realisasikan Sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	
3.26.02			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase PAD sektor pariwisata							
3.26.02.2.0 3				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.02.2.0 3.03				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan Rintisan, Berkembang, Pematapan dan revitalisasi)	4	Rp95.000.000	4	Rp79.500.000	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	Pencairan sesuai dengan jadwal	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.26.02.2.0 3.04				Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Jumlah sarana dan Prasarana dlm Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	2	Rp2.134.527.059	2	Rp2.039.018.757	Anggaran Di Realisasikan Sesuai Kebutuhan	Efisiensi Anggaran	S.1, S.2
3.26.02.2.0 3.06				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota	7	Rp176.540.000	7	Rp175.830.000	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan	Efisiensi anggaran	S.5
3.26.02.2.0 3.05				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20	Rp28.060.000	20	Rp28.060.000	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	Pencairan sesuai dengan jadwal	S.6
3.26.02.2.0 4				PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.26.02.2.0 4.04				Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan Usaha pariwisata	30	Rp27.000.000	30	Rp26.980.000	Anggran terealisasi	-	
3.26.03			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata								
3.26.03.2.0 1				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.03.2.0 1.02				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik Dalam dan luar pariwisata Kabupaten/Kota	6	Rp279.550.000	5,44	Rp278.890.224	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan	Efisiensi anggaran	S.1
3.26.03.2.0 1.04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata di Dalam Dan Luar Negeri	3	Rp140.000.000	3	Rp139.488.680	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	Pencairan sesuai dengan jadwal	S.1
3.26.03.2.0 1.01				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	Rp70.000.000	3	Rp69.800.000	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan	Efisiensi anggaran	S.3, S.4

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.26.05			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan							
3.26.05.2.01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
3.26.05.2.01.01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50	Rp451.360.000	50	Rp421.116.000	Kegiatan di Laksanakan Sesuai Jadwal	percepatan pada proses pecairan	
3.26.05.2.02				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								
3.26.04			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN	Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif							
3.26.04.2.02				PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF								
3.26.04.2.02.05				Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah event pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	2	Rp3.445.003.300	2	Rp3.438.277.266	Kegiatan di Laksanakan Sesuai Jadwal, Pencairan pada bulan selanjutnya	Percepatan proses pencairan anggaran kegiatan agar kegiatan selanjutnya bisa dikerjakan	
3.25.0.00.0.00.1..0000		DINAS PERIKANAN										
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3.25.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.25.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.25.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Rp1.321.200	2	Rp583.500	Menyesuaikan kebutuhan penyusunan dan jilid dokumen perencanaan	Sesuai kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.25.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp1.243.500	0	Rp0	Menyesuaikan anggaran kas	Anggaran untuk penyusunan RKA 2024	
3.25.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp1.243.500	1	Rp653.000	penyusunan perubahan RKA 2023	Menyesuaikan Anggaran Kas	
3.25.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp1.243.500	1	Rp568.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 1.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp1.243.500	1	Rp585.000	Sesuai Kebutuhan	Efisiensi	
3.25.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp1.243.500	1	Rp420.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai kebutuhan	
3.25.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.25.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280	Rp2.858.489.767	227	Rp2.377.209.648	Menyesuaikan jumlah pegawai dan ada penambahan jumlah pegawai ASN	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp1.082.511.796	12	Rp1.027.612.511	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai Kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.25.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Rp2.235.500	3	Rp306.000	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
3.25.01.2.0 3.06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Rp7.188.500	2	Rp4.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Menyesuaikan Kebutuhan	
3.25.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.25.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp6.468.000	1	Rp5.730.000	Menyesuaikan Kebutuhan Alat Listrik	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp40.400.800	1	Rp35.240.200	Menyesuaikan kebutuhan peralatan kantor	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp6.941.000	1	Rp6.254.400	Menyesuaikan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp171.654.100	1	Rp147.093.000	Menyesuaikan kebutuhan belanja bahan/alat kantor	Sesuai kebutuhan	
3.25.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp1.800.000	1	Rp1.135.100	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp108.422.000	30	Rp106.264.674	Sesuai Kebutuhan Perjalanan Dinas	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.25.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Rp14.700.000	2	Rp10.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai Kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.25.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp174.599.300	12	Rp158.711.165	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	sesuai kebutuhan	
3.25.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.25.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp63.118.900	1	Rp49.366.393	Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Rp93.195.400	3	Rp85.808.732	Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Rp15.000.000	9	Rp14.825.000	Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	Sesuai Kebutuhan	
3.25.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp56.327.800	3	Rp52.631.000	Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Sesuai Kebutuhan Pemeliharaan	
3.25.01.2.0 9.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	Rp5.000.000	9	Rp4.960.000	Sesuai kebutuhan pemeliharaan AC	Sesuai Kebutuhan	
3.25.03			MENINGKATNYA KONTRIBUTSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap							
3.25.03.2.0 2				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.03.2.0 2.01				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	5000	Rp251.500.000	2992	Rp245.405.600	Menyesuaikan tagihan Asnel dan jumlah orangnya	Sesuai Kebutuhan	R.2

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.25.03.2.0 2.02				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5	Rp4.150.700	3	Rp2.600.000	Menyesuaikan anggaran kas	Sesuai Kebutuhan	
3.25.03.2.0 6				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.04			MENINGKATKAN KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya							
3.25.04.2.0 2				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
3.25.04.2.0 2.04				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50	Rp284.457.500	50	Rp279.613.000	Menyesuaikan Anggaran kas	Sesuai Rencana Pembinaan	R.3
3.25.04.2.0 4				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
3.25.04.2.0 4.01				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp144.662.000	1	Rp109.043.500	Menyesuaikan anggaran kas	Sesuai Kebutuhan	R.1
3.25.04.2.0 4.02				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih unggul yg disediakan	57	Rp204.217.000	57	Rp191.787.632	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai Kebutuhan	
3.25.04.2.0 4.03				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	Rp647.050.000	12	Rp633.778.300	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai kebutuhan	R.3

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.25.04.2.04.04				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	50	Rp18.927.000	50	Rp16.655.000	Menyesuaikan anggaran kas	Sesuai kebutuhan acara sosialisasi/pembinaan	
3.25.05			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan kegiatan IUU Fishing destruktif dan pelanggaran usaha perikanan							
3.25.05.2.01				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								
3.25.05.2.01.02				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	Rp46.706.000	1	Rp34.902.661	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai kebutuhan acara sosialisasi/pembinaan	
3.25.06			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan							
3.25.06.2.02				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
3.25.06.2.02.01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	34	Rp46.010.400	34	Rp34.875.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sesuai kebutuhan pelatihan dan pembinaan	
3.25.06.2.03				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.25.06.2.0 3.01				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	198	Rp119.744.000	198	Rp115.370.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi pada Event GEMARIKAN	Sesuai kebutuhan acara Gemarikan	
3.27.0.00.0 .00.1..0000		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN										
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.27.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.27.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen	9	Rp22.700.000	9	Rp15.727.500	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.27.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penerima gaji dan tunjangan ASN	222	Rp23.468.289.645	222	Rp21.706.078.746	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Rp1.110.299.000	1	Rp706.022.979	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.27.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp119.575.800	1	Rp117.676.000	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp133.208.700	1	Rp102.909.062	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp620.522.200	1	Rp495.038.000	tidak ada masalah	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.27.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp20.220.000	1	Rp14.434.500	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.27.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp3.975.000	1	Rp3.070.000	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang difasilitasi	1	Rp190.928.320	1	Rp147.273.938	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Rp2.292.640.108	1	Rp1.742.848.737	tidak ada masalah	-	T.4
3.27.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.27.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53	Rp246.764.700	53	Rp164.921.458	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat mesin yang dipelihara	30	Rp30.000.000	30	Rp20.010.000	tidak ada masalah	-	
3.27.02			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Komoditas pertanian/perkebunan								
3.27.02.2.0 1				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
3.27.02.2.0 1.01				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Rp18.998.694.300	1	Rp14.706.939.240	tidak ada masalah	-	T.2, T.3, T.5, T.6
3.27.02.2.0 1.02				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	tercukupinya kebutuhan pupuk untuk petani	1	Rp1.715.294.800	1	Rp1.392.000.000	tidak ada masalah	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.27.03			---	PROGRAM PENYEDIAAN -- DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
3.27.03.2.01				Pengembangan Prasarana Pertanian								
3.27.03.2.01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terwujudnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	1	Rp693.408.800	1	Rp262.502.390	tidak ada masalah	-	T.2, T.3, T.5, T.6
3.27.03.2.02				Pembangunan Prasarana Pertanian								
3.27.03.2.02.01				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terpenuhinya kebutuhan air bagi petani	12	Rp115.000.000	12	Rp103.781.000	tidak ada masalah	-	
3.27.03.2.02.03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	lancarnya transportasi hasil pertanian	3	Rp26.000.000	3	Rp25.666.000	tidak ada masalah	-	
3.27.03.2.02.09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	25	Rp25.932.599.700	25	Rp24.195.092.733	tidak ada masalah	-	
3.27.05			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas pipil kering sektor pertanian palawija							
3.27.05.2.01				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
3.27.05.2.01.01				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terwujudnya pengendalian OPT	86154	Rp479.200.000	86154	Rp312.337.500	tidak ada masalah	-	T.1
3.27.06			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.27.06.2.0 1				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.07			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani							
3.27.07.2.0 1				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
3.27.07.2.0 1.01				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Prosentase Kelembagaan penyuluhan yang meningkat kapasitasnya	50	Rp459.020.750	50	Rp447.040.000	tidak ada masalah	-	
3.27.07.2.0 1.02				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Prosentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan kapasitasnya	5	Rp859.788.100	5	Rp495.129.110	tidak ada masalah	-	T.7
3.27.07.2.0 1.03				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	2	Rp415.150.000	2	Rp217.706.240	tidak ada masalah	-	
3.27.07.2.0 1.05				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya sekolah lapang bagi kelompok tani	40	Rp656.702.800	1	Rp35.000.000	Pada APBD awal tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan kode rekening dan dilakukan perubahan kode rekening pada PAPBD. Tetapi karena pendeknya waktu pelaksanaan dan mengingat komoditas tanaman yang akan dijadikan bahan Sekolah Lapang sudah selesai panen/ sudah melewati musim maka Sekolah Lapang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
3.31.3.30.0 .00.1..0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.30.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.30.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.30.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp9.882.987.134	12	Rp9.166.354.134	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.30.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1	Rp6.877.000	1	Rp5.241.860	Sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	12	Rp315.782.013	12	Rp294.250.100	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	1	Rp249.188.000	1	Rp233.525.280	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pengadaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40	Rp196.413.400	40	Rp173.650.855	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Rp49.083.800	10	Rp44.789.440	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.30.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	12	Rp570.000	12	Rp500.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, website, air dan listrik yang digunakan	12	Rp520.801.652	12	Rp506.117.353	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Rp2.200.000	0	Rp0	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
3.30.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp5.141.395.817	12	Rp4.999.117.800	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.30.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1	Rp71.300.000	1	Rp60.936.210	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Rp448.567.600	50	Rp350.405.336	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	63	Rp10.000.000	63	Rp9.672.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
3.30.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	Rp128.700.000	1	Rp127.200.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.03			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Jumlah pasar yang ber-SNI dengan jumlah pasar yang ada								
3.30.03.2.0 1				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
3.30.03.2.0 1.01				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar Tradisional dan Pasar Hewan yang di Rehab	6	Rp640.929.200	6	Rp634.657.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	U.1, U.2
3.30.03.2.0 1.02				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Pasar	6	Rp106.207.400	6	Rp105.111.400	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.04			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibanding total volume perdagangan yang ada								
3.30.04.2.0 2				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.30.04.2.0 2.03				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi diselenggarakannya pasar murah	31	Rp790.514.855	31	Rp783.847.526	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.30.04.2.0 3				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3.30.05			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih							
3.30.05.2.0 1				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.30.06			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelanggaran perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							
3.30.06.2.0 1				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								
3.30.06.2.0 1.01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang melakukan Tera/Tera ulang selama satu tahun	2500	Rp39.907.200	2500	Rp32.692.200	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3.31.02			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peredaran Rokok Tanpa Cukai							
3.31.02.2.0 1				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
3.31.02.2.0 1.04				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	Rp677.360.600	2	Rp644.777.488	belum dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.31.02.2.0 1.05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah WUB Baru yang mengikuti Bimtek Kemampuan Teknologi Industri	2	Rp2.789.109.800	2	Rp2.783.109.350	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	U.3,U.4,U.5,U.6,V.1,V.2,V.3,V.4,V.5
3.31.02.2.0 1.03				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	Rp282.456.300	2	Rp263.825.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan awal bulan	
4.01.3.30.0 .00.2..0000		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM										
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.04			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM STABILISASI -- HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
3.30.04.2.0 3				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3.30.04.2.0 3.03				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	Rp67.816.400	12	Rp46.251.300	Tidak ada masalah	Nihil	
3.30.07			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM -- PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
3.30.07.2.0 1				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
3.30.07.2.0 1.01				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100	Rp3.834.705.700	100	Rp3.401.238.719	Tidak ada masalah	Nihil	

*Keterangan: Kolom Tindaklanjut Rekomendasi DPRD berisi Kode yang mengacu pada Subbab 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.4 Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.0.00.0 .00.1..0000		BAGIAN HUKUM										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp114.600.000	12	Rp114.600.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp50.000.000	1	Rp45.000.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp267.787.800	1	Rp191.600.025	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp354.582.000	12	Rp254.644.802	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp14.999.900	1	Rp12.080.500	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp8.900.000	1	Rp4.908.500	pencairan tidak maksimal	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	Rp5.250.000	30	Rp4.650.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	12	Rp1.400.000	12	Rp688.209	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp223.122.200	12	Rp209.342.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Rp40.000.000	20	Rp29.460.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
4.01.02.2.0 3				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
4.01.02.2.0 3.01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	673	Rp149.239.100	673	Rp109.807.950	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.02.2.0 3.03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600	Rp121.000.000	600	Rp88.095.630	pencairan tidak maksimal	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.02.2.0 3.02				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	113	Rp2.208.478.000	113	Rp2.118.956.100	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	E.2
4.01.01.2.0 5				Administrasi kepegawaian perangkat daerah								
4.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	17	Rp45.400.000	17	Rp41.650.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.0.00.0 .00.3.0000		BAGIAN PEMBANGUNAN										

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200	Rp590.495.000	128	Rp449.466.976	pencairan tidak maksimal	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.01.2.0 2.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Rp324.900.000	58	Rp255.905.000	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 5.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Rp298.200.000	74	Rp270.350.000	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Rp1.490.173.000	15	Rp1.455.031.000	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Rp94.673.400	4	Rp79.526.872	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Rp240.500.000	7	Rp156.413.115	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp5.025.000	12	Rp4.100.000	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Rp5.280.000	12	Rp619.058	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Rp87.000.000	4	Rp62.718.844	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Akan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan	
4.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp821.310.000	10	Rp675.984.951	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp26.000.000	1	Rp10.019.494	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Rp45.350.000	8	Rp26.214.354	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Direalisasikan 4 Kali	
4.01.03			MENINGKATNYA STABILITAS HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
4.01.03.2.0 2				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
4.01.03.2.0 2.01				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	Rp662.925.000	3	Rp559.932.548	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.03.2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
4.01.0.00.0.00.33.0000		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.01.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp317.550.000	12	Rp263.716.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Rp101.501.300	4	Rp98.500.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Rp72.659.440	7	Rp33.657.750	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp27.880.200	2	Rp15.467.800	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp470.176.960	11	Rp264.665.056	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp11.400.000	12	Rp3.900.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Rp42.480.000	11	Rp23.220.681	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	Rp78.535.600	8	Rp24.254.449	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Rp40.000.000	15	Rp24.386.703	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT --								
4.01.02.2.0 2				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
4.01.02.2.0 2.01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16	Rp8.313.744.700	16	Rp6.081.530.305	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.02.2.0 2.02				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial meliputi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (guru ngaji)	6	Rp35.371.796.000	6	Rp28.405.595.199	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.02.2.0 2.03				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat meliputi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan meningkatnya jumlah guru ngaji dan penyuluh agama	3	Rp3.999.415.825	3	Rp3.253.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.01.02.2.0 4				Fasilitasi Kerjasama Daerah								
4.01.02.2.0 4.01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6	Rp6.718.790.600	6	Rp6.047.790.158	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.0.00.0 .00.4..0000		BAGIAN ORGANISASI										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp5.194.700	1	Rp3.886.700	Tidak ada Kendala	Target Tercapai /Dokumen tersusun dan terdapat efisiensi anggaran	
4.01.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp5.194.700	1	Rp3.886.700	Tidak ada Kendala	Target Tercapai /Dokumen tersusun dan terdapat efisiensi anggaran	
4.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Rp300.689.200	100	Rp283.915.500	Tidak ada Kendala	Target tercapai dan terdapat Efisiensi anggaran	
4.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Rp48.708.300	20	Rp45.940.900	Tidak ada Kendala	Target tercapai dan terdapat Efisiensi anggaran	
4.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Rp241.832.600	7	Rp141.617.200	Tidak ada kendala	Target tercapai dan terdapat Efisiensi anggaran	
4.01.01.2.1 3				Penataan Organisasi								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.1 3.01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	Rp240.846.600	100	Rp229.435.800	Tidak ada kendala	Pada tahun 2023 terdapat perubahan KSOTK sebagai tindak lanjut Permenpan 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah , dimana sebanyak 33 KSOTK dilakukan perubahan dimana fungsi koordinator dan subkoordinator dihapus dan perubahan tugas dan fungsi. sebagai tindak lanjut dari Permendagri 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kota/ Kabupaten	E.5.W.3

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.1 3.02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	Rp641.416.000	100	Rp382.584.175	Tidak ada kendala	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2023 mendapatkan indeks pelayanan publik 4,51 (kategori A) dan urutan 10 besar nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor : 795 tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah dan BUMN Tahun 2023, sedangkan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (hasil penilaian ombudsman) Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2023 mendapatkan nilai 97,23 (kategori A) dan urutan 4 besar nasional	W.5

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.1 3.03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	Rp154.958.000	100	Rp149.273.700	Tidak ada Kendala	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan. Tahun 2021 Indeks RB Pemerintah Kabupaten Jember adalah 55,87 yang masuk dalam kategori CC meningkat menjadi 62,28 di tahun 2022 dengan kategori B. Selanjutnya Indeks RB ini meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 66,61 dan masuk dalam kategori B. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jember mendorong percepatan RB General dan RB Tematik dimana telah tertuang seluruh rencana aksi dalam RB General (Reformasi Birokrasi pada Tata Kelola Pemerintahan) dan RB Tematik (Reformasi Birokrasi pada aspek pembangunan yang	W.4, W.5
4.01.01.2.0 9				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
4.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Rp28.632.900	50	Rp19.997.900	Tidak ada Kendala	Target tercapai dan terdapat Efisiensi anggaran	
4.01.0.00.0 .00.7..0000		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53	Rp939.540.300	53	Rp932.920.320	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	
4.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Rp66.109.700	15	Rp63.539.000	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	
4.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makan dan minuman serta bahan kebersihan kantor	70	Rp61.318.600	70	Rp61.207.900	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	
4.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10	Rp5.215.000	9	Rp5.215.000	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	
4.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp102.016.300	12	Rp98.305.116	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	
4.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Rp319.996.000	10	Rp316.904.100	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Kegiatan belanja barang sudah dilakukan melalui sistem online, melalui e-catalogue, dan pencairan anggaran honorarium sudah sesuai dengan pos anggaran yang ada	
4.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Rp30.000.000	35	Rp29.800.110	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	
4.01.01.2.1 4				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
4.01.01.2.1 4.01				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120	Rp1.136.445.200	117	Rp1.135.154.910	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.1 4.03				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan bupati dan wakil bupati yang didokumentasikan melalui foto, video, buku, majalah dan media luar ruang (baliho, spanduk, x-banner dll)	150	Rp2.086.993.100	150	Rp2.084.839.228	Tidak ada permasalahan yang signifikan	Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD	
4.01.0.00.0 .00.8..0000		BAGIAN UMUM										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	Rp17.901.975.504	132	Rp15.474.785.560	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp2.097.762.000	12	Rp1.973.549.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 3.02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Rp20.500.000	1	Rp18.465.845	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8	Rp959.357.500	8	Rp820.451.691	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Rp240.431.800	12	Rp239.546.422	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	Rp7.386.248.130	18	Rp7.196.275.026	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Rp451.238.500	6	Rp409.193.581	Menyesuaikan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Ditingkatkan Lagi	
4.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Rp4.073.125.250	46	Rp4.023.397.671	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Rp229.894.000	12	Rp185.780.188	Menyesuaikan Kebutuhan Barang Cetakan	Kebutuhan Barang Cetakan Ditingkatkan Lagi	
4.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Rp3.397.165.500	48	Rp3.393.122.760	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 6.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Rp2.979.935.000	48	Rp2.823.976.749	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp366.862.970	12	Rp245.380.800	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Rp3.371.022.680	36	Rp3.309.233.652	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Rp2.554.432.000	48	Rp2.501.037.496	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Rp4.379.463.390	24	Rp4.227.810.107	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Rp1.425.250.000	18	Rp1.307.053.226	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	Rp2.799.260.000	120	Rp2.694.482.888	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Rp665.905.000	87	Rp578.057.540	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Mesin Ditingkatkan Lagi	
4.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Rp2.948.130.000	6	Rp2.906.591.785	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.05				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Rp200.000.000	40	Rp199.913.648	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.11				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
4.01.01.2.11.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp200.000.000	2	Rp173.843.102	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.11.02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24	Rp416.240.000	13	Rp164.977.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.1 1.04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp1.125.000.000	2	Rp1.017.972.800	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.1 2				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
4.01.01.2.1 2.01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Rp707.374.000	12	Rp662.020.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.1 2.02				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Rp504.938.600	12	Rp468.848.100	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.3.30.0 .00.2..0000		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Rp21.286.000	6	Rp6.808.000	Tidak ada masalah	Nihil	
4.01.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Rp8.565.000	6	Rp2.189.600	Tidak ada masalah	Nihil	
4.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp554.628.000	12	Rp296.977.006	Tidak ada masalah	Nihil	
4.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp1.430.000	1	Rp1.430.000	Tidak ada masalah	Nihil	
4.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp14.754.000	12	Rp11.504.000	Tidak ada masalah	Nihil	
4.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp21.500.000	1	Rp13.875.642	Tidak ada masalah	Nihil	
4.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Rp20.000.000	0	Rp4.650.000	Kegiatan tidak terlaksana secara optimal	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
4.01.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
4.01.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	Rp64.472.800	3	Rp62.700.000	Tidak ada masalah	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan	
4.01.03			MENINGKATNYA STABILITAS HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
4.01.03.2.0 1				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.03.2.0 1.01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	Rp54.594.700	12	Rp46.747.000	Tidak ada masalah	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan	
4.01.03.2.0 1.02				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Rp229.211.000	12	Rp130.153.390	Tidak ada masalah	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan	
4.01.03.2.0 1.03				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro dan Kecil	12	Rp48.237.400	12	Rp22.040.600	Tidak ada masalah	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan	
4.01.03.2.0 1.05				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4	Rp24.382.000	4	Rp10.274.650	Kegiatan tidak terlaksana secara optimal	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
4.01.03.2.0 4				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								
4.01.03.2.0 4.02				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian	4	Rp18.064.000	4	Rp690.000	Kegiatan tidak terlaksana secara optimal	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
4.02.0.00.0 .00.1..0000		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.02	SEKRETARIAT DPRD											
4.02.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.02.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.02.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp32.326.000	3	Rp14.873.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.02.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp19.062.600	1	Rp4.381.600	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.02.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp17.798.000	1	Rp10.705.700	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.02.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp22.332.500	1	Rp3.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.02.01.2.0 1.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp15.434.500	1	Rp3.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
4.02.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.02.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38	Rp4.737.131.857	38	Rp4.440.679.971	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 2.03				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Rp552.937.750	12	Rp453.451.450	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.02.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp49.696.200	1	Rp44.911.825	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Rp1.345.386.900	5	Rp1.229.378.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.02.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Rp330.040.800	12	Rp272.917.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp290.792.500	1	Rp170.829.250	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	300	Rp36.852.000	300	Rp34.764.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kunjungan kerja/rapat koordinasi/konsultasi SKPD ke luar daerah	96	Rp564.005.100	96	Rp390.306.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp64.800.000	12	Rp37.839.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp900.918.614	12	Rp556.277.063	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp781.581.296	12	Rp690.356.381	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	8	Rp710.110.000	8	Rp530.660.720	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.02.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Rp462.071.000	22	Rp226.621.640	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	100	Rp710.344.000	100	Rp612.921.875	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1	Rp241.618.000	1	Rp156.367.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.1 5				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4.02.01.2.1 5.01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Rp32.115.929.029	50	Rp30.243.696.178	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.1 5.02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	"Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan"	4	Rp613.145.000	4	Rp519.520.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.1 5.03				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	50	Rp175.000.000	50	Rp153.600.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.1 6				Layanan Administrasi DPRD								
4.02.01.2.1 6.03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2	Rp25.917.709.400	2	Rp19.543.272.100	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.01.2.0 5				Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.02.01.2.0 5.03				Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	Rp61.844.300	12	Rp52.043.719	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.02.02			TERINTEGRASINYA PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERDA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD							
4.02.02.2.0 1				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								
4.02.02.2.0 1.01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya Propemperda tahun berikutnya	1	Rp62.384.300	1	Rp20.804.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 1.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4	Rp266.521.100	4	Rp191.439.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 1.04				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersusunnya Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4	Rp566.377.200	4	Rp376.395.320	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 2				Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.02.2.0 2.02				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	"Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"	2	Rp69.966.000	2	Rp48.548.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 2.04				Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1	Rp127.234.900	1	Rp94.283.750	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 2.06				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	"Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD"	1	Rp92.080.000	1	Rp73.161.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 2.01				Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	2	Rp93.390.900	2	Rp80.026.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.02.02.2.0 2.03				Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1	Rp167.179.000	1	Rp132.012.270	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
4.02.02.2.0 3.01				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum oleh DPRD	12	Rp90.156.580	12	Rp84.475.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3.02				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Rp90.156.580	12	Rp61.593.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3.03				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Rp90.160.140	12	Rp82.094.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3.04				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	Rp90.156.580	12	Rp81.598.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3.05				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam"	12	Rp71.664.580	12	Rp62.835.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3.06				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"	1	Rp71.664.580	1	Rp8.778.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3.07				Pengawasan Penggunaan Anggaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran"	4	Rp75.349.580	4	Rp60.270.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 3.08				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Rp109.791.500	1	Rp89.403.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 4				Peningkatan Kapasitas DPRD								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.02.02.2.0 4.03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8	Rp172.790.800	8	Rp145.117.620	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 4.04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7	Rp362.920.000	7	Rp362.611.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 4.05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Rp426.349.000	7	Rp425.950.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 4.06				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9	Rp164.606.500	9	Rp154.555.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 4.07				Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah program kerja yang dilakukan DPRD	1	Rp18.498.400	1	Rp4.942.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 5				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.02.2.0 5.01				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja DPRD	72	Rp79.600.000	72	Rp47.920.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 5.02				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	"Jumlah Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun "	1	Rp64.504.400	1	Rp32.370.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 5.03				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Rp1.451.935.000	3	Rp1.182.490.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 6				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
4.02.02.2.0 6.02				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	Rp12.686.200	2	Rp10.213.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
4.02.02.2.0 8				Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.02.2.0 8.01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Rp18.093.299.300	12	Rp16.977.522.538	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja	
5.01.4.01.5 .06.1..0000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN										
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis Bagian Tata Pemerintahan, Renja SKPD	2	Rp7.535.800	2	Rp3.812.500	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	Rp5.293.000	0	Rp0	Kegiatan tidak terlaksana secara optimal	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
4.01.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	1	Rp4.318.000	1	Rp3.639.000	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1	Rp5.117.800	0	Rp0	Kegiatan tidak terlaksana secara optimal	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
4.01.01.2.0 1.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1	Rp5.117.800	1	Rp3.150.000	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya anggaran tenaga penunjang administrasi dan operasional kantor Jumlah bulan tersedianya makanan/minuman rapat / karyawan Bagian Tata Pemerintahan	12	Rp480.501.191	12	Rp464.472.164	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya anggaran penggandaan dan barang cetakan	12	Rp8.373.000	12	Rp8.168.000	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	12	Rp285.249.600	12	Rp255.215.950	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 6.08				kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan terfasilitasinya kunjungan tamu di Jember	12	Rp16.037.800	12	Rp5.317.800	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Rp20.100.000	6	Rp19.705.926	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.1 3				Penataan Organisasi								
4.01.01.2.1 3.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD Kabupaten Jember Tahun 2020 sesuai Pedoman Kemendagri RI	1	Rp24.005.800	1	Rp17.014.800	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
4.01.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Rp172.361.000	2	Rp148.000.000	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
4.01.01.2.0 3.01				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Rp14.247.240	2	Rp1.911.000	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.01.2.0 3.06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	1	Rp939.044	0	Rp0	Kegiatan tidak terlaksana secara optimal	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
4.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	--							
4.01.02.2.01				Administrasi Tata Pemerintahan								
4.01.02.2.01.01				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak	2	Rp35.866.700	2	Rp27.889.300	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.02.2.01.02				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan survey, pemetaan dan batas daerah yang terinventarisir	2	Rp158.878.475	2	Rp155.205.556	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.02.2.01.03				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	% Peningkatan kualitas pelaksanaan PATEN % Penyelenggaraan peringatan HUT RI dan Hari Jadi Provinsi di Kabupaten Jember	2	Rp348.601.060	2	Rp336.721.932	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
4.01.02.2.04				Fasilitasi Kerjasama Daerah								
4.01.02.2.04.01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	% Penyusunan naskah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terselesaikan	50	Rp474.209.900	31	Rp448.350.600	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	

*Keterangan: Kolom Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD berisi Kode yang mengacu pada Subbab 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.5 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.5.05.0 .00.1..0000		BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH										
5	UNSUR PENUNJANG											
5.01	PERENCANAAN											
5.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Rp42.666.600	1	Rp40.913.850	-	-	
5.01.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp45.086.300	2	Rp32.233.400	Penyusunan dokumen RKA Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi	-	
5.01.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Rp16.091.900	2	Rp8.225.750	-	-	
5.01.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp13.527.300	1	Rp2.324.650	-	-	
5.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462	Rp4.902.507.957	366	Rp4.300.679.997	Tidak ada permasalahan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN terbayar dengan tepat waktu	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240	Rp342.240.000	240	Rp290.960.000	Tidak ada permasalahan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berjalan dengan baik	
5.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Rp170.500.000	2	Rp161.019.600	Tidak ada permasalahan	Kegiatan telah terlaksana pada bulan september - oktober	
5.01.01.2.0 5.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	Rp532.958.400	200	Rp529.200.000	Tidak ada permasalahan	Kegiatan Bimbingan Teknis Perencana Kabupaten Jember terlaksana dengan baik dan lancar	
5.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.01.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp20.594.000	1	Rp8.034.000	Tidak ada permasalahan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik terlaksana dengan baik dan lancar	
5.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Rp108.111.800	12	Rp66.035.700	Tidak ada permasalahan	Nihil	
5.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Rp52.497.500	12	Rp48.763.080	Tidak ada permasalahan	Kegiatan telah terlaksana pada bulan september - oktober	
5.01.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Rp11.220.000	12	Rp3.690.000	Tidak ada permasalahan	Nihil	
5.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Rp385.853.600	200	Rp315.730.696	Tidak ada permasalahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan baik dan lancar	
5.01.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Rp517.311.700	15	Rp463.927.300	Tidak ada permasalahan	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.01.2.0 7.02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Rp261.214.800	5	Rp215.926.000	Tidak ada permasalahan	Nihil	
5.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp16.460.000	1	Rp16.206.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
5.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp173.195.539	12	Rp112.575.717	Tidak ada permasalahan	Penyediaan Jasa Komunikasi terbayar dengan tepat waktu	
5.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp39.126.000	1	Rp35.110.000	Tidak ada permasalahan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terlaksana pada bulan Juli - Oktober	
5.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Rp1.180.681.000	3	Rp944.455.882	Tidak ada permasalahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terlaksana dengan baik dan lancar	
5.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp68.500.000	1	Rp51.939.470	Tidak ada permasalahan	Pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dengan baik dan lancar	
5.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Rp376.660.000	27	Rp278.968.728	Tidak ada permasalahan	Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan terpelihara dengan baik dan lancar	
5.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Rp95.000.000	50	Rp46.331.080	Tidak ada permasalahan	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.02			TERSEDINYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG MENENGAH DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA							
5.01.02.2.0 1				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
5.01.02.2.0 1.03				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Rp30.754.200	1	Rp16.969.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
5.01.02.2.0 1.04				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Rp152.875.100	1	Rp80.928.690	-	-	
5.01.02.2.0 1.05				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1	Rp181.768.500	1	Rp133.776.250	-	-	
5.01.02.2.0 1.06				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	31	Rp146.929.900	31	Rp121.424.000	-	-	
5.01.02.2.0 1.07				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100	Rp1.234.965.800	100	Rp1.049.346.431	Tidak ada permasalahan	Kegiatan tetap berdasarkan perencanaan yang telah ada	
5.01.02.2.0 2				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.02.2.0 2.03				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	200	Rp158.580.100	200	Rp151.312.000	Tidak ada permasalahan	Nihil	
5.01.02.2.0 3				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.02.2.0 3.03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Rp644.921.300	4	Rp435.396.520	Tidak ada permasalahan	Kegiatan tetap berdasarkan perencanaan yang telah ada	
5.01.03			TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG MENENGAH DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD								
5.01.03.2.0 1				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
5.01.03.2.0 1.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14	Rp74.474.700	14	Rp51.044.000	1. Kualitas laporan data capaian pada PD sudah baik dan perlu dipertahankan 2. terjadinya mutasi pegawai pada perencana PD 3. Intensitas pendampingan dan konsultasi yang telah dilakukan oleh SDM Bidang PPM Bappeda tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan PD	1. Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi bagi perencana PD 2. Perlu peningkatan kapasitas SDM bidang PPM Bappeda agar pendampingan dan konsultasi yang dilaksanakan kepada PD berkualitas (melalui studi tiru)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.03.2.0 1.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pemerintahan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	4	Rp322.757.900	4	Rp304.199.500	1. Kualitas laporan data capaian pada PD sudah baik dan perlu dipertahankan 2. terjadinya mutasi pegawai pada perencanaan PD 3. Intensitas pendampingan dan konsultasi yang telah dilakukan oleh SDM Bidang PPM Bappeda tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan PD	1. Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi bagi perencanaan PD 2. Perlu peningkatan kapasitas SDM bidang PPM Bappeda agar pendampingan dan konsultasi yang dilaksanakan kepada PD berkualitas (melalui studi tiru)	
5.01.03.2.0 1.07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PD mitra bidang kependudukan yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Jumlah PD mitra bidang pembangunan sumber daya manusia yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	8	Rp41.021.400	8	Rp29.744.000	1. Kualitas laporan data capaian pada PD sudah baik dan perlu dipertahankan 2. terjadinya mutasi pegawai pada perencanaan PD 3. Intensitas pendampingan dan konsultasi yang telah dilakukan oleh SDM Bidang PPM Bappeda tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan PD	1. Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi bagi perencanaan PD 2. Perlu peningkatan kapasitas SDM bidang PPM Bappeda agar pendampingan dan konsultasi yang dilaksanakan kepada PD berkualitas (melalui studi tiru)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.03.2.0 1.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang kependudukan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang pembangunan Sumber Daya Manusia yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	4	Rp361.331.500	4	Rp344.011.138	1. Kualitas laporan data capaian pada PD sudah baik dan perlu dipertahankan 2. terjadinya mutasi pegawai pada perencanaan PD 3. Intensitas pendampingan dan konsultasi yang telah dilakukan oleh SDM Bidang PPM Bappeda tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan PD	1. Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi bagi perencanaan PD 2. Perlu peningkatan kapasitas SDM bidang PPM Bappeda agar pendampingan dan konsultasi yang dilaksanakan kepada PD berkualitas (melalui studi tiru)	F.3
5.01.03.2.0 2				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
5.01.03.2.0 2.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7	Rp122.818.600	7	Rp57.582.100	Tidak ada permasalahan	Kegiatan tetap berdasarkan perencanaan yang telah ada	
5.01.03.2.0 2.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7	Rp1.017.620.200	7	Rp730.526.720	Tidak ada permasalahan	Kegiatan tetap berdasarkan perencanaan yang telah ada	N.2.V.4
5.01.03.2.0 2.07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	Rp52.626.000	5	Rp22.738.745	Tidak ada permasalahan	Kegiatan tetap berdasarkan perencanaan yang telah ada	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.03.2.0 2.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	Rp234.014.800	5	Rp155.863.800	Tidak ada permasalahan	Kegiatan tetap berdasarkan perencanaan yang telah ada	
5.01.03.2.0 2.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Rp108.613.000	3	Rp79.695.300	Tidak ada permasalahan	Kegiatan tetap berdasarkan perencanaan yang telah ada	
5.01.03.2.0 2.02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7	Rp19.560.000	0	Rp0	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, akan tetapi belum dilakukan serapan Anggaran	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
5.01.03.2.0 3				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
5.01.03.2.0 3.02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	Rp82.888.100	4	Rp55.691.549	Tidak ada masalah, pelaksanaan asistensi sudah selesai dilaksanakan	Pelaksanaan asistensi sudah sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya	
5.01.03.2.0 3.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	Rp68.875.100	3	Rp21.681.675	Tidak ada masalah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sudah terlaksana	pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah mitra bidang sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya	
5.01.03.2.0 3.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	Rp315.279.600	4	Rp236.231.680	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan koordinasi	Pelaksanaan koordinasi sudah dilaksanakan dan laporan hasil koordinasi dibuat setiap akhir Triwulan IV	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.01.03.2.0 3.07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	Rp54.475.000	1	Rp12.915.300	Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sudah dilaksanakan	
5.01.03.2.0 3.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	4	Rp150.644.460	4	Rp121.500.146	Tidak ada masalah, koordinasi dengan OPD terkait di bidang kewilayahan sudah terlaksana dan laporan hasil koordinasi disusun setiap akhir triwulan IV	Laporan hasil koordinasi akan disusun pada akhir triwulan IV	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5.05.02			TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG MENENGAH DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rencana penelitian yang terealisasi								
5.05.02.2.0 2				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
5.05.02.2.0 2.10				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	90	Rp1.300.000.000	90	Rp1.297.430.000	tidak ada permasalahan	proses administrasi untuk realisasi anggaran	
5.05.02.2.0 3				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
5.05.02.2.0 3.07				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	30	Rp500.000.000	30	Rp499.575.000	tidak ada permasalahan	proses administrasi untuk realisasi anggaran	
5.05.02.2.0 3.10				Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	20	Rp400.000.000	20	Rp399.620.000	tidak ada permasalahan	proses administrasi untuk realisasi anggaran	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.05.02.2.0 1				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5.05.02.2.0 1.12				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2	Rp443.624.100	2	Rp324.285.907	tidak ada permasalahan	proses administrasi	W.5
5.02.0.00.0 .00.1..0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
5	UNSUR PENUNJANG											
5.02	KEUANGAN											
5.02.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.02.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.02.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	4	Rp83.729.200	4	Rp76.560.290	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD & PPKD yang sesuai ketentuan	1	Rp66.736.300	1	Rp42.831.500	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Perubahan RKA-SKPD	1	Rp60.453.800	1	Rp55.793.800	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang terselesaikan	1	Rp37.136.800	1	Rp19.547.100	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 1.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang terselesaikan	2	Rp40.852.700	2	Rp37.927.900	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Kinerja OPD	3	Rp70.928.500	3	Rp56.996.750	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.02.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan dalam mencukupi Gaji, dan asuransi ASN	12	Rp17.369.543.169	12	Rp15.573.115.425	tidak ada kendala	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	1	Rp1.417.198.500	1	Rp1.133.013.890	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp26.339.500	12	Rp22.868.250	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil konsolidasi Penyusunan Lapotran Keuangan SKPD	1	Rp25.251.200	1	Rp22.511.950	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 2.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Rp22.075.200	18	Rp15.753.700	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.02.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah karyawan yang dipenuhi kebutuhan pakaian dinas guna menunjang disiplin sumber daya aparatur	70	Rp313.500.000	70	Rp307.950.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.02.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Dalam mengganti alat listrik kantor yang kurang baik	12	Rp10.705.900	12	Rp10.280.300	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum pegawai	12	Rp342.350.900	12	Rp324.566.250	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak Penggandaan	12	Rp59.160.000	12	Rp48.918.000	tidak ada kendala	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan dalam mengikuti Rapat Koordinasi dan Kebutuhan Konsultasi Ke Luar Daerah terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	12	Rp231.899.500	12	Rp189.611.669	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.02.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan dalam mencukupi kebutuhan jasa surat menyurat	12	Rp6.223.500	12	Rp2.300.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam memenuhi Kebutuhan Internet, Telpun dan Faksimili serta Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai sebagai sarana pendukung operasional kantor	12	Rp187.500.000	12	Rp177.700.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan dalam memenuhi jasa perlengkapan Peralatan, perbaikan dan pemenuhan perlengkapan Bahan Kebersihan kantor	0	Rp0	0	Rp0	Kegiatan tidak dilaksanakan	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
5.02.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Bulan dalam mencukupi kebutuhangaji Non PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS, dll	12	Rp1.418.751.948	12	Rp1.095.520.760	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.02.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan dengan keadaan baik	1	Rp90.995.000	1	Rp36.360.794	tidak ada kendala	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional kantor yang terpelihara dengan baik	37	Rp493.905.000	37	Rp277.665.939	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL EFEKTIF DAN EFISIEN.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan yang berlaku							
5.02.02.2.0 1				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
5.02.02.2.0 1.03				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Buku RKA SKPD OPD yang sesuai ketentuan	72	Rp204.080.000	72	Rp135.200.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.04				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Buku RKA SKPD Perubahan OPD yang sesuai ketentuan	72	Rp193.200.000	72	Rp152.340.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.05				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Buku DPA OPD yang sesuai ketentuan	72	Rp193.200.000	72	Rp139.100.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.06				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Buku DPA-Perubahan OPD yang sesuai ketentuan	72	Rp193.200.000	72	Rp149.700.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Penjabaran APBD yang sesuai aturan yang berlaku	2	Rp264.284.000	2	Rp224.205.856	tidak ada kendala	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.02.2.0 1.08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Penetapan APBD yang sesuai aturan yang berlaku	2	Rp340.452.000	2	Rp292.691.100	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Buku aturan tentang regulasi kebijakan bidang anggaran yang sesuai aturan	4	Rp242.822.800	3	Rp220.114.850	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.11				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Perencanaan Belanja Daerah sesuai Porsi Anggaran	1	Rp190.880.000	1	Rp38.385.662	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.13				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku	72	Rp410.276.000	62	Rp310.017.398	tidak ada kendala	Nihil	W.2
5.02.02.2.0 1.01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat waktu	1	Rp93.865.000	1	Rp53.410.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Rp193.864.000	1	Rp141.550.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 2				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
5.02.02.2.0 2.05				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase pengajuan dokumen Pencairan PPKD sesuai aturan	27066	Rp343.222.800	27060	Rp312.009.854	tidak ada kendala	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.02.2.0 2.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah pengajuan dokumen Pencairan SKPD sesuai aturan	2	Rp389.029.000	2	Rp283.970.006	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 2.09				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase pengajuan dokumen Pencairan PPKD sesuai aturan	27066	Rp300.643.000	26966	Rp248.889.495	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 2.11				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan dalam melayani perbendaharaan dan gaji kepada SKPD se-Kabupaten Jember	72	Rp143.785.500	72	Rp108.282.550	tidak ada kendala	Nihil	W.2
5.02.02.2.0 3				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
5.02.02.2.0 3.03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Data Laporan dan Realisasi Anggaran OPD Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Prognosis	260	Rp232.551.500	260	Rp146.788.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 3.04				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Data Laporan OPD dan BLUD Kabupaten Jember	3	Rp505.880.900	3	Rp351.899.552	tidak ada kendala	Nihil	W.1

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.02.2.0 3.05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021	1	Rp114.170.200	1	Rp101.844.500	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 3.11				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan OPD yang bina	72	Rp716.585.000	72	Rp650.756.810	tidak ada kendala	Nihil	W.2
5.02.02.2.0 4				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5.02.02.2.0 4.08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima penyaluran DD ,ADD, serta jaminan kesehatan perangkat desa se Kab.Jember	1	Rp502.073.204.397	1	Rp500.841.819.567	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 4.09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penanganan kedaruratan secara baik	1	Rp45.162.296.180	1	Rp31.854.315.147	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.02.2.0 4.10				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapat penyaluran Dana Bagi Hasil yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1	Rp22.500.000.000	1	Rp22.500.000.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL EFEKTIF DAN EFISIEN.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Aturan yang Berlaku								
5.02.03.2.0 1				Pengelolaan Barang Milik Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.03.2.0 1.02				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan daftar kebutuhan Barang Milik Daerah/Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan daftar kebutuhan Barang Milik Daerah	72	Rp65.281.500	72	Rp8.454.820	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.03				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang menyusun Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah	72	Rp32.828.600	72	Rp11.718.000	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.04				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	72	Rp93.797.100	72	Rp15.334.280	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terawat	72	Rp235.325.200	72	Rp210.497.586	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.06				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kondisi BMD Pemkab. Jember	4	Rp60.871.700	3	Rp57.435.190	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.07				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Aset yang sudah diterbitkan	1	Rp4.770.755.300	1	Rp3.130.437.503	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.08				Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dapat dinilai untuk Tujuan tertentu	1	Rp460.097.700	1	Rp451.022.590	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik dan sesuai ketentuan	72	Rp23.562.800	70	Rp20.841.960	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Brang Milik daerah yang bergerak ataupun yang tidak bergerak terawat secara baik	72	Rp5.596.642.499	62	Rp4.251.439.674	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.11				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen OPD Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai data yang ada dibidang Aset	72	Rp65.731.900	72	Rp53.479.560	tidak ada kendala	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.03.2.0 1.12				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Rp1.269.757.900	1	Rp1.140.603.290	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.03.2.0 1.13				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi pengelolaan BMD	72	Rp486.191.800	72	Rp463.310.020	tidak ada kendala	Nihil	
5.02.0.00.0 .00.2..0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH										
5	UNSUR PENUNJANG											
5.02	KEUANGAN											
5.02.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.02.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.02.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	13	Rp181.821.300	13	Rp147.915.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.02.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1416	Rp19.132.163.627	1416	Rp17.961.709.867	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	Rp2.229.449.554	6	Rp1.869.480.304	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.02.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Rp15.695.300	3	Rp15.195.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Rp4.586.790.300	8	Rp3.738.402.900	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	17	Rp1.244.025.900	17	Rp974.802.000	Tidak terdapat permasalahan	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	Rp704.415.000	10	Rp546.467.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	Rp643.397.800	5	Rp567.068.074	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.02.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan/belanja benda pos untuk administrasi perkantoran	1	Rp7.425.000	1	Rp6.000.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Rp564.798.470	36	Rp552.384.441	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.02.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pelaksanaan perawatan terhadap kendaraan dinas/jabatan (2 unit) selama 1 tahun	24	Rp96.323.200	24	Rp58.453.300	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional (61 unit) selama 1 tahun	61	Rp584.509.000	61	Rp420.355.850	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63	Rp206.806.700	63	Rp183.087.450	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Rp4.341.737.732	1	Rp4.262.047.696	Tidak terdapat permasalahan	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.02			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL EFEKTIF DAN EFISIEN.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH --								
5.02.02.2.03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
5.02.02.2.03.03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	20	Rp160.620.000	20	Rp152.970.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL EFEKTIF DAN EFISIEN.	PROGRAM Realisasi Pajak Daerah PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
5.02.04.2.01				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								
5.02.04.2.01.04				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	60	Rp567.555.900	58	Rp553.050.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.01.05				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	1500	Rp612.410.000	1373	Rp593.866.700	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.01.06				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	12	Rp419.120.000	12	Rp350.047.000	Tidak terdapat permasalahan	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.02.04.2.0 1.07				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	305977	Rp533.970.000	286664	Rp494.788.050	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.0 1.08				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	1089851	Rp339.814.656	1089851	Rp295.352.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.0 1.09				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	41126	Rp4.076.440.200	41126	Rp3.835.867.650	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.0 1.10				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	14050	Rp193.600.000	13750	Rp125.120.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.0 1.11				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1404	Rp642.960.000	1200	Rp565.420.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.0 1.12				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	4139	Rp52.000.000	4059	Rp34.400.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.0 1.13				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	154	Rp1.803.720.000	154	Rp1.697.425.821	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.0 1.14				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	80	Rp180.160.000	80	Rp179.514.405	Tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.1 .02				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
5.03.5.04.0 .00.1..0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM										
5	UNSUR PENUNJANG											
5.03	KEPEGAWAIAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.03.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.03.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.03.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp5.762.200	4	Rp5.744.000	Sesuai Rencana	Telah dilakukan koordinasi yang baik untuk mengakomodir kegiatan perencanaan di BKPSDM	
5.03.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp3.875.900	2	Rp3.872.000	Sesuai Rencana	Telah dilakukan koordinasi yang baik untuk mengakomodir kegiatan perencanaan di BKPSDM	
5.03.01.2.0 1.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Rp3.691.700	2	Rp3.684.400	Sesuai Rencana	Telah dilakukan koordinasi yang baik untuk mengakomodir kegiatan perencanaan di BKPSDM	
5.03.01.2.0 1.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Rp6.620.200	2	Rp6.599.000	Sesuai Rencana	Telah dilakukan koordinasi yang baik untuk mengakomodir kegiatan perencanaan di BKPSDM	
5.03.01.2.0 1.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Rp3.318.200	2	Rp3.313.000	Sesuai Rencana	Telah dilakukan koordinasi yang baik untuk mengakomodir kegiatan perencanaan di BKPSDM	
5.03.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Rp5.986.100	3	Rp5.967.000	Sesuai Rencana	Telah dilakukan koordinasi yang baik untuk mengakomodir kegiatan evaluasi dan pelaporan di BKPSDM	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.03.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp68.629.969.655	12	Rp20.620.140.111	Sesuai Rencana	Melakukan perencanaan yang komprehensif agar mendapatkan perencanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang akurat	
5.03.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Rp534.279.200	4	Rp525.232.408	Sesuai Rencana	Melakukan perencanaan yang komprehensif dan evaluasi secara berkala agar dapat terlaksana penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
5.03.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Rp5.806.000	2	Rp3.149.000	Sesuai Rencana	Memahami kebijakan terbaru dan melakukan koordinasi yang baik bersama Perangkat Daerah terkait agar dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	
5.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.03.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp19.468.700	1	Rp19.468.700	Sesuai Rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
5.03.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Rp241.386.100	2	Rp181.952.200	Sesuai Rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.03.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp180.291.700	4	Rp172.730.500	Sesuai Rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kebutuhan bahan logistik kantor	
5.03.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp22.348.800	1	Rp21.050.000	Sesuai Rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	
5.03.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.03.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Rp3.115.820	100	Rp1.000.000	Sesuai Rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kebutuhan jasa surat menyurat	
5.03.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp471.404.366	12	Rp458.518.878	Sesuai Rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
5.03.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp480.908.000	12	Rp437.694.500	Sesuai Rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	
5.03.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.03.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp63.454.500	1	Rp57.098.840	Sesuai Rencana	Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara komprehensif terkait Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.03.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Rp99.766.700	10	Rp71.236.416	Sesuai Rencana	Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara komprehensif terkait Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5.03.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Rp54.571.400	60	Rp53.070.000	Sesuai Rencana	Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara komprehensif terkait Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5.03.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp228.562.775	1	Rp224.346.000	Sesuai Rencana	Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara komprehensif terkait Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
5.03.02			TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SDM APARATUR YANG KOMPETEN.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan pimpinan tinggi/administrasi/fungsional							
5.03.02.2.0 1				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.03.02.2.0 1.02				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	793	Rp513.086.900	781	Rp475.102.984	1. Formasi dan Intruksi Pengadaan ASN dari Kemenpan RB RI sudah di umumkan 2. proses pendaftaran CPPPK formasi tahun 2023 telah terlaksana 3. proses Verifikasi berkas pelamar PPPK telah terlaksana 4. Saat ini adalah proses tes PPPK di titik lokasi yang telah ditentukan oleh BKN	1. Membuat Rencana Pelaksanaan seleksi ASN yang lebih matang 2. Melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai intruksi Kemenpan RB 3. Memperbanyak koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pusat	
5.03.02.2.0 1.06				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	503	Rp177.374.500	503	Rp176.469.116	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
5.03.02.2.0 1.08				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Rp52.689.000	2	Rp26.453.000	1. Kurangnya sarana dan Prasarana Korpri yang representatif dan memadai 2. Jadwal belum ada	Mengatur jadwal ulang dengan BKD Provinsi Jatim	
5.03.02.2.0 1.10				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase ketersediaan data pegawai yang valid dan up date	4000	Rp402.008.400	3972	Rp390.579.200	1. Kualitas, kuantitas dan komitmen penerapan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kurang. 2. Intensitas Penyampaian Produk/Dokumen dari bidang bidang di BKPSDM masih kurang 3. Tingkat Kesalahan Produk masih banyak 4. Keperdulian Satuan kerja terhadap data Kepegawaian masih kurang responsif	Ketepatan waktu penyampaian dokumen agar updating data bisa cepat dilaksanakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.03.02.2.0 2				Mutasi dan Promosi ASN								
5.03.02.2.0 2.01				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	250	Rp91.591.700	244	Rp91.152.850	TAnjab asal Masih Pake Versi lama, kesulitan dalam memverifikasi	PKroscek dgn Bag. Organisasi enambahan Personil	
5.03.02.2.0 2.02				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1800	Rp131.037.800	1765	Rp130.826.238	Terlalu Banyak Usulan sedang yang memproses terlalu sedikit	Penambahan Personil	
5.03.02.2.0 2.03				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	3000	Rp395.417.900	2941	Rp291.791.941	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Promosi tidak dapat ditentukan secara pasti	Membuat Rencana Promosi Pegawai	A.9, B.12, E.6, S.7
5.03.02.2.0 3				Pengembangan Kompetensi ASN								
5.03.02.2.0 3.02				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100	Rp445.582.800	96	Rp296.883.444	menunggu pelaksanaan selter jpt	Pengalihan kegiatan assesmenet dlm proses pemetaan kompetensi bagi pjbt esselon IV	
5.03.02.2.0 3.03				Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	terselenggaranya uji kompetensi bagi jabatan fungsional Tersusunnya kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi bagi ASN	3	Rp53.225.200	2	Rp37.237.455	Dokumen menunggu akhir pelaksanaan kegiatan bulan Desember 2023	-	
5.03.02.2.0 3.01				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	Rp218.144.600	190	Rp174.404.185	-	-	
5.03.02.2.0 3.06				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200	Rp326.962.420	184	Rp294.460.120	Perubahan anggaran dialokasikan ke sub kegiatan lain yang lebih penting	Anggaran digunakan untuk kegiatan yang kekurangan anggaran	
5.03.02.2.0 3.04				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pendidikan lanjutan bagi ASN	100	Rp330.006.000	88	Rp315.394.200	-	-	
5.03.02.2.0 4				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.03.02.2.0 4.02				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6000	Rp100.123.500	6000	Rp98.967.312	Terdapat beberapa pegawai yang belum menyusun SKP dan Evaluasi Kinerja Periodik melalui aplikasi	Memberikan sosialisasi dan selalu mendorong OPD untuk mengingatkan dan membantu Pegawai yg belum menyusun	
5.03.02.2.0 4.04				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	Rp16.150.400	300	Rp15.887.803	Terdapat 1 orang yang tidak lolos usulan di Sekretariat Militer	Koordinasi dengan instansi terkait	
5.03.02.2.0 4.07				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200	Rp85.021.400	196	Rp82.796.681	Masih banyak ASN di wilayah yang belum menerima sosialisasi peraturan terkait disiplin ASN	Menambah jumlah sosialisasi peraturan terkait disiplin khususnya di wilayah	
5.03.02.2.0 4.01				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Rp15.287.600	2	Rp15.207.600	Terbit 1 Surat Edaran Bupati Jember tentang penyusunan SKP dan pelaporan Evaluasi Kinerja Periodik, dan 1 SE Sekretaris Daerah ttg Pengisian Laporan Kinerja Harian Melalui Aplikasi SiKeren.	Mensosialisasikan secara intens kepada seluruh Perangkat Daerah	
5.03.02.2.0 4.10				Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	40	Rp38.394.500	38	Rp38.126.800	Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung	Dilakukan sidak secara rutin	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5.04.02			TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SDM APARATUR YANG KOMPETEN.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama ASN mengikuti diklat/ASN yang mengikuti diklat formal/diklat struktural							
5.04.02.2.0 1				Pengembangan Kompetensi Teknis								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
5.04.02.2.0 1.03				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400	Rp526.051.560	395	Rp476.776.256	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
5.04.02.2.0 2				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
5.04.02.2.0 2.07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	49	Rp533.492.575	49	Rp512.023.560	Perubahan anggaran dialokasikan ke sub kegiatan lain yang lebih penting	Anggaran digunakan untuk kegiatan yang kekurangan anggaran	K.6

*Keterangan: Kolom Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD berisi Kode yang mengacu pada Subbab 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.6 Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
6.01.0.00.0 .00.1..0000		INSPEKTORAT										
6	UNSUR PENGAWAS											
6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
6.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
6.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
6.01.01.2.0 1.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65	Rp157.624.000	65	Rp155.590.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
6.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	39	Rp5.945.582.521	39	Rp5.461.616.891	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 2.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp978.558.296	12	Rp792.578.530	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
6.01.01.2.0 5.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Rp79.000.000	20	Rp77.153.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 5.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	Rp420.442.000	86	Rp212.890.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Rp319.522.500	4	Rp249.300.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
6.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Rp1.335.283.024	8	Rp1.263.369.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Kebersihan, Alat Rumah Tangga Lainnya, Makanan dan Minuman, ATK	2	Rp7.655.200	2	Rp6.164.442	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp64.805.600	1	Rp57.014.800	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Rp4.500.000	12	Rp3.690.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Rp1.150.951.000	84	Rp1.022.157.623	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 6.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Rp225.442.000	12	Rp196.692.204	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6.01.01.2.0 8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp3.000.000	12	Rp551.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp28.800.000	12	Rp20.614.798	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Rp83.000.000	1	Rp81.330.208	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
6.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Rp233.000.000	16	Rp212.625.607	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Rp91.910.000	35	Rp91.153.142	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
6.01.02			MENINGKATNYA KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN OPD yang melaksanakan manajemen risiko/Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti								
6.01.02.2.0 1				Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
6.01.02.2.0 1.01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Rp110.800.000	8	Rp104.480.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.02.2.0 1.02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	Rp115.520.000	40	Rp109.145.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.02.2.0 1.07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	Rp123.011.000	3	Rp97.299.360	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.02.2.0 1.03				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	76	Rp100.000.000	75	Rp98.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.02.2.0 1.04				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	76	Rp150.000.000	76	Rp147.700.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.02.2.0 1.05				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	226	Rp369.440.000	226	Rp192.875.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
6.01.02.2.02				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
6.01.02.2.02.01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4	Rp21.140.000	0	Rp0	terhitung mulai Tw I s.d TW IV (Oktober 2023) belum ada penugasan (Tim Penyelesaian Kerugian Daerah) TPKD sehingga masih fokus pada pengawasan dan Tindaklanjuti atas hasil rekomendasi temuan tahun sebelumnya di 226 desa	Kegiatan akan dioptimalkan pada tahun berikutnya	
6.01.02.2.02.02				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	70	Rp69.440.000	70	Rp63.995.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.03			MENINGKATKAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah								
6.01.03.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								
6.01.03.2.01.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	Rp50.000.000	5	Rp49.000.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.03.2.02				Pendampingan dan Asistensi								
6.01.03.2.02.01				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	7	Rp50.000.000	7	Rp48.750.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
6.01.03.2.0 2.02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Rp62.640.000	10	Rp58.140.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.03.2.0 2.03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	Rp999.350.000	10	Rp838.465.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
6.01.03.2.0 2.04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72	Rp93.350.000	72	Rp48.800.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

3.1.7 Pelaksanaan Kewilayahan Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.0.00.0 .00.1..0000		KECAMATAN AJUNG										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Rp80.475.000	12	Rp77.520.000	Kekurangan Tenaga PPTK ,Sehingga setiap kegiatan terpusat ke satu Orang Sehingga apabila yang bersangkutan sibuk/ tidak ada dikantor masih menunggu hinnga menghambat proses adminitrasi /pekerjaan dikantor	Tahun berikutnya di upayakan ada penambahan PPTK sehingga proses adminitrasi /pekerjaan berjalan lancar	
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	Rp1.857.923.949	13	Rp1.662.110.077	Kekurangan tenaga ASN yag Menguasai IT sehingga Memimjam Banpol PP Kecamatan untuk melaksanakan Proses pengetikan Pengajuan Gaji Baik Gu Maupun LS sehingga proses Adminitrasi /Pekerjaan kurang maksimal	Diupayakan mengikuiti bimtek komputer bagi ASN Kecamatan Ajung bekerja sama dengan Bidang Diklat BKDM Kabupaten Jember	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Rp24.538.300	4	Rp19.322.150	Persediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor masih Mencukupi sehingga tidak perlu ada penambahan/belanja barang	Diupayakan belanja Peralatan Dan Perlengkapan secara Rutin sehingga ada penyerapan anggaran	
7.01.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	Rp9.116.700	3	Rp8.642.225	persediaan peralatan rumah tangga masih mencukupi sehingga tidak perlu penambahan/belanja	Diupayakan ada penambahan persediaan peralatan rumah tangga supaya penyerapan anggaran maksimal	
7.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp27.687.700	1	Rp18.156.000	Persediaan Bahan Logistik Kantor Masih Cukup sehingga tidak ada Penambahan /Belanja Barang	Di upayakan ada penambahan Persediaan Bahan Logistik Kantor supaya penyerapan anggaran maksimal	
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp7.655.800	1	Rp7.655.000	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masih Mencukupi Sehingga tidak perlu ada Penambahan/Belanja Barang	Diupayakan ada penambahan persediaan barang cetakan dan penggandaan supaya penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	1	Rp45.369.600	1	Rp30.308.829	Listrik Kurang Daya Kadang Kadang pada saat proses adminitrasi/kegiatan Kantor padam	Diupayakan ada penambahan daya listrik	
7.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	Rp11.246.600	2	Rp10.825.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Rp116.570.000	2	Rp116.570.000	-Kekurangan Tenaga ASN di Pelayanan Umum selama ini yang diberdayakan tenaga Banpol PP	Di upayakan ada penambahan tenaga ASN di pelayanan Umum	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp44.875.000	4	Rp30.860.115	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Rp0	0	Rp0	Kondisi bangunan masih bagus dan layak pakai	Diupayakan ada perbaikan /rehab ringan supaya kondisi bangunan tetap bagus dan layak pakai	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Rp23.150.000	4	Rp17.658.000	Kondisi Kendaraan Masih layak pakai cuma perlu ada servis ringan seperti ganti oli, Pembelian BBM, dll.	Di upayakan di service secara rutin supaya kendaraan kondisinya bagus dan layak pakai pada tahun berikutnya	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan								
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Rp737.250.000	2	Rp735.075.000	kegiatan kurang maksimal sehingga penyerapan anggaran masih rendah	Diupayakan ada penambahan kegiatan supaya penyerapan anggaran maksimal	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	Rp289.889.200	7	Rp102.142.500	PMKS masih kekurangan staf sehingga kasinya cenderung bekerja sendirian dan dibantu bendahara	Diupayakan ada penambahan staf di PMKS pada tahun berikutnya	
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	7	Rp3.685.000	7	Rp2.750.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.03.2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14	Rp254.689.400	14	Rp246.311.000	Diantaranya anggota banpol pp masih ada kurang menguasai it yang bisa komputer sekitar 4 orang	Diupayakan bimtek komputer khusus untuk anggota satpol pp	
7.01.05			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan							
7.01.05.2.0 1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.0.00.0 .00.10.000 0		KECAMATAN KALISAT										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah laporan yang tepat waktu	10	Rp1.117.000	7	Rp780.000	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20	Rp2.642.141.585	16	Rp1.932.818.749	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase jumlah pemenuhan operasional rutin kantor	12	Rp234.400.000	12	Rp234.400.000	Anggaran Belanja disesuaikan dengan kebutuhan pegawai	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase jumlah pemenuhan operasional rutin kantor	12	Rp323.544.326	12	Rp260.521.903	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1	Rp33.550.000	1	Rp32.470.817	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3	Rp32.990.000	3	Rp28.966.309	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana	1	Rp36.963.300	1	Rp36.786.000	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan	12	Rp763.880.000	12	Rp761.074.600	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	12	Rp5.386.000	9	Rp4.230.000	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	1	Rp7.053.000	1	Rp6.422.000	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	12	Rp100.293.800	10	Rp82.822.496	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.7.04.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase terselenggaraanya koordinasi ketertiban dan keamanan umum	12	Rp337.031.900	12	Rp325.881.585	Tidak terdapat permasalahan	Anggaran sub kegiatan sudah terserap maksimal	
7.01.0.00.0.00.11.0000		KECAMATAN KALIWATES										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Rp9.109.740.122	37	Rp6.090.010.508	sesuai dengan target realisasi	nihil	
7.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Rp117.819.100	0	Rp116.550.000	sesuai dengan target realisasi	nihil	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp798.410.000	12	Rp778.250.000	sesuai dengan perencanaan	nihil	
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp172.523.690	11	Rp139.320.215	sesuai dengan perencanaan	nihil	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp32.430.000	1	Rp29.016.910	sesuai dengan perencanaan	ninil	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Rp90.779.850	4	Rp89.306.839	nihil	nihil	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp9.548.000	5	Rp7.595.000	nihil	nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01.03.2.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Rp0	0	Rp0	tidak ada serapan sampai akhir tahun	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	
7.01.03.2.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Rp1.232.153.290	9	Rp1.158.884.600	sesuai dengan rencana	nihil	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
7.01.0.00.0.00.12.0000		KECAMATAN KENCONG										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp1.941.874.135	14	Rp1.480.612.625	Anggaran terserap	Kinerja tercapai	
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujiannerifikasi Keuangan SKPD	12	Rp69.200.000	12	Rp65.160.000	Anggaran terealisasi	Kinerja terlaksana	
7.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	1	Rp3.567.000	1	Rp3.450.000	Anggaran terealisasi di bulan September 2023 secara maksimal	target kinerja tercapai	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp2.186.200	1	Rp2.167.000	Anggaran terserap maksimal	Kinerja tercapai seluruhnya	
7.01.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Rp6.758.400	2	Rp6.672.000	Anggaran terserap maksimal	Belanja Bahan/alat menyesuaikan anggaran kas.	
7.01.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Rp13.171.600	2	Rp12.739.000	Anggaran terealisasi namun belum sepenuhnya	target kinerja tercapai.	
7.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Rp27.039.300	2	Rp26.538.300	Anggaran terealisasi namun belum maksimal	target kinerja tercapai dan terlaksana	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp9.277.000	1	Rp4.273.000	Anggaran sudah terealisasi maksimal	Target kinerja terlaksana dan tujuan tercapai	
7.01.01.2.0 6.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Rp43.501.000	9	Rp29.445.500	Anggaran terealisasi namun belum maksimal	Anggaran terealisasi tidak maksimal, namun kinerja tercapai	
7.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp51.607.600	9	Rp29.805.000	Anggaran terealisasi namun tidak maksimal	anggaran tidak maskimal, namun target kinerja tuntas.	
7.01.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Rp25.478.900	3	Rp25.050.000	Anggaran terealisasi	target kinerja terpenuhi	
7.01.01.2.0 7.05				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Rp18.560.700	1	Rp8.750.000	Anggaran terealisasi namun tidak terserap maksimal	Target kinerja terpenuhi	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp28.478.200	12	Rp21.999.564	anggaran terealisasi	target kinerja terpenuhi	
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Rp83.750.000	13	Rp83.750.000	anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp32.116.300	1	Rp28.063.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp49.201.700	1	Rp40.219.008	Kegiatan terlaksana tuntas dan anggaran terserap maksimal	target kinerja terpenuhi	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Rp28.462.000	1	Rp22.990.300	Kinerja sudah terlaksana dan anggaran terealisasi secara maksimal.	target kinerja terpenuhi	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	Rp41.902.769	2	Rp11.803.300	Anggaran terealisasi namun tidak maksimal karena ada 1 kegiatan yang dibatalkan.	kegiatan akan dianggarkan tahun berikutnya	
7.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Rp2.329.800	5	Rp2.225.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.01.2.0 9.10				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Rp3.700.590	1	Rp3.410.000	anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan								
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Rp789.215.000	5	Rp782.140.000	anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Rp1.443.000	1	Rp1.440.000	kegiatan terlaksana dan anggaran terserap maksimal	target kinerja terpenuhi	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Rp3.815.200	6	Rp3.040.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Rp83.935.000	4	Rp69.625.000	Kinerja terlaksana namun anggaran belum terserap maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
7.01.03.2.06.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Kegiatan sudah terlaksana tuntas	target kinerja terpenuhi	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 6.02				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.0 6.03				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Kinerja terlaksana tuntas dan anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.0 6.04				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.0 6.05				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.0 6.06				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	Rp8.573.000	50	Rp8.470.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 6.07				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.0 6.08				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.0 6.09				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Kegiatan terlaksana tuntas dan anggaran terealisasi.	target kinerja terpenuhi	
7.01.03.2.0 6.12				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50	Rp2.323.000	50	Rp2.220.000	Kegiatan terlaksana tuntas dan anggaran terealisasi maksimal.	target kinerja terpenuhi	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instant Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp345.978.000	12	Rp316.810.000	Kegiatan terlaksana tuntas dan anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Rp3.640.000	2	Rp3.450.000	Kegiatan terlaksana tuntas dan anggaran terealisasi maksimal	target kinerja terpenuhi	
7.01.0.00.0.00.13.0000		KECAMATAN LEDOKOMBO										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Rp2.020.258.099	16	Rp1.670.456.709	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Rp171.220.000	1	Rp170.720.000	-	-	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	Rp184.710.550	4	Rp165.274.310	-	-	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp60.331.200	1	Rp56.451.163	-	-	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Rp32.154.070	2	Rp27.235.506	-	-	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Rp91.848.269	1	Rp91.642.707	-	-	
7.01.01.2.0 6				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetatan dan penggandaan yang disediakan	1	Rp13.717.800	1	Rp8.905.000	-	-	
7.01.01.2.0 7				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan di tingkat kecamatan	4	Rp682.800.000	4	Rp681.600.000	-	-	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4	Rp6.820.000	4	Rp6.595.000	-	-	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	Rp118.740.000	1	Rp118.730.000	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.05			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan							
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH								
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/kepolisian negara RI	3	Rp268.902.100	3	Rp266.065.482	-	-	
7.01.0.00.0.00.14.0000		KECAMATAN MAYANG										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp1.999.648.143	14	Rp1.649.410.401	NIHIL	NIHIL	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Rp470.725.920	4	Rp364.587.163	NIHIL	NIHIL	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp44.134.800	1	Rp15.667.099	NIHIL	NIHIL	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp27.634.800	1	Rp9.217.800	NIHIL	NIHIL	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	Rp21.421.975	4	Rp21.421.975	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp549.840.000	12	Rp547.440.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	Rp18.680.000	6	Rp17.155.000	NIHIL	NIHIL	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp50.550.000	11	Rp30.300.000	NIHIL	NIHIL	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp376.236.900	12	Rp347.901.600	NIHIL	NIHIL	
7.01.0.00.0.00.15.0000		KECAMATAN MUMBULSARI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Rp500.000	4	Rp500.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Rp1.871.944.274	13	Rp1.498.409.568	Nihil	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp76.640.000	11	Rp76.640.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp799.596.000	12	Rp796.190.787	Tidak ada	Tidak ada	
7.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp69.701.800	12	Rp67.340.300	Tidak ada	Sudah bagus sesuai rencana	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM Kendaraan Operasional, Mobil Kendaraan Dinas Operasional lapangan yang terpelihara dan Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1	Rp49.000.000	1	Rp37.339.404	Tidak ada masalah	Tidak ada	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya	5	Rp69.809.239	4	Rp50.248.150	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	2	Rp29.100.000	2	Rp18.114.375	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Rp10.000.000	23	Rp8.873.700	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 6				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp230.230.200	12	Rp216.840.000	Nihil	Nihil	
7.01.03.2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.06			---	PROGRAM PEMBINAAN -- DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.01.06.2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase jumlah fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum	100	Rp309.071.300	95	Rp299.540.000	Belanja jasa Trantib saja yang lain sudah di cairkan dan kegiatan lancar	tidak ada	
7.01.0.00.0.00.16.0000		KECAMATAN PAKUSARI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan penyusunan dokumen perubahan RKA	6	Rp657.500	6	Rp657.500	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	Rp1.709.122.916	12	Rp1.444.708.180	pelaksanaan sesuai rencana anggaran	nihil	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	1	Rp47.540.000	1	Rp45.955.000	Pemeliharaan dilakukan sesuai rencana	nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Rp39.278.000	2	Rp31.325.000	Pelaksanaan Pemeliharaan sesuai rencana	Nihil	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Rp78.712.650	3	Rp77.643.500	pelaksanaan pemeliharaan sesuai rencana	Nihil	
7.01.01.2.0 6				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Rp135.679.600	2	Rp114.141.637	Pelaksanaan anggaran sesuai rencana	Nihil	
7.01.01.2.0 8				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	69	Rp145.410.000	69	Rp145.410.000	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Nihil	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	14	Rp470.780.000	14	Rp470.500.000	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	nihil	
7.01.02.2.0 3				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 3.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	4	Rp8.180.000	4	Rp5.200.000	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Nihil	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangumam di desa	8	Rp9.239.900	8	Rp8.506.400	Kegiatan sudah terlaksana pada bulan Februari	Nihil	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	14	Rp158.369.950	14	Rp135.334.000	-	-	
7.01.03.2.0 5				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian RI	16	Rp389.401.200	16	Rp378.510.000	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Nihil	
7.01.0.00.0.00.18.0000		KECAMATAN PATRANG										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersusun	2	Rp4.164.000	2	Rp3.452.000	Dokumen disediakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran di realisasikan sesuai dengan kebutuhan	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	
7.01.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1	Rp3.108.000	1	Rp2.452.000	Dokumen disediakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran di realisasikan sesuai dengan kebutuhan	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan pemenuhan gaji ASN	14	Rp9.348.647.727	14	Rp6.891.665.781	Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran sesuai dengan rencana	Menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan anggaran	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	4	Rp9.072.000	4	Rp5.581.000	Telah tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Rp30.426.000	6	Rp30.270.000	Kegiatan dan realisasi anggaran telah dilaksanakan pada bulan Maret dan Nopember	Realisasi kinerja dan realisasi anggaran terealisasi sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	2	Rp12.544.800	2	Rp10.327.320	Realisasi kinerja telah terpenuhi di triwulan 2 dan triwulan 3, dengan realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	
7.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp263.447.600	4	Rp222.774.100	Realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja dan anggaran di realisasikan sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan anggaran	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan air, listrik dan telepon	12	Rp153.254.808	12	Rp139.907.641	Telah tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan	Menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan anggaran	
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp1.500.954.000	12	Rp1.482.342.248	Telah tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan	Menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan anggaran	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang dipakai	1	Rp39.800.000	1	Rp38.014.600	Tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan	Menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan anggaran	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	10	Rp68.060.000	10	Rp46.429.199	Realisasi kinerja sesuai dengan target dan realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan	Menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan anggaran	
7.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Rp40.000.000	4	Rp27.660.000	Realisasi Kinerja sesuai dengan rencana dan Realisasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan	Menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan anggaran	
7.01.01.2.0 9.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Rp177.480.000	9	Rp177.263.700	Telah tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan	Telah tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan								
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan t	8	Rp2.116.773.000	8	Rp2.094.598.556	Pelaksanaan kegiatan dan realisasi kinerja menyesuaikan dengan rencana	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	12	Rp23.824.000	12	Rp20.864.000	Telah tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi PMKS	9	Rp26.457.500	9	Rp23.050.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.03.2.0 2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01.03.2.0 2.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Rp1.177.384.000	9	Rp1.174.564.000	Telah tercapai 2 realisasi kinerja dan realisasi anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.0 1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 1.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp175.171.500	12	Rp173.149.000	Telah tercapai 1 realisasi kinerja dan realisasi anggaran menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan	Selanjutnya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana	
7.01.0.00.0 .00.19.000 0		KECAMATAN PUGER										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp1.961.144.146	16	Rp1.632.385.030	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Rp4.042.600	1	Rp3.978.000	Sudah realisasi	Sudah realisasi	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp42.696.960	1	Rp39.809.235	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp36.151.812	1	Rp32.770.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Rp10.000.000	35	Rp9.980.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp60.910.921	3	Rp60.153.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 6				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	Rp113.824.807	7	Rp87.988.409	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 8				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Rp180.480.000	12	Rp171.480.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.02			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp1.086.960.000	12	Rp1.086.960.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.02.2.0 3				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 3.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan /atau intansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	12	Rp4.150.000	12	Rp2.325.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp13.120.000	12	Rp6.220.000	Sudah Realisasi	Sudah Realisasi	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp117.500.300	12	Rp95.955.300	Sudah Realisasi	Sudah Realisasi	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH								
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp422.222.600	12	Rp411.550.000	Sudah Realisasi	Sudah Realisasi	
7.01.04.2.0 1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.7.0 3.02				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Rp7.040.000	1	Rp7.040.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.0.00.0 .00.2..0000		KECAMATAN AMBULU										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp2.089.889.761	18	Rp1.735.502.224	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp96.414.500	100	Rp88.060.000	Realisasi Kinerja untuk Bulan Nopember sebanyak 23 Dokumen SPM	Kondisional	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Rp14.000.000	1	Rp8.400.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Rutin dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp226.198.300	12	Rp190.017.750	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp44.641.700	1	Rp36.507.510	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Rp24.674.000	2	Rp21.963.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	2	Rp9.520.878	2	Rp9.434.700	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 1				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Rp2.036.000	3	Rp1.250.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp87.839.900	1	Rp74.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	Rp1.031.672.500	12	Rp1.020.900.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat menyurat	10000	Rp14.691.800	10000	Rp8.982.500	Jumlah Warga Masyarakat yang terfasilitasi pengurusan surat menyurat di Bulan Desember sebanyak 786	Nihil	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	16	Rp6.718.800	16	Rp5.758.800	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	Rp136.867.000	20	Rp121.425.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24	Rp244.317.700	22	Rp237.930.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.06			---	PROGRAM PEMBINAAN -- DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.01.06.2.0 1				FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.06.2.0 1.01				Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	Rp3.988.800	3	Rp3.487.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.06.2.0 1.03				Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Rp9.453.800	3	Rp8.050.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.0.00.0 .00.20.000 0		KECAMATAN RAMBIPUJI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 Tahun Anggaran	14	Rp2.072.116.304	14	Rp1.909.958.380	Tidak Ada Masalah	-	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Honorarium Penanggungjawab Keuangan	12	Rp111.200.000	12	Rp111.200.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1	Rp3.354.000	1	Rp3.348.800	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor pengelola Keuangan, Barang dan Jasa serta Kebutuhan Penunjang Operasional Rutin Kanto ATK, Alat Listrik, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak Penggandaan dan Belanja Peralatan dan Mesin	12	Rp96.992.400	12	Rp96.540.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	12	Rp68.853.465	12	Rp63.974.075	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara/dirawat	1	Rp26.893.200	1	Rp26.134.800	Tidak Ada Masalah	Sesuai serapan	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara/dirawat	1	Rp18.488.200	1	Rp16.201.760	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara/dirawat	3	Rp0	0	Rp0	-	-	
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp5.470.700	2	Rp4.171.300	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	2	Rp22.167.900	2	Rp21.797.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai serapan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Rp96.009.228	3	Rp91.117.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai serapan	
7.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	Rp75.930.250	5	Rp74.144.901	Tidak Ada Masalah	sesuai serapan	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemenuhan Honorarium RT RW, Monitoring DD, ADD dan BGH ke Desa Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	15	Rp796.551.000	15	Rp795.175.500	Tidak Ada Masalah	Sesuai serapan	
7.01.02.2.0 4				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.0 4.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1500	Rp44.174.500	1500	Rp43.935.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai serapan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan	8	Rp7.515.800	8	Rp7.515.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai serapan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PMKS dan PKK yang dilaksanakan	12	Rp70.693.100	12	Rp69.763.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksanayan Jumlah bulan pembayaran honorarium Banpol PP , Koordinasi Penanganan Covid - 19 dan Tanggap Bencana Patroli Trantibum, Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kecamatan	12	Rp309.210.000	12	Rp124.200.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.04.7.0 3				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.7.0 3.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	Rp313.807.300	10	Rp307.850.000	Tidak Ada Masalah	Sesuai Serapan	
7.01.0.00.0 .00.21.000 0		KECAMATAN SEMBORO										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersebutnya dokumen perencanaan	2	Rp1.570.000	2	Rp1.170.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiannya gaji dan tunjangan ASN Kec. Semboro	12	Rp2.578.267.570	12	Rp1.949.784.430	Tidak terdapat permasalahan	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Alat Tulis Kantor Honorarium pengelola keuangan Lembur Makanan dan minuman rapat	12	Rp124.800.000	12	Rp120.090.000	tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	Rp779.000	1	Rp579.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan AC	3	Rp27.507.700	2	Rp24.350.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp34.950.900	1	Rp31.217.400	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ATK Honorarium non PNS Pemeliharaan peralatan kantor	12	Rp93.445.300	12	Rp91.325.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp37.476.000	12	Rp26.068.912	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas	1	Rp37.786.400	1	Rp35.284.968	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan pemeliharaan	1	Rp18.286.400	1	Rp16.700.000	Tidak terdapat permasalahan	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Luas Pengecatan gedung kantor	70	Rp42.793.000	70	Rp42.764.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Honorarium RT dan RW dan penyelenggaraan Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan	12	Rp549.850.000	12	Rp549.600.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.02.2.0 4.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Rp54.870.000	12	Rp50.750.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Honorarium non PNS Lembur PNS dan Non PNS	12	Rp64.470.000	12	Rp50.750.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan	1	Rp5.550.000	1	Rp5.550.000	Kegiatan telah terlaksana	-	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pertemuan Rutin PKK Sosialisasi dan Sosialisasi	12	Rp34.768.100	12	Rp33.795.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Honorarium Pol PP Pelaksanaan HBN	12	Rp375.451.600	12	Rp367.850.000	Tidak terdapat permasalahan	-	
7.01.0.00.0.00.22.0000		KECAMATAN SILO										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tambahan Tunjangan PNS	12	Rp2.217.809.738	12	Rp1.866.036.642	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran dan terbayarnya Honorarium Pegawai Non PNS	20	Rp93.520.000	20	Rp92.130.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp1.750.000	3	Rp700.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	1	Rp79.497.768	1	Rp74.525.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp79.497.768	1	Rp74.525.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp23.779.285	1	Rp21.534.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp5.764.500	1	Rp4.782.500	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Rp21.000.000	12	Rp15.750.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan belanja Listrik dan Rapat Koordinasi Kecamatan Silo	12	Rp84.908.000	12	Rp84.500.000	Nihil	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp26.574.000	12	Rp21.111.540	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Camat	1	Rp35.500.000	1	Rp33.579.930	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional kecamatan	3	Rp27.000.000	3	Rp19.215.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp33.801.500	1	Rp33.246.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Rp27.152.400	20	Rp11.420.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Rp2.800.000	8	Rp2.550.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Rp1.200.000	11	Rp700.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Rp31.500.000	1	Rp23.800.000	Nihil	Nihil	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terbayarnya Honor RT RW se Kecamatan Silo dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	12	Rp995.100.000	12	Rp993.640.000	-	-	
7.01.02.2.0 4				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.0 4.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Rp55.306.000	12	Rp45.500.000	Nihil	Nihil	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Penurunan AKI AKB dan Stunting di Kecamatan Silo dan Terlaksananya Kegiatan PKK	8	Rp72.789.300	7	Rp53.527.500	Nihil	Nihil	
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	Rp8.100.000	20	Rp8.100.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.03.2.0 2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terbayarnya honorarium Banpol PP dan terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pandemi Covid 19	12	Rp359.689.800	12	Rp343.985.500	Nihil	Nihil	
7.01.04.2.0 4				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.0.00.0 .00.23.000 0		KECAMATAN SUKORAMBI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13	Rp1.759.400.697	13	Rp1.698.409.120	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	Rp398.208.908	4	Rp390.564.272	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp35.502.000	1	Rp33.752.000	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp24.500.000	1	Rp23.499.980	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.06				Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	Rp413.006.000	1	Rp411.823.000	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.01				Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	jml dokumen perencanaan keg pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	4	Rp6.518.400	4	Rp6.512.400	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah dalam pembangunan di desa	5	Rp6.798.400	5	Rp6.773.400	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp76.818.000	12	Rp76.135.000	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian negara kesatuan RI	4	Rp363.045.400	4	Rp359.875.000	Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.0.00.0 .00.24.000 0		KECAMATAN SUKOWONO										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25	Rp2.485.011.087	20	Rp2.072.141.607	Tidak ada masalah	Nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan Sukowono	20	Rp110.440.000	11	Rp106.360.000	Tidak ada masalah	Tertib administrasi	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp138.230.054	12	Rp117.436.500	Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Tertib adminstrasi	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp37.406.800	1	Rp37.338.500	Realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan	Tertib adminstrasi	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	Rp31.481.200	3	Rp31.445.000	Realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan	Tertib adminstrasi	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya hak untuk RT dan RW tingkat Kecamatan	1	Rp654.315.900	1	Rp643.200.000	Realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang ada	Tertib adminstrasi	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	Rp45.500.000	1	Rp45.500.000	Realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang ada	Tertib administrasi	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	12	Rp4.926.500	12	Rp4.650.000	Realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang ada	Tertib administrasi	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp184.280.400	9	Rp161.069.500	Realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanaka	Tertib administrasi	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan atau kepolisian negara RI	12	Rp309.704.000	10	Rp306.360.000	Realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan	Tertib adminstrasi	
7.01.0.00.0 .00.25.000 0		KECAMATAN SUMBERBARU										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS	14	Rp2.412.947.304	14	Rp1.607.695.661	-	-	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor	100	Rp37.197.100	90	Rp27.420.000	-	-	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor	5	Rp223.954.000	5	Rp191.030.000	-	-	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Layak Pakai	1	Rp40.600.000	1	Rp39.100.000	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Layak pakai	3	Rp39.650.000	3	Rp33.205.000	-	-	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dirawat	8	Rp10.200.000	8	Rp7.798.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rakor Tingkat Kecamatan	10	Rp945.540.000	5	Rp924.600.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Rakor Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos (Musrenbang dan Kegiatan)	8	Rp7.300.000	8	Rp5.500.000	-	-	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesos (musrenbang dan kegiatan PKK)	6	Rp59.790.000	6	Rp37.112.500	-	-	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 4				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Bulan terlaksananya pengamanan ketertiban umum	100	Rp392.874.800	100	Rp363.442.800	-	-	
7.01.0.00.0 .00.26.000 0		KECAMATAN SUMBERJAMBE										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp1.900.060.024	12	Rp1.473.881.605	Plafon anggaran terlalu tinggi	Plafon ditetapkan secara ideal akurat dan tepat	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230	Rp102.832.000	228	Rp100.812.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Percepatan peningkatan capaian kinerja dan anggaran	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1	Rp37.097.800	1	Rp31.988.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Percepatan proses pengadaan barang	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Rp217.962.300	59	Rp194.665.120	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Plafon ditetapkan secara ideal akurat dan tepat	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp62.534.000	1	Rp52.300.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Plafon ditetapkan secara ideal akurat dan tepat	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Rp47.825.000	2	Rp38.250.408	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Plafon ditetapkan secara ideal akurat dan tepat	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18	Rp685.360.000	18	Rp675.420.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Plafon ditetapkan secara ideal akurat dan tepat	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp42.178.000	12	Rp39.212.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Plafon ditetapkan secara ideal akurat dan tepat	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6	Rp3.685.000	6	Rp3.350.000	Kegiatan telah dilaksanakan sehingga tidak ada aktivitas lagi	Merencanakan pada sub kegiatan tersebut agar berlangsung setiap bulan/Triwulan	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp218.224.100	12	Rp130.350.000	Pembagian bantuan kegiatan problem tumbuh kembang masih menunggu barang PMT	Memerintahkan PPTK agar berkoordinasi dengan penyedia barang kendala apa yang dihadapi	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp292.156.000	12	Rp289.376.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.0.00.0.00.27.0000		KECAMATAN SUMBERSARI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9	Rp2.701.800	9	Rp2.668.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64	Rp9.448.434.511	64	Rp6.615.820.390	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercukupinya Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	9	Rp2.802.600	9	Rp2.776.750	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Rp1.842.832.048	12	Rp1.806.564.439	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dinbayarkan pajaknya	1	Rp34.495.000	1	Rp33.687.808	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasioanal Kantor	9	Rp39.911.500	9	Rp36.188.767	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaan Bagunan Gedung Kantor	8	Rp10.011.200	8	Rp10.011.200	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	nihil	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	Rp2.836.664.914	12	Rp2.808.987.136	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp107.710.360	12	Rp107.240.450	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Di adakanya musrenbang antar kelurahan dan kecamatan	12	Rp51.856.000	12	Rp51.747.500	nihil	nihil	
7.01.03.2.0 2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01.03.2.0 2.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Di adakanya musrenbang anatar kelurahan dan kecamatan serta rakor / kegiatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (PKK) AKI/AKB Stunting yang difasilitasi	12	Rp1.052.941.114	12	Rp1.027.712.300	nihil	nihil	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/ ataun kepolisian negara republik indonesia	12	Rp217.948.000	12	Rp216.971.000	nihil	nihil	
7.01.05			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan							
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.0.00.00.00.28.0000		KECAMATAN TANGGUL										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terselesaikannya dokumen perencanaan dan keuangan	8	Rp2.325.500	8	Rp2.269.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan	
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran gaji asn	21	Rp2.830.285.334	19	Rp2.214.832.307	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya honor asn dan non asn dalam 1 tahun	12	Rp63.650.000	12	Rp61.630.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas ASN	3	Rp22.196.300	3	Rp22.196.300	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	1	Rp113.003.900	1	Rp112.230.850	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak /banner dan penggandaan (fotocopy)	1	Rp4.624.500	1	Rp4.612.100	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Rp6.454.600	1	Rp3.097.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan wifi, dalam satu tahun	12	Rp36.276.000	12	Rp34.591.903	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan alat rumah tangga	1	Rp16.465.200	1	Rp16.424.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya alat tulis kantor , jasa kebersihan , makan minum pegawai dalam satu tahun	3	Rp147.329.000	3	Rp147.212.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan dan bhm mobil dinas	1	Rp42.140.000	1	Rp37.226.600	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersediannya pemeliharaan rutin dan bhm mobil operasional	1	Rp28.000.000	1	Rp26.871.400	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	1	Rp55.444.950	1	Rp54.543.419	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya rakor tingkat kecamatan dan Honor RT/RW Kecamatan Tanggul	8	Rp765.580.000	8	Rp764.380.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat	6	Rp13.760.000	6	Rp13.760.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya kegiatan musrenbang	6	Rp6.980.000	6	Rp6.980.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya pertemuan rutin pkk dan pokja tingkat kecamatan, tersedianya honor Full timer dan pembelian bahan lainnya untuk pengkulangan Covid 19	12	Rp61.476.000	11	Rp59.340.400	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.0				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	tersedianya honor banpol dan kegiatan mobiling polpp	6	Rp441.129.400	6	Rp432.692.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan	
7.01.0.00.0		KECAMATAN TEMPUREJO										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	15	Rp1.704.404.006	13	Rp1.352.262.649	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.01.2.0				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12	Rp115.200.000	8	Rp112.380.000	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.01.2.0				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor	12	Rp156.434.101	11	Rp126.302.671	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan ndinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp52.000.000	1	Rp41.156.930	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	2	Rp26.850.000	2	Rp22.575.800	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.01.2.0 5				Administrasi kepegawaian perangkat daerah								
7.01.01.2.0 5.02				pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	30	Rp58.843.700	30	Rp44.227.500	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan								
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	Rp718.500.000	11	Rp700.690.000	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp128.644.500	10	Rp125.791.500	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	2	Rp6.700.000	2	Rp6.700.000	Nihil	Sudah terlaksana sesuai anggaran	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp68.240.000	9	Rp46.540.000	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan laporan perundang undangan dan atau kepolisian RI	12	Rp364.357.100	11	Rp359.230.000	Nihil	Terlaksana sesuai anggaran	
7.01.0.00.0 .00.3..0000		KECAMATAN ARJASA										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji PNS dan TPP PNS Kec Arjasa	17	Rp2.222.215.005	17	Rp1.792.589.381	-	-	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12	Rp423.090.658	12	Rp387.621.372	-	-	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1	Rp45.195.600	1	Rp40.887.000	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	3	Rp43.121.000	3	Rp28.944.400	-	-	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp152.262.700	1	Rp119.975.000	-	-	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya HONOR RT/RW	12	Rp387.600.000	12	Rp386.800.000	-	-	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	penurunan AKI,AKB,Stunting, covid 19, terbantunya dampak bencana dan PKK	29	Rp42.660.000	29	Rp40.070.000	-	-	
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan	1	Rp4.500.000	1	Rp4.500.000	-	-	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terbayarnya Honor Banpol PP	12	Rp264.245.000	12	Rp262.960.000	-	-	
7.01.0.00.0 .00.30.000 0		KECAMATAN UMBULSARI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	Rp2.998.639.891	22	Rp2.249.723.866	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Rp1.007.519.745	12	Rp992.911.211	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Rp41.572.150	2	Rp40.143.657	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Rp10.000.000	2	Rp9.600.000	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Rp11.236.739	1	Rp11.143.920	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 7				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkay kecamatan	50	Rp21.720.000	45	Rp18.483.200	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10	Rp79.400.000	10	Rp64.711.450	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5	Rp10.560.000	5	Rp9.240.000	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian negara repiblik indonesia	10	Rp50.560.000	10	Rp41.560.000	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
7.01.0.00.0 .00.31.000 0		KECAMATAN WULUHAN										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Rp1.975.689.210	15	Rp1.618.284.335	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	12	Rp111.840.000	12	Rp81.540.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	Rp289.837.200	13	Rp284.217.224	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp43.096.494	1	Rp42.898.070	Tuntas	Tuntas	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	Rp46.086.606	3	Rp45.153.000	Tuntas	Tuntas	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Rp24.282.000	1	Rp24.282.000	Tuntas	Tuntas	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Rp34.872.500	1	Rp33.800.000	Tuntas	Tuntas	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13	Rp1.027.561.600	13	Rp1.025.540.000	Tuntas	Tuntas	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp5.880.400	12	Rp5.760.400	Tuntas	Tuntas	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23	Rp124.011.600	23	Rp121.391.900	Tuntas	Tuntas	
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Rp5.280.000	6	Rp5.280.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Sudah terlaksana sesuai anggaran	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27	Rp284.051.600	27	Rp278.167.000	Tuntas	Tuntas	
7.01.0.00.0 .00.32.000 0		KECAMATAN PANTI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp79.320.000	10	Rp79.320.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	22	Rp3.006.501.068	20	Rp2.169.528.315	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp872.777.050	12	Rp862.011.673	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Rp37.500.000	1	Rp35.043.600	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peizinnannya	4	Rp22.040.000	4	Rp17.207.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp15.000.000	5	Rp15.000.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Rp85.858.250	1	Rp77.529.250	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp8.610.000	10	Rp8.595.000	Tidak ada	Tidak ada	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Rp118.635.000	5	Rp116.800.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	Rp10.988.000	8	Rp7.384.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp342.053.100	12	Rp340.136.000	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
7.01.06			---	PROGRAM PEMBINAAN -- DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.01.06.2.0 1				FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.01.0.00.0 .00.4..0000		KECAMATAN BALUNG										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp2.366.993.166	18	Rp2.190.925.902	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	12	Rp107.600.000	12	Rp99.520.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	30	Rp29.700.000	30	Rp29.160.000	Proses selesai	selesai	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Rp74.444.800	1	Rp72.954.500	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp20.952.000	1	Rp20.730.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp8.967.600	1	Rp8.912.500	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp16.328.500	1	Rp15.680.500	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Rp34.044.000	12	Rp30.600.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	12	Rp59.698.925	12	Rp49.009.800	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	Rp10.761.600	4	Rp10.550.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp26.561.400	1	Rp25.841.800	Proses selesai	Selesai	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	Rp29.646.400	3	Rp29.631.875	Proses selesai	Selesai	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp79.681.150	3	Rp73.545.315	Proses selesai	Selesai	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15	Rp567.678.400	15	Rp567.200.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10000	Rp53.870.000	6587	Rp53.400.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.0 1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Rp6.185.600	5	Rp5.560.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	Rp117.136.000	9	Rp114.230.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.7.0 4.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13	Rp287.792.000	13	Rp278.000.000	Proses selesai	Selesai	
7.01.04.2.0 1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.0 1.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Rp44.000	0	Rp0	Kegiatan tidak terlaksana, karena digeser ke subkegiatan lainnya yang lebih prioritas	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan teknis kegiatan yang telah disusun	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.0.00.0 .00.5..0000		KECAMATAN BANGSALSARI										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	Rp2.116.048.547	17	Rp1.948.994.022	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	Rp234.090.000	13	Rp234.056.000	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	Rp256.785.700	50	Rp223.598.644	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp38.500.000	1	Rp36.312.000	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Rp21.500.000	1	Rp20.531.300	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp39.770.000	1	Rp37.375.000	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	822	Rp1.017.116.000	822	Rp997.107.200	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target. Akan tetapi ada beberapa kendala terkait masalah penerima honor / RT/RW yang berganti atau meninggal, sehingga kegiatan tidak bisa terserap 100%.	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp21.633.800	12	Rp21.208.000	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Rp8.375.000	5	Rp7.084.000	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp6.000.000	12	Rp2.900.000	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.03.2.06				PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN								
7.01.03.2.06.06				PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12	Rp23.400.000	12	Rp23.040.000	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.0				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13	Rp337.970.000	13	Rp329.560.960	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan/target	Berusaha memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya	
7.01.0.00.0.00.6.0000		KECAMATAN GUMUKMAS										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp2.203.293.098	16	Rp1.931.113.612	-	-	
7.01.01.2.0				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp117.090.000	12	Rp117.090.000	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp546.400	1	Rp444.600	-	-	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar kantor yang disediakan	12	Rp88.020.000	12	Rp83.797.990	-	-	
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp54.135.500	12	Rp47.367.759	-	-	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp37.174.600	1	Rp32.426.800	-	-	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Rp34.457.700	2	Rp28.381.100	-	-	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1	Rp126.011.250	1	Rp124.008.123	-	-	
7.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Rp15.532.800	30	Rp10.037.650	-	-	
7.01.01.2.0 5				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Rp15.000.000	1	Rp14.250.000	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp1.310.000	5	Rp1.193.400	-	-	
7.01.01.2.0 1.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp447.900	1	Rp359.400	-	-	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	1	Rp3.317.400	1	Rp3.079.200	-	-	
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp19.481.100	1	Rp17.815.400	-	-	
7.01.01.2.0 6.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp11.562.250	1	Rp10.331.000	-	-	
7.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp4.024.400	1	Rp2.387.700	-	-	
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp3.560.200	1	Rp3.026.700	-	-	
7.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp45.524.000	12	Rp25.858.375	-	-	
7.01.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.0 7.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Rp10.039.600	7	Rp9.712.000	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp734.400.000	12	Rp732.700.000	-	-	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp5.498.400	12	Rp5.496.000	-	-	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp5.296.800	12	Rp5.146.800	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaak Pembangunan di Desa	8	Rp53.488.200	8	Rp47.586.200	-	-	
7.01.03.2.0 6				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
7.01.03.2.0 6.02				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Desa dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10	Rp36.738.400	10	Rp32.969.400	-	-	
7.01.05			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan							
7.01.05.2.0 1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.0 1.08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	Rp14.887.200	6	Rp14.481.000	-	-	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.04				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN QANUN DAN PERATURAN KEPALA DAERAH								
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi/ sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perubdang undangan dan kepolisian negara republik indonesia	12	Rp326.241.300	12	Rp322.620.000	-	-	
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp6.489.200	12	Rp4.598.000	-	-	
7.01.0.00.0.00.7..0000		KECAMATAN JELBUK										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15	Rp2.175.267.539	15	Rp1.741.229.876	-	-	
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JUmlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verivikasi keuangan keuangan	100	Rp277.316.100	100	Rp262.013.205	-	-	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Rp23.164.300	10	Rp20.111.000	-	-	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	Rp9.499.900	1	Rp9.061.000	-	-	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bibayarkan pajaknya	1	Rp43.436.400	1	Rp38.890.000	-	-	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.0 1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.0 1.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	Rp366.560.000	1	Rp360.860.000	-	-	
7.01.02.2.0 2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.0 2.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilyah kecamatan	1	Rp6.464.000	1	Rp6.424.800	-	-	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4	Rp327.433.350	4	Rp312.490.700	-	-	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan							
7.01.04.2.02				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH								
7.01.04.2.02				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan /atau kepolisian negara Republik Indonesia	12	Rp251.432.600	12	Rp239.985.900	-	-	
7.01.0.00.0.00.8..0000		KECAMATAN JENGGAWAH										

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Rp6.160.000	8	Rp3.360.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
7.01.01.2.0				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp2.057.140.973	14	Rp1.521.297.703	Terdapat Kekosongan Jabatan Struktural Dan Fungsional	Mengajukan Kebutuhan Pegawai	
7.01.01.2.0				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	13	Rp163.610.000	13	Rp163.610.000	Tidak Ada	Tidak Ada	
7.01.01.2.0				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp264.720.862	12	Rp231.532.833	Tidak Ada	Tidak Ada	
7.01.01.2.0				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp32.855.900	1	Rp26.024.370	Tidak Ada	Tidak Ada	
7.01.01.2.0				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp14.670.600	1	Rp11.790.000	Tidak Ada	Tidak Ada	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	Rp766.280.000	8	Rp764.040.000	Tidak Ada	Tidak Ada	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Rp37.019.200	5	Rp32.484.000	Tidak Ada	Tidak Ada	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	Rp6.160.000	8	Rp6.160.000	Tidak Ada	Tidak Ada	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Rp98.760.000	5	Rp89.233.560	Tidak Ada	Tidak Ada	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.7.0 4.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7	Rp391.793.500	7	Rp372.106.500	Tidak Ada	Tidak Ada	
7.01.0.00.0 .00.9..0000		KECAMATAN JOMBANG										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	18	Rp1.731.468.142	12	Rp1.566.177.343	Nihil	Kinerja tahun 2024 asn ditingkatkan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Rp110.030.000	12	Rp109.150.000	Nihil	Kinerja ASN lebih ditingkatkan	
7.01.01.2.0 2.05				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun	1	Rp250.000	1	Rp250.000	Nihil	Kinerja ASN ditingkatkan	
7.01.01.2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 5.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Rp32.500.000	1	Rp32.500.000	Nihil	Kinerja ASN ditingkatkan	
7.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 6.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp17.125.700	1	Rp16.008.450	Nihil	Kinerja ASN ditingkatkan	
7.01.01.2.0 6.01				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Rp4.041.000	1	Rp3.965.000	Nihil	Kinerja ditingkatkan	
7.01.01.2.0 6.03				Penyedia peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Rp25.683.300	1	Rp25.552.805	Nihil	Kinerja ditingkatkan	
7.01.01.2.0 6.04				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Rp2.983.200	1	Rp2.983.200	Nihil	Kinerja ditingkatkan	
7.01.01.2.0 6.05				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1	Rp1.476.000	1	Rp1.476.000	Nihil	Kinerja ASN ditingkatkan	
7.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Rp77.838.000	12	Rp75.941.336	Nihil	Kinerja ASN ditingkatkan	
7.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Rp56.880.000	4	Rp55.739.207	NIHIL	Meningkatnya Kinerja ASN	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp33.049.785	12	Rp32.975.940	Nihil	Kinerja ditingkatkan	
7.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Rp63.908.500	1	Rp55.350.285	NIHIL	Meningkatnya Kinerja ASN	
7.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	2	Rp26.966.200	2	Rp26.782.450	NIHIL	Meningkatnya Kinerja ASN	
7.01.01.2.0 9.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung, kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Rp81.958.200	1	Rp81.614.150	NIHIL	Meningkatnya Kinerja ASN	
7.01.01.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.0 1.01				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Rp258.000	5	Rp250.000	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	
7.01.01.2.0 1.06				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1	Rp250.000	1	Rp250.000	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	
7.01.01.2.0 7				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
7.01.01.2.0 7.06				Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	Rp45.220.500	1	Rp41.302.200	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	Rp644.400.000	12	Rp644.400.000	NIHIL	Meningkatnya Kinerja ASN	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp5.423.800	12	Rp5.390.000	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	8	Rp4.272.600	8	Rp4.272.600	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.03.2.0 1.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12	Rp9.275.000	12	Rp9.234.000	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	
7.01.03.2.0 6				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan								
7.01.03.2.0 6.02				Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	jumlah keluarga dalam peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	10	Rp34.780.000	10	Rp34.780.000	Nihil	Kinerja ASN ditingkatkan	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7.01.04.2.0 2				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.0 2.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/ atau kepolisian negara Republik indonesia	12	Rp362.400.000	12	Rp358.800.000	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	
7.01.04.2.0 7				Koordinasi upaya pennyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
7.01.04.2.0 2.01				sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia vertikal di wilayah kecamatan	jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia vertikal di wilayah kecamatan	12	Rp362.400.000	12	Rp358.800.000	NIHIL	Kinerja ditingkatkan	

3.1.8 Pelaksanaan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
8.01.0.00.0 .00.1..0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8.01.01			--	PROGRAM PENUNJANG --- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
8.01.01.2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
8.01.01.2.0 2.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp3.198.815.577	100	Rp2.786.964.151	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 2.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp555.110.000	100	Rp509.186.980	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
8.01.01.2.0 6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	Rp10.566.200	100	Rp8.724.178	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 6.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Rp145.806.200	100	Rp141.828.450	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 6.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Rp26.768.200	100	Rp19.066.850	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 6.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	Rp4.200.000	100	Rp2.905.000	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 6.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp289.210.000	100	Rp170.008.116	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
8.01.01.2.0 6.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Rp18.040.000	100	Rp10.192.400	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8.01.01.2.0 8.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Rp112.605.000	100	Rp67.983.775	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 8.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Rp4.768.200	99	Rp4.767.020	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 8.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Rp117.122.600	100	Rp95.951.241	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8.01.01.2.0 9.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	Rp78.771.200	100	Rp72.295.740	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 9.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Rp152.729.200	100	Rp136.055.470	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 9.09				pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	Rp117.358.564	100	Rp117.273.470	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 9.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Rp25.000.000	20	Rp24.900.000	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
8.01.01.2.0 7.06				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakanterpenuhinya peralatan kantor	100	Rp207.769.900	99	Rp206.898.925	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.01.2.0 7.05				Pengadaan Mebel	Indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Rp35.500.000	92	Rp35.399.600	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.02			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan								
8.01.02.2.0 1				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
8.01.02.2.0 1.02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Yang Disusun	100	Rp1.714.894.500	100	Rp1.608.041.250	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.03			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Terlaksananya peningkatan peran partai politik								
8.01.03.2.0 1				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
8.01.03.2.0 1.02				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan	100	Rp65.535.486.647	100	Rp65.273.535.947	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.04			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan ormas								
8.01.04.2.0 1				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
8.01.04.2.0 1.03				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	100	Rp8.000.000	0	Rp0	ada efisiensi anggaran	agar dianggarkan pada tahun berikutnya	
8.01.05			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan esosbud								
8.01.05.2.0 1				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
8.01.05.2.0 1.01				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	100	Rp437.010.500	95	Rp389.268.925	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	
8.01.06			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional							
8.01.06.2.0 1				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
8.01.06.2.0 1.04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	100	Rp491.977.600	100	Rp449.991.950	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)			
8.01.06.2.0 1.05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	100	Rp713.801.000	100	Rp186.751.850	Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan anggaran	



3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2023

Kebijakan kepala daerah dan keputusan a dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Tahun 2023 dituangkan dalam tabel berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Sebagai upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah
2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah	- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) - Peraturan Menteri Negara Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk meningkatkan Kesehatan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752); - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 375) - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penglolaan Sampah Regional (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 7)	
3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Keadaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323	Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022
4	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)	Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023
5	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2023	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Memperhatikan kondisi keuangan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember untuk kebutuhan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember		operasional yang belum optimal maka diperlukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jember guna memulihkan kondisi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember
6	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799)	Penetapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024
7	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember	Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
8	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada ASN yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan ASN
9	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Mengakomodir perubahan atas pelaksanaan APBD Tahun 2023



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
10	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordnator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
11	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordnator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
12	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordnator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember		penyederhanaan birokrasi
13	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
14	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
15	Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
16	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
17	Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
18	Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	untuk Penyederhanaan Birokrasi	penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
19	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
20	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
21	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember	untuk Penyederhanaan Birokrasi	penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
22	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
23	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
24	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
25	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
26	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jember		penyederhanaan birokrasi
27	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
28	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Olahraga Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
29	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember		pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
30	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordnator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
31	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordnator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
32	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordnator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember		pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
33	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
34	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
35	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	untuk Penyederhanaan Birokrasi	penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
36	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
37	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Jember		
38	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
39	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
40	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Balung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember		pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
41	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordnator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
42	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
43	Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara	Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember		
44	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021	Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021
45	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Jember tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dimana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah
46	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji	Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke 13 Kepada Aparatur	Memberikan kepastian terkait petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023	
47	Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Permen PANRB No 7 tahun 2022 tentang sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi MCP KPK dimana pemisahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari Bagian Administrasi Pembangunan
48	Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	- Memberikan dasar hukum sebagai pedoman pemberian remunerasi pada BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
49	Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tentang Nomor	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitna



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	12 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022-2024		pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
50	Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika	Mewujudkan kegiatan dinas dalam melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan
51	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi pada BLUD RSD
52	Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata	Sebagai dasar dan pedoman pembangunan Kabupaten Jember tahun 2024



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
53	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Sebagai dasar dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2024



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
54	Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan	Sebagai dasar dan pedoman dalam mengakomodir perubahan rencana pembangunan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
55	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program “J Berteman” Di Kabupaten Jember	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program J Berteman sebagai upaya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan
56	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kelas Jabatan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah	Sebagai acuan dalam penyusunan formasi, system karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta penggajian
58	Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penyesuaian lembaga perangkat daerah dengan struktur organisasi yang sesuai dengan kebijakan penyederhanaan organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan ketentuan sistem kerja ASN untuk



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		penyederhanaan birokrasi
59	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
60	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting	Percepatan penurunan stunting yang terintegrasi sampai tingkat pemerintah desa
61	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Mengakomodir atas pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2023



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
62	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Menetapkan mekanisme penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
63	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	- Perpres No 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Publik - PermenPANRB No 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan Publik dengan penyediaan layanan terpadu baik layanan yang disediakan instansi di Lingkup Pemkab dan instansi vertikal lainnya, pada suatu tempat
64	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Analisa Standar Belanja Dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Fisik Konstruksi	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024		pengukuran belanja kegiatan yangn berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah
65	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Acuan nilai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
66	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Acuan nilai dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
67	Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sebagai pedoman pelaksanaan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah sesuai standar Peraturan Perundang-undangan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
68	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Mengakomodir atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
66	Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/189/1.2/2023 tentang Pencabutan 29 (Dua Puluh Sembilan) Keputusan Bupati Jember Tahun 2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Kabupaten Jember	Permen PANRB no 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Penghapusan pengaturan terkait sub koordinator bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dikarenakan telah terbitnya pedoman tentang sistem kerja baru bagi ASN untuk penyederhanaan birokrasi
67	Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/98/1.12/2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Jember Tahun 2023.	PermenPANRB no 9 tahun 2023 tentang Evaluasi RB	Dalam rangka pelaksanaan tahapan evaluasi implementasi reformasi Birokrasi pemerintah daerah



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
68	Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/309/1.12/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (TPI JFAK) pada Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023.	Keputusan Kepala Lembaga Administrasi negara nomor 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jabatan fungsional analisis kebijakandan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional analisis kebijakan	Pembentukan tim dilakukan dalam rangka penetapan angka kredit 25% bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
69	Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/396/1.12/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023.	PermenPANRB no 9 tahun 2023 tentang Evaluasi RB	Dalam rangka sinergitas dan efektivitas pelaksanaan rencana kerja RB Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
70	Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/593/1.12/2023 tentang Top Inovasi Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Jember Tahun 2023.	PermenPANRB nomor no 7 tahun 2021 tentang Kompetisi Pelayanan PublikKementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Basan Usaha Milik Daerah	Dalam rangka pembudayaan inovasi pada perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember, yang diharapkan menghasilkan pelayanan publik yang efektif, efisien
71	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/591/1.12/2023 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember	Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Mengoptimalkan Pelaksanakan Penanggulangan Bencana
72	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/515/1.12/2023 tentang tim pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Mengoptimalkan Pelaksanakan Penanganan Pasca Bencana



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
73	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/168/1.12/2023 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Memberikan arah tugas, wewenang dan tata cara kerja PPID
74	Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas melakukan kemitraan dengan pemangku	Mewujudkan kegiatan Dinas dalam melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		kepentingan	
75	Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/549/1.12/2023 tentang penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pedagang keliling di Kabupaten Jember	Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023	Memberikan perlindungan sosial terhadap pelaku usaha / UMKM dengan asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
76	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/186/1.12/2023 tentang Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023	Permendagri No 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pasal 14 ayat (4)	Sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan serta menjelaskan tugas dari Tim dimaksud agar pelaksanaannya efektif, profesional dan akuntabel
77	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/184/1.12/2023 tentang Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan	Permendagri No 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan serta menjelaskan tugas dari Tim Penilai dimaksud agar pelaksanaannya efektif, profesional dan akuntabel



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
78	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/185/1.12/2023 tentang Tim Penilai Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tahun 2023	Permendagri No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan serta menjelaskan tugas dari Tim Penilai dimaksud agar pelaksanaannya efektif, profesional dan akuntabel
79	Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/204/1.12/2023 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa	Perbup Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
80	Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/209/1.12/2023 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa	Peraturan Bupati Jember Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu menetapkan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Tahun Anggaran 2023		Desa TA. 2023
81	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/494/1.12/2023 tentang Uji Coba Sistem Satu Arah Pada Kawasan Kampus	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta keselamatan berlalu lintas dengan optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan kampus. (SSA Area Kampus)
82	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/144/1.12/2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Melaksanakan tindak lanjut terkait penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
83	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/103/1.12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Operasional kendaraan Khusus	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan	Pengenalan Wisata dan Perkembangan Wilayah Kabupaten Jember dan Menekan Inflasi di bawah Standart Nasional (Bus Wisata/ City Tour dan Bus Kawasan)



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Dalam Trayek dan, Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 108 Tahun 1996 Tentang Pengoperasian Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember	
84	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/235/1.12/2023 tentang Rencana Tata Tanam Global Pada Daerah Irigasi Wilayah Pemerintah Kabupaten Jember PeriodeTahun 2022-2023	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;	Menetapkan Rencana Tata Tanam Global Daerah Irigasi di Wilayah Administrasi Kabupaten Jember



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan	



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
85	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ 451/ 1.12/2023 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan untuk Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/ 2021 Tahun 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau 2. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian perlindungan dasar Jamsostek yang optimal untuk buruh tani tembakau di KabupatenJember
86	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/294/1.12/2022 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Memberikan Pedoman Standar Satuan Harga yang diperlukan OPD di KabupatenJember



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
87	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/326/1.12/2022 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (ASB), Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Memberikan Pedoman Standar Belanja, Harga Satuan Pekerjaan yang diperlukan OPD di Kabupaten Jember
88	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/283/1.12/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Jember Tahun 2023	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Memberikan Pedoman Perencanaan Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperlukan OPD di Kabupaten Jember
89	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/480/1.12/2022 Tahun 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil	Memberikan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam rangka Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jember
90	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ 603 / 1.12/ 2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/763/KPTS/ 013.2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024	Menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024
91	Keputusan Bupati No 88.45/137 /1.12/2023 tentang tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2023	- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi	Melakukan Upaya Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Jember



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota	
92	Keputusan Bupati No 188.45/214 /1.12/2023 Tentang komisi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi Kabupaten Jember tahun anggaran 2023	- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian - Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/565/1.12/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	Melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi dan pestisida bersubsidi sesuai 6 tepat yaitu : Tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga yang layak



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	
93	Keputusan Bupati Jember tanggal 30 Maret 2023 Nomor: 188.45/219/1.12/2023 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
93	Keputusan Bupati tanggal 21 September 2023 Nomor: 188.45/466/1.12/2023 tentang Pejabat <i>Project Implementation Unit</i> , Tim Pengawas Verifikasi dan	Surat Edaran Nomor: 25/SE/Dc/2023 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah	Mengkoordinasikan dan verifikasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Jember



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan	Air Minum.	
94	Keputusan Bupati tanggal 3 April 2023 Nomor: 188,45/235/1.12/2023 tentang Rencana Tata Tanam Global pada Daerah Irigasi Wilayah Pemerintah Kabupaten Jember Periode Tahun 2022 -2023	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/1000/KPTS/013/2022 tentang Rencana Tata Tanam Global pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2023	Pemanfaatan air irigasi secara efisien dan efektif guna Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air
95	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/449/1.12/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/430/1.12/2021 tentang Forum Corporate Social Responsibility / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan	Memberikan kepastian hukum dan arahan dalam pelaksanaan program tanggungjawab social perusahaan dan lingkungan di Kabupaten Jember



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
96	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/279/1.12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis J-PASTI KUEREN Bagi Penduduk Kabupaten Jember	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	- Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan - Meningkatkan capaian UHC Kabupaten Jember
97	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/259/1.12/2023 tentang Tim Penguji Uji Kompetensi dan Tim	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2023 Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/258/1.12/2023 tentang Tim Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Hasil pemetaan / perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di KabupatenJember
98	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/258/1.12/2023 tentang Tim Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Makanan Tahun Anggaran 2023	- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi	- Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan produksi dan peredaran makanan dan minuman IRT di Kabupaten Jember sesuai standar



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Rumah Makan dan Restoran - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Jasa boga	
99	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/227/1.12/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember	- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi	- Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif - Tim Pelaksana percepatan penurunan stunting - Pembagian tugas pada setiap anggota tim berdasarkan tupoksi dan kewenangan masing-masing OPD/Instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penurunan stunting
100	Surat Edaran Bupati Jember Nomor :800/572/414/2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Tahun 2022 dan 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Pengajuan Kerja dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja	Memberikan Arahan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Tahun 2022 dan 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Pegawai Negeri Sipil	
101	Surat Edaran Bupati Jember Nomor :800/6629/414/2023 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai Melalui Aplikasi J-Silakon SKP ASN Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Surat Edaran Bupati Jember Nomor :800/572/414/2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Tahun 2022 dan 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Memberikan arahan tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai Melalui Aplikasi J-Silakon SKP ASN Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
102	Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 800/572/414/2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Tahun 2022 dan 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Memberikan arahan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Tahun 2022 dan 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
103	Surat Edaran Bupati Jember	– Undang – undang Nomor 5 Tahun	Memberikan arahan tentang Penyelenggaraan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Nomor: 800/7428/414/2023 tentang Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Melalui Kegiatan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (KEMBANG KOPI)	2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Melalui Kegiatan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (KEMBANG KOPI)



3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun sebelumnya dituangkan dalam tabel berikut :

A. Urusan Pendidikan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
A.1	Pemerintah Daerah Perlu memperhatikan kembali mutu pendidikan dengan mengoptimalkan program kompetensi SDM tenaga kependidikan dan non kependidikan serta peningkatan pengawasan standart mutu oleh pengawas melalui program yang inovatif dan efektif terutama disekolah pinggiran	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kegiatan yang telah	Dinas Pendidikan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk mendukung tercapainya Peningkatan SPM Mutu Pendidikan adalah : 1. Peningkatan Kompetensi Bagi Guru ASN dan Non ASN 2. Diklat Kepala Sekolah 3. Diklat Calon Kepala Sekolah 4. Peningkatan Mutu Kepala Sekolah 5. Bimtek Guru Penggerak 6. Pengembangan Kompetensi Calon Guru Penggerak	
A.2	Pemerintah Daerah harus mengurangi angka tidak sekolah	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keset	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Anak Tidak Sekolah hingga saat ini masih cukup	Dinas Pendidikan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	dikabupaten Jember yang masih tinggi melalui kolaborasi dalam pendataan serta intervensi kegiatan atau program utamanya pendidikan Non Formal (PNF) yang memuat konten keaksaraan fungsional (kejar paket) atau konten muatan ketrampilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau pemerintahan desa melalui komunitas belajar masyarakat (KBM) dengan menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan ormas keagamaan (NU dan Muhammadiyah)		araan	Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	banyak, baik itu anak yang sama sekali belum pernah bersekolah, anak yang belum tamat sekolah lalu putus sekolah, maupun anak yang tamat di satu atau dua jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan yang sudah Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember : 1. Verifikasi dan Validasi Jumlah Peserta Didik yang masuk Kategori DO dan LMS 2. Bersinergi dengan Kemenag dan Cabang Dinas	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	serta lembaga pondok pesantren dan lembaga lainnya yang mempunyai konsen dan perhatian terhadap masalah pendidikan untuk mewujudkan pendidikan merata dan peningkatan IPM.				dalam rangka kegiatan rekonfermasi data ATS 3. Menambah Daya Tampung di Satuan Pendidikan untuk memudahkan Anak ATS yang tidak terjangkau dari rumah ke sekolah 4. Pembuka Sekolah Terbuka di Satuan Pendidikan SMP 5. Menambah Daya tamping PKBM di Setiap Kecamatan 6. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Penanganan ATS 7. Memantau Terhadap Anak ATS yang sdh	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					melaksanakan Kegiatan PKBM agar tidak Kembali Putus Sekolah, Melibatkan Aparat Desa Kecamatan, Masyarakat Tokoh Masyarakat, dan seluruh OPD	
A.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong perhatian pada tenaga kependidikan diluar pendidikan negeri terutama pada pendidikan swasta, yayasan sebagai bagian pemerataan pendidikan melalui pendidikan agama seperti madrasah, pondok pesantren, TPQ, Madrasah Diniyah, taman	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian Bantuan BPPDGS bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi santri/warga belajar/siswa Madrasah Diniyah Takmiliah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz Guru	Dinas Pendidikan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	belajar dan semacamnya.				Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/SMP/Mts diberikannya bantuan pendidikan tersebut untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun dan rintisan wajar Dikdas 12 tahun. Kabupaten Jember telah menyalurkan Dana BPPDGS untuk 164 Lembaga.	
A.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menerbitkan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	Pemerintah Kabupaten Jember melalui sinergi dan	Dinas Pendidikan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	pengaturan tentang peraturan daerah tentang pendidikan baik pendidikan dalam lingkup dinas pendidikan maupun pada madrasah diniyah dan taklimiyah			Pendidikan Dasar	kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas Pendidikan, baik pendidikan dalam lingkup dinas pendidikan maupun pada madrasah diniyah dan taklimiyah	
A.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendata kebutuhan Guru Honorer, GTT/PTT Honorer sebagai pendukung pendidikan minimal sebelum anggaran perubahan tahun ini dan paling lambat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perencanaan, Pemetaan, dan Pendistribusian Kecukupan formasi guru ASN dan Guru Non ASN dalam Penyelenggaraan Pendidikan berbasis SPM mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri	Dinas Pendidikan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	bulan November sebagai basis data serta melakukan dengan sebenar benarnya dan menghindari rekayasa dalam pendataan		araan		Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan telah memberikan Honorarium SK Bupati Sebanyak 4497 Orang.	
A.6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera mengoptimalkan fungsi dan peran dewan pendidikan dalam menyusun konsep pendidikan berkualitas dan bermutu kedepan.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sebagai upaya penyusunan konsep pendidikan yang berkualitas, Dinas Pendidikan memperhatikan Dewan Pendidikan untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan	Dinas Pendidikan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					pendidikan yang bermutu.	
A.7	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan evaluasi tentang manajemen sekolah dan juga ketercukupan siswa di dalam sekolah terutama pendidikan Sekolah Dasar serta mendorong untuk dilakukan penggabungan (merger) Sekolah Dasar yang belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan berdasarkan hasil evaluasi.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Regrouping/merger dilakukan untuk penggabungan satuan pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan efektifitas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Jember.	Dinas Pendidikan
A.8	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pemberian Beasiswa bertujuan untuk bantuan pendidikan	Dinas Pendidikan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	evaluasi tentang anggaran Beasiswa yang sangat besar dan tidak efektif dampaknya dalam peningkatan IPM		Menengah Pertama		ke perguruan tinggi dalam mendukung tercapainya peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah sebagai salah satu komponen IPM. Pada tahun 2023 jumlah Mahasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 7.337 Mahasiswa. Total Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Tahun 2021 s.d. 2023 sebanyak 20.561. IPM Kabupaten Jember tahun 2023 sebesar 70,42 meningkat dari tahun 2022 yang	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					tercatat sebesar 69,80.	
A.9	Secepatnya isi jabatan definitif kepala OPD untuk optimatifikasi program kegiatan dinas Pendidikan yang selama ini seperti hidup enggan matipun tak mau.	Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jabatan Definitif Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah terisi melalui mekanisme sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	BKPSDM

B. Urusan Kesehatan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
B.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan Cakupan Jaminan Pelayanan Kesehatan UHC melalui BPJS	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kab. Jember dengan	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Kesehatan dengan target prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan serta mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit rujukan milik pemerintah sebagai prioritas untuk pemberian pelayanan pasien rujukan atas pendanaan dari sistem jaminan kesehatan yang bersumberkan dari	Masyarakat	Kabupaten/Kota		target UHC tahun 2024 menjadi 100% dengan pendanaan murni dari DAU (APBD)	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	APBD.					
B.2	J-Kereen, program ini sebenarnya bagus, tetapi harus dengan kajian matang sehingga tidak menimbulkan beban pembiayaan bagi rumah sakit daerah dan puskesmas yang berdampak pada pelaksanaan APBD. Selain itu juga tidak terlalu memanjakan rakyat jika program ini hanya berakhir untuk pencitraan saja, karena faktanya peserta J-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan gratis J-Pasti Kueren merupakan upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Jember yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sehingga diharapkan dapat menjadi daya dorong dalam pencapaian	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Kereen tidak hanya masyarakat miskin, banyak masyarakat mampu yang datang ke pusat kesehatan milik pemerintah hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan secara Mandiri ataupun jaminan kesehatan yang di tanggung oleh pemerintah.				UHC di Kab. Jember	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
B.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera melakukan dan menyampaikan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan sekaligus segera menyusun analisis kebutuhan pegawai (AKP) berdasarkan hasil pemetaan serta tidak melakukan diskriminasi kepada Honorer Kesehatan dengan memastikan seluruh Honorer terdata dan ter SK kan seperti GTT/PTT sebelum perubahan anggaran tahun ini	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sudah melalui proses pendataan dan analisis kebutuhan. Usulan penerimaan dan formasi bagi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan, namun realisasi masih rendah dikarenakan menyelaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Penerbitan SK Bupati terhadap	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	dan paling lambat bulan November tahun ini				tenaga kesehatan pada saat ini sedang berproses agar tepat sasaran.	
B.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menghitung alokasi honor yang ideal bagi tenaga kesehatan dan sesuai dengan standart UMR dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah serta mengusulkan formasi atau quota perawat untuk diangkat menjadi ASN PPPK bertahap	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bahwa pendataan dan analisis kebutuhan tenaga yang digunakan sebagai dasar usulan penerimaan tambahan tenaga PNS maupun PPPK selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, selanjutnya atas dasar saran dan masukan Bapak/Ibu Anggota DPRD kami akan melakukan pendataan dan	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	serta dukungan pemda agar KEMENPANRB memberikan afirmasi point pada perawat yang telah bekerja dan mengabdikan di pemerintahan daerah.				analisis kebutuhan tenaga lebih baik lagi. Terkait dengan formasi penerimaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jember kami dari Dinas Kesehatan telah mengusulkan jumlah dan jenis tenaga sesuai dengan kebutuhan kepada instansi terkait, namun dalam hal tersebut realisasinya masih rendah oleh karena penentuan jumlah formasi yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					untuk memberikan hak pegawai (gaji). Terkait dengan Surat Keputusan (SK) Bupati terhadap Tenaga Kesehatan pada Tahun 2024, saat ini sedang kami proses agar tepat sasaran.	
B.5	Pemerintah Daerah harus mencabut kebijakan diskriminatif terkait dengan adanya perbedaan seragam tenaga kesehatan sepanjang kebijakan tersebut tidak ada dasar aturan regulasi dari atas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sebagaimana Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diatur penggunaan	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	yang mengatur.				pakaian dinas bagi PNS dan PPPK	
B.6	Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kerja dan Kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Tingkat Kecamatan dan desa sebagaimana Perpres Nomer 72 tahun 2022 dalam akselerasi penurunan Stunting. Dan Pemerintah Daerah diharapkan tidak perlu atau membubarkan organ baru seperti satgas yang justru tidak	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.	Dinas Kesehatan merupakan bagian dari TPPS yang melaksanakan sebagai tim teknis pengentasan stunting (target, penentuan sasaran, teknis pengaturan di lapangan terkait klasifikasi stunting, pencegahan, promosi, penanganan dan rehabilitative)	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	jelas dasar regulasi pembentukannya dan potensial tumpang tindih tidak efisien dan pemborosan anggaran dan justru perannya menegaskan peran TPPS yang sudah dibentuk.					
B.7	Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan percepatan penurunan stunting sebagaimana perpres dan arahan dari kemendagri melalui evaluasi capaian 8 aksi Konvergensi stunting yang sudah	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;	Kegiatan intervensi spesifik yang dikhususkan dalam pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita yang berisiko stunting (gizi kurang, <i>weight faltering</i>), balita stunting dan ibu hamil KEK.	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	dijalankan.					
B.8	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kesehatan yang memenuhi standart layanan dalam upaya menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan menaikkan status POLINDES untuk dijadikan PONKESDES sebagaimana RPJMD. Serta menaikkan status	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pada tahun 2023 seluruh puskesmas telah berstatus Puskesmas BLUD.	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Puskesmas menjadi BLU dalam peningkatan kinerja layanan					
B.9	Pemerintah Daerah harus mendorong inovasi pelayanan kesehatan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sekaligus mendorong paradigma pola hidup sehat untuk mencegah sakit dari pada pelayanan ketika sudah sakit kepada masyarakat.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Jember melalui pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan mendahulukan promotive dan preventif dibandingkan kuratif dan rehabilitatif	Dinas Kesehatan
B.10	Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi pada kinerja Rumah sakit Daerah	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	Dinas Kesehatan selaku pengampu pelayanan 3 RSD akan meningkatkan	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	yang tidak mampu meningkatkan kinerja manajemen baik dari sisi akreditasi maupun keuangan dan juga segera mengisi kekosongan direktur yang belum terisi dengan orang-orang yang profesional.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Rujukan	system pengawasan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen	
B.11	Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pelayanan kesehatan serta organisasi tata kerja dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan terbaru.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Perbaikan manajemen pelayanan kesehatan termasuk organisasi dan tata kerja mempedomani ketentuan dan peraturan terbaru melalui pembinaan dan sosialisasi.	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
B.12	Secepatnya isi jabatan definitif kepala OPD untuk optimisasi program kegiatan dinas kesehatan, sehingga capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan segera optimal. Bupati tidak serta merta mengganti pimpinan OPD karena like n dislike sebelum di ketahui kinerja jangka menengahnya.	Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jabatan Definitif Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember telah terisi	BKPSDM



C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
C.1	Pemerintah Daerah harus segera melakukan pengukuran yang obyektif terhadap kinerja pembangunan Infrastruktur berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang diukur dari 6 hal yaitu : 1) Ketersediaan Fisik, 2) Kualitas Fisik, 3) Kesesuaian, 4) Efektifitas Pemanfaatan, 5) Penyerapan Tenaga Kerja, 6) Kontribusi pada Perekonomian. Pengukuran 6 aspek ini penting dilakukan oleh tim independen professional karena	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Pengukuran yang obyektif terhadap kinerja pembangunan Infrastruktur berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku	DINAS PU BMSDA



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	untuk melihat ukuran kualitas pembangunan, dan apakah masyarakat benar benar dapat manfaat serta kontribusi dari pembangunan jalan terutama dalam mendukung pergerakan ekonomi daerah					
C.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengakselerasi dan menjelaskan progres penyusunan kebijakan penataan Ruang RTRW dan RDTR	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dalam proses percepatan penyelesaian dan penetapan RTRW Kabupaten Jember menjadi Peraturan Daerah	DPRKPCK
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	Dalam proses percepatan penyusunan RDTR Kabupaten Jember	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		
C.3	Pemerintah Daerah harus benar benar mengoptimalkan peran Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang diketua oleh Sekreataris Daerah terutama dalam penyelesaian ijin tata ruang terutama tambak dan ijin pengelolaan gunung sadeng, serta tugas dalam membuat neraca tata ruang daerah dengan menginventarisir pelanggaran tata ruang dilapangan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Jember sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	untuk dilakukan pencatatan sebagai bahan masukan kebijakan dalam revisi perda tentang tata ruang serta peraturan tindak lanjut perda melalui RDTRK. Dan tidak memperlakukan TKPRD sebaga alat stempel yang hanya dibutuhkan tanda tangan untuk persetujuan ijin tata ruang.					



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
C.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan revitalisasi RTH harus tetap memastikan bahwa Pembangunan RTH harus memperhatikan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan sebagaimana Peraturan Menteri PU No 05/PRT/M/2008 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan RTH mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku dan bertujuan untuk menambah tanaman dan peningkatan sarana dan prasarana umum, yaitu dengan penyediaan/pembangunan : - Fasilitas olahraga - Taman bermain - Taman hijau - Ruang interaksi masyarakat - Fasilitas UMKM Pembangunan RTH tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang sudah ada.	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Nasional BAB XI PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA Pasal 67 ayat 7 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah.				Bahkan apabila dimungkinkan akan dibangun penambahan fasilitas olahraga lainnya, seperti jogging track, lapangan voli atau lapangan basket.	
C.5	Pelaksanaan kegiatan Multi years baik infra struktur maupun PJU belum bisa memuaskan rakyat secara maksimal, karena kualitas pengerjaannya tidak bagus, pelaksana kegiatan kurang	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Rehabilitasi Jembatan	Sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Jember melalui program pembangunan jalan sejauh 1.200 kilometer, Pemerint	DINAS PU BINA MARGA
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan	Pembangunan Sistem drainase perkotaan		



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	punya integritas mengakibatkan keterlambatan pekerjaan yang menyisakan denda		Sungai dalam daerah kabupaten/Kota		ah Kabupaten Jember berhasil meraih juara 1 dalam lomba Hari Jalan 2023, untuk kategori Pemerintah Kabupaten. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Jember di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Tercatat, ada sejumlah indikator penilaian. Mulai dari	
	yang harus di bayar oleh rekanan. Apakah sudah di bayar atau belum dendanya saat ini? Wallahu A'lam.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	kondisi pengembangan wilayah pada sektor infrastruktur kebinamargaan di daerah terkait	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Pelaksanaan proyek PJU juga tidak ada transparansi dan terkesan di kondisikan pemenangnya sehingga pelaksanaan kegiatannya seperti siluman. Kami rekomendasikan kepada APH untuk melakukan lidik terhadap adanya kemungkinan atau dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek proyek tersebut di atas.		yang luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota		dengan panjang jalan. Selanjutnya, jumlah penduduk, dan luas wilayah, kondisi kemantapan jalan di daerah hingga harga konstruksi atau kebijakan anggaran daerah dalam penyelenggaraan jalan.	



D. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
D.1	Pemerintah Daerah harus memperhatikan pembangunan standart Sanitasi Rumah Tidak Layak Huni terutama dalam pemenuhan jumlah ODF atau yang belum memiliki jamban mencapai 132.567 KK. Sementara yang sudah memiliki jamban sendiri mencapai 601.058 KK.	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 86 unit dengan anggaran perunit rumah sebesar Rp 30.00.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut sudah meliputi dengan perbaikan sanitasi (jamban)	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
D.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menerbitkan program inovatif dan kolaboratif dalam program RTLH dari skema Non APBD yang melibatkan CSR dengan ketentuan pedoman, juklak, juknis untuk pelaksanaan yang jelas.	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten Jember mendapatkan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 42 unit yang dibiayai oleh CSR Bank Jatim	DPRKPCK
D.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuka dan transparan terhadap data penerima program RTLH baik dari pendanaan APBD maupun Non APBD.	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Data Penerima bantuan <i>(by name by address)</i> Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah dituangkan dalam SK oleh Pejabat yang berwenang setelah proses verifikasi di	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					lapangan dilakukan.	
D.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mempertegas pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dianggarkan dari APBD sesuai dengan mekanisme yang	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dianggarkan lewat rekening Belanja Bantuan Sosial - Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mencabut Permendagri Nomor 13 tahun 2018	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	despakati yaitu dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2018 Pasal 23 A, pemberian bantuan sosial yang diserahkan pada individu/keluarga harus disampaikan nama, alamat dan besaran bantuan sosial yang diberikan.					
D.5	Dalam penentuan sasaran dan pendataan rumah tidak layak huni harus mengoptimalkan fungsi Tim fasilitator Lapangan (TFL), RW/RT, dan pemerintahan desa,	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dalam melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas PRKP dan Cipta Karya dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk proses verifikasi	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	serta membubarkan keberadaan tim yang pembentukannya tidak diatur dalam ketentuan dan menjadikan inefisiensi anggaran.				sampai dengan proses pembangunan selesai.	

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
E.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera melakukan harus segera melakukan penataan PKL, dalam hal ini Satpol PP dan leading sector terkait sebagaimana yang dijanjikan dalam RPJMD,	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawasan.	Penatan PKL Bertujuan Untuk : Meningkatkan Kesejahteraan PKL. Menata dan Menertibkan PKL. Masalah Yang Diselesaikan : PKL Yang Mengganggu Ketertiban Umum	Satpol PP



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	maupun RKPD terutama di pusat kota atau pemerintahan sehingga secara estetika akan lebih indah dan Pemkab Jember lebih punya wibawa dan berharap Jember akan memperoleh Adipura untuk pemerintahan saat ini.		dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Di rekolaskan Ketempat yang Sudah Disediakan . Pembinaan dan Pendataan PKL. Bantuan Usaha PKL. Pembangunan Fasilitas PKL.	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
E.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memperjelas program dan konsep kabupaten ramah HAM, capaian saat ini serta program selanjutnya yang strategis dilakukan.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	Publikasi berita Ranham	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penanganan Isu Strategis Kemiskinan Ekstrim melalui Sosialisasi kevalidan Data Penduduk Kabupaten Jember dan Pelayanan Admindukcapil (KK,KTP el dan KIA)	Dinas Kependudukan dan Capil
		Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penanganan Isu Strategis J-PENTING (Pelayanan keluarga stunting) & Kota Layak Anak terhadap dok admindukcapil	Dinas Kependudukan dan Capil



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Pembangunan PJU, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau), 2. Pemeliharaan Trotoar, taman, makam (Cukil, Kebonsari, Tunjung, kaliwates, wetan kantor, Patrang, Sukorejo, Tumpeng), PJU, RTH (8 tempat)	DPRKPCK
		Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung	Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PPG) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Rekomendasi kepada Pihak	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Swasta terkait Kawasan Tanpa Rokok, Disabilitas, Lansia dsb	
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Pemberian paket sembako bagi anak yatim, piatu, atau yatim piatu	Dinas Sosial
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pemberian paket sembako dan susu formula	Dinas Sosial
		Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	KIE pencegahan kekerasan pada anak	DPPPAKB



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan UPTD PPPA untuk kasus kekerasan pada anak	DPPPAKB
		Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Layak Anak	DPPPAKB
		Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Peningkatan SDM khusus penanganan anak	DPPPAKB



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	PElaksanaan PUG dan PPRG di OPD	DPPPAKB
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pelatihan perempuan	DPPPAKB
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Peningkatan SDM pelayanan kekerasan pada perempuan	DPPPAKB



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan kekerasan pada perempuan	DPPPAKB
		Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan pengaduan perempuan korban kekerasan	DPPPAKB



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan UPTD PPPA kekerasan perempuan	DPPPAKB
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Penambahan Jaringan perpipaan di Kota	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Pendampingan Kelompok Pengelola SPAMS di Desa eks PAMSIMAS	DPRKPCK
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penambahan Jaringan perpipaan di Kota	DPRKPCK
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Jamban (rumah) dan MCK (untuk umum) Pondok, Tempat Ibadah, Sekolah	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Pembangunan PJU, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau), 2. Pemeliharaan Trotoar, taman, makam (Cukil, Kebonsari, Tunjung, kaliwates, wetan kantor, Patrang, Sukorejo, Tumpeng), PJU, RTH (8 tempat)	DPRKPCK
		Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli	Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PPG) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Rekomendasi kepada Pihak	DPRKPCK



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Swasta terkait Kawasan Tanpa Rokok, Disabilitas, Lansia dsb	
		Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	DPRKPCK
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Koordinasi Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi Kesehatan Bimtek Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Evaluasi Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) Penilaian angka kredit bagi ASN di Kab Jember	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Pelatihan orientasi penyelenggaraan laboratorium di 50 puskesmas Bimtek tenaga Entomolog di seluruh Puskesmas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim, Petugas TBC dan Surveilans Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat Puskesmas, Apoteker dan Tenaga kesehatan lainnya Belanja Jasa Tenaga Administrasi (SMA, D1, D2, D3, S1) Belanja Jasa Tenaga Keamanan, caraka dan supir	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (manajemen puskesmas dan pelayanan kluster pengendalian penyakit) Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Visitasi Pemohon Rekomendasi SIP Mandiri dan Pelatihan MTBS Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Kab. Jember	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Bantuan iuran JKN J-PASTI KEREN pelayanan gratis kelas III rumah sakit/puskesmas bagi orang KTP Jember	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Media Promosi bagi Ibu Hamil Resiko Tinggi di wilayah puskesmas Media Promosi bagi Ibu Hamil Resiko Tinggi di wilayah puskesmas Sosialisasi (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) KIE bagi Masyarakat di Wilayah Puskesmas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan bagi Kader Posyandu di wilayah Puskesmas Monitoring dan	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Evaluasi kegiatan Bumil KEK, Bumil Risti serta AKI & AKB di wilayah Puskesmas	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pemberian makanan tambahan berupa susu kepada Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil KEK di seluruh wilayah Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sosialisasi dan KIE Kesehatan yang dilakukan oleh Tim diseluruh Puskesmas pada sasaran siswa SD, SMP dan SMA di Kab Jember	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular di masyarakat dan Skrining perilaku merokok pada usia	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Masyarakat	Kabupaten/Kota		10-18 tahun di sekolah	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Konseling dan pendampingan Deteksi Dini penemuan kasus PTM dan Jiwa	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sosialisasi penyuluhan upaya promotif preventif HIV Skrining atau pelacakan kasus HIV Koordinasi linsek terkait untuk validasi data terkait HIV Sosialisasi Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA)	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Rapat koordinasi dan perencanaan, monitoring dan evaluasi peningkatan	Dinas Kesehatan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Masyarakat	Kabupaten/Kota		kesehatan gizi masyarakat di tingkat Puskesmas dan Dinkes Jember Deteksi dini dan pendampingan pada tingkat keluarga beresiko stunting dan wasting (ibu hamil, balita dan baduta)	
		Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pembinaan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/ serikat buruh	DISNAKER



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
E.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana. Serta menyediakan sarana prasarana dan anggaran cukup untuk penanganan bencana, terutama anggaran tak terduga, mengingat Jember salah satu daerah yang	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat berupa rambu peringatan	BPBD
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Memberi wawasan kebencanaan di Desa rawan bencana	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Memberi wawasan kepada keluarga penyintas bencana	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
E.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera melakukan pemisahan pengelolaan Dinas Damkar untuk terpisah dari Kantor Satpol PP dengan melakukan perubahan kebijakan sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku	Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Penataan Organisasi	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pembentukan Dinas Damkar sebagai Perangkat daerah mandiri yang terpisah dari Satpol PP telah difasilitasi melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya,	Bagian Organisasi



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					perencanaan, penganggaran dan pengisian personil akan dipersiapkan pada tahun 2024. Diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	
E.6	Segera isi jabatan definitive kepala OPD untuk optimatifikasi program kegiatan Satpol PP yang selama ini masih di rangkap	Kepegawaian Daerah	Promosi dan Mutasi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja telah diisi dengan Pejabat Definitif sesuai mekanisme dalam ketentuan perundangan yang	BKPSDM



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	kepala Bakesbangpol, yang membuat kinerja Satpol PP tidak Optimal.				berlaku	

F. Urusan Sosial

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
F.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menjalankan pendataan dan <i>updating</i> data kemiskinan daerah secara berkala (6 bulan sekali) sesuai dengan ketentuan yang diatur. Karena sering kali karena tidak update maka penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak	Perlindungan dan Jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Updating data DTKS dalam bentuk usulan dan verifikasi ketidaklayakan	Dinas Sosial Kab Jember



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	menerima salah sasaran, yang berhak mendapatkan justru terlewatkan justru yang seharusnya tidak berhak malah sering mendapatkan bantuan.					
F.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan kordinasi penanganan kemiskinan dengan segera membentuk dan mengoptimalkan fungsi Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (di bawah wakil bupati) dalam penanganan kemiskinan	Perlindungan dan Jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Diperoleh data yang akurat sebagai acuan pemberian bantuan sosial Optimalisasi koordinasi penanganan kemiskinan	Dinas Sosial Kab Jember, Bappeda



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	terutama kemiskinan ekstrim mencapai nol persen di tahun 2023					
F.3	Pemerintah Daerah harus segera menerbitkan SK Bupati terkait dengan sasaran dan penanganan kemiskinan ekstrim yang terintegratif dengan berbasis pada lokasi, by name by adres serta pemetaan masalah.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dasar penanganan kemiskinan ekstrim yang terintegrasi	Bappeda
F.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus transparan dan berbasis kebutuhan dan data dalam pemberian saran dan prasarana terkait pemberdayaan warga miskin serta	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Updating data DTKS dalam bentuk usulan dan verifikasi ketidaklayakan 2. Menyediakan link Google Form sebagai media usulan calon penerima	Dinas Sosial Kab Jember



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	penyandang masalah kesejahteraan sosial.				bantuan APBD	
F.5	Pemerintah daerah harus mampu mengimplementasikan secara maksimal pelaksanaan perda disabilitas serta peraturan bupati terkait disabilitas dengan membangun sata data tunggal untuk permasalahan disabilitas dengan melibatkan partisipasi para organisasi disabilitas serta program dengan semangat pemberdayaan pada disabilitas bukan paradigm bantuan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada penyandang disabilitas di Kabupaten Jember melalui mekanisme usulan calon penerima bantuan dari wilayah/masyarakat, dan data dari organisasi disabilitas (Perpenca dan NPCI Kabupaten Jember). Usulan by name by address tersebut dijadikan satu data oleh bidang pengampu sebagai pedoman untuk	Dinas Sosial Kab Jember



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	yang memposisikan disabilitas sebagaimana undang lama sebagai orang cacat.				pemberian bantuan dan pelayanan sosial dengan melalui proses verval/assessmen dengan tujuan pemberian bantuan tepat sasaran.	
F.6	Pemerintah Daerah harus segera membentuk Komite disabilitas daerah sebagaimana dalam perda untuk mengawasi capaian pelaksanaan dan kinerja pelayanan disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	Dinas Sosial Kab Jember



G. Urusan Ketenagakerjaan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
G.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk serius melakukan terobosan inovasi program yang efektif dan efisien untuk penyerapan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran.	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada pencari kerja melalui Aplikasi (E Kapeka) dan media sosial serta membentuk Whatsapp Group Informasi Lowongan Kerja di Kabupaten Jember maupun di Luar Kabupaten Jember	DISNAKER
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Memberikan pembekalan kepada pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja untuk mengurangi pencari kerja yang memundurkan diri ketika sudah di	DISNAKER



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					terima bekerja dan mempertemukan langsung dengan Perusahaan yang memiliki lowongan kerja untuk melakukan rekrutmen yang di ketahui secara langsung oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.	
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Membentuk kelas bisnis untuk menciptakan wirasusaha mandiri baru di Kabupaten Jember.	DISNAKER



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Mempertemukan secara langsung Perusahaan dan pencari kerja untuk melakukan proses recruitmen guna mengurangi pengangguran di Kabupaten Jember dan Perusahaan wajib melaporkan hasil recruitmen kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember kurang lebih 1 (satu) Bulan setelah pelaksanaan Job Fair	DISNAKER
G.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dalam program permasalahan hubungan industrial	Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan	Melakukan kegiatan pembinaan dan verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) se-Kab. Jember guna	DISNAKER



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh di Jember.		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	mendata keaktifan anggota, jumlah anggota, bentuk kegiatan yang dilakukan SP/SB dan pengurus SP/SB	
G.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali fungsi dewan pengupahan daerah.	Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Depekab dengan mengundang pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Pengusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember, dan Bagian Hukum guna mengkoordinasikan usulan UMK	DISNAKER



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Kabupaten Jember.	
G.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong untuk pemenuhan UMR pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jember.	Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Setelah usulan UMK disetujui Gubernur, dilakukan sosialisasi kepada beberapa Perusahaan di Kabupaten Jember dan meminta tanggapan kesanggupan untuk memberikan upah sesuai UMK kepada pekerja.	DISNAKER



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
G.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pengawasan dan operasi perusahaan/industri di daerah terutama yang memperkerjakan tenaga kerja asing.	Penempatan Tenaga Kerja	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang sudah sesuai dengan dokumen IMTA	DISNAKER
G.6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pendataan para pekerja migran indonesia yang berkerja di luar negeri serta enjamin perlindungan baik pada PMI maupun keluarganya.	Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia(PMI)	Melakukan sosialisasi Program Gagasan dan Ruang Dialektika (Pro Garuda) di Desa kantong - kantong Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Jember untuk memberikan Informasi Migrasi Aman bekerja ke Luar Negeri (Prosedural) dan mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Presdural di Kabupaten Jember	DISNAKER



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					serta memfasilitasi pengaduan Pekerja Migran Indonesia .	
G.7	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengimplementasikan UU Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat perda pelindungan pekerja migran serta pusat pelayanan terpadu baik ditingkat daerah maupun desa kantong – kantong PMI.	Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia(PMI)	Pada tahun 2024 ini sedang dalam proses pembentukan Raperda Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Jember bekerja sama dengan akademisi (Universitas Muhammadiyah Jember) guna untuk memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI) mulai dari saat akan berangkat, penempatan maupun purna penempatan.	DISNAKER



H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
H.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui pangerusutamaan gender disetiap OPD baik untuk pendataan, perencananaaan program, serta peningkatan anggaran.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pendampingan perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pangerusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kab/kota	DPPPAKB Kab. Jember
H.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan penanganan serius dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jember melalui program yang	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Terlaksananya pencegahan kekerasan pada perempuan	DPPPAKB Kab. Jember



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	inovatif dengan mendorong angka turun ditahun 2023			Kabupaten/Kota		
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan korban kekerasan perempuan	DPPPAKB Kab. Jember
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Pelayanan korban kekerasan di UPT PP dan PA yang membutuhkan rujukan lanjutan	DPPPAKB Kab. Jember



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Operasional pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak	DPPPAKB Kab. Jember
H.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengakselerasi Implementasi perda kabupaten layak anak baik dalam capaian dan menyusun program kongkrit untuk keberlanjutannya.	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengakomodir operasional operasional Kabupaten Layak Anak, Forum Anak dan kegiatan sosialisasi penanganan kekerasan pada anak di sekolah - sekolah	DPPPAKB Kab. Jember



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
H.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih memperluas kolaborasi dan membangun partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Jember	DPPPAKB Kab. Jember
		Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan koordinasi antar stakeholder untuk menurunkan kekerasan pada anak	DPPPAKB Kab. Jember



I. Urusan Kependudukan dan Capil

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
I.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan di kecamatan seperti yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten lainnya.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kompetensi melalui Bimtek petugas/operator admindukcapil yang ada di 31 Kecamatan. Pencetakan KTP el dan KIA bisa dilakukan di 8 titik WAK yang ada di Kecamatan.	Dispenduk capil
I.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun dan menyiapkan terobosa inovasi dalam pelayanan kependudukan di kecamatan seperti yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten lainnya.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil kependudukan	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Mendekatkan & memudahkan pelayanan admindukcapil kepada masyarakat cukup di Kec dan Desa melalui LAHBAKO Desa sebanyak 183 desa. Pengembangan Inovasi WAK di 8 titik di Kecamatan (Kencong, Tanggul,	Dispenduk capil



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Wuluhan, Rambipuji, Tempurejo, Jelbuk, Kalisat dan Mayang)	
I.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengoptimalisasi peran kecamatan serta sarana dan prasaran yang tersedia di kecamatan untuk mendukung pelayanan pelayanan kependudukan.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sarana alat perekaman (Mobbile Enrollmen) di Kecamatan: 17 (tujuh belas) unit, Ket : 13 unit th 2021, 4 unit th 2023) Penyediaan aplikasi LAHBAKO	Dispenduk capil



J. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
J.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan UU Desa serta pelaksanaan dana desa terutama dalam peningkatan Kinerja BUMDES, Keterlibatan peran desa melalui TPPS Desa Dalam pengurangan stunting serta Kemiskinan Ekstrim	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Upaya-upaya yang telah/akan dilakukan dalam pembinaan BUM Desa di Kabupaten Jember adalah melibatkan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi BUM Desa dalam pendaftaran Badan Hukum, memfasilitasi BUM Desa dalam pembuatan laporan keuangan, memfasilitasi BUM Desa untuk peluang usaha, memfasilitasi BUM Desa dengan akses permodalan perbankan, Mengikutsertakan BUM Desa dalam	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					berbagai acara pameran produk unggulan, melibatkan BUM Desa dalam kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan BUM Desa	
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan desa untuk lebih aktif dalam kegiatan TPPS antara lain : Melaksanakan rembuk stunting untuk merumuskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					kegiatan yang akan diusulkan dalam RKPDesa Mendorong kenaikan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan stunting dengan kenaikan minimal 10%, penganggaran berdasarkan hasil rembuk stunting di setiap desa berdasarkan surat edaran dari bupati yang diinisiasi oleh DPMD, khususnya untuk intervensi spesifik stunting (penyediaan PMT bagi ibu hamil beresiko tinggi, dll) sehingga target penurunan angka stunting diharapkan	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					dapat tercapai sebesar 14% di tahun 2024 (sumber data dari dinkes) Memberikan panduan kepada kecamatan dalam mengevaluasi APBDesa untuk memastikan kenaikan anggaran terkait stunting (peningkatan anggaran minimal 10% dari anggaran tahun sebelumnya) sudah dilaksanakan	
J.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- "Tilik Desa" Inovasi yang diinisiasi dari kerjasama antara Pemkab Jember, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalamnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					bersama beberapa OPD terkait, dengan Pengadilan Negeri Jember terkait bertujuan untuk mendekatkan layanan Pengadilan Negeri Jember kepada masyarakat desa secara terintegrasi melalui inovasi teknologi dan informasi - Transparansi terhadap informasi kepada publik	
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melaksanakan pemetaan partisipatif yang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					melibatkan perangkat desa dan masyarakat untuk menentukan titik koordinat batas desa tanpa menggunakan konsultan	
J.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- “Tilik Desa” Inovasi yang diinisiasi dari kerjasama antara Pemkab Jember, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalamnya bersama beberapa OPD terkait, dengan Pengadilan Negeri Jember terkait bertujuan untuk mendekatkan layanan Pengadilan Negeri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Jember kepada masyarakat desa di lebih dari 30 kecamatan secara terintegrasi melalui inovasi teknologi dan informasi - Transparansi terhadap informasi kepada publik	
J.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan partisipasi masyarakat/keompok masyarakat dalam pembangunan.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan lingkungan secara swadaya guna menumbuhkan budaya gotong royong - Mendorong partisipasi seluruh masyarakat desa,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		pemerintah desa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan lomba gotong royong terbaik	



K. Urusan Perhubungan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
K.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus menyusun perencanaan dan program yang jelas dan terukur dalam optimalisasi prasarana perhubungan terutama Bandara	Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	- Perbaikan dan sertifikasi peralatan keamanan - Perbaikan kendaraan PKP-PK - Kalibrasi peralatan BMKG - Perbaikan Drainase	Dinas Perhubungan
K.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan lobby pengembangan, pemulihan dan pengaktifan kembali operasionalisasi bandara terutama pada pihak terkait yaitu dengan	Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Koordinasi dengan Maskapai yang memiliki Pesawat yang bisa mendarat di runway Bandara Jember agar dapat melayani penerbangan komersil.	Dinas Perhubungan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	pemerintah pusat, BUMN , Holding PTPN 12 dan Angkasapura. Jangan pernah bermimpi Jember akan memiliki bandara yang ideal selama koordinasi, synergy dan kolaborasi terputus dengan pihak pihak tersebut.					
K.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memiliki konsep inovatif dalam pengembangan moda transportasi publik massa yang ramah baik dalam layanan maupun trayek yang update dengan perkembangan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan pelayanan Angkutan Umum pada daerah2 yang belum terlayani Angkutan Umum dan meningkatkan pelayanan Angkutan Umum pada trayek yang sudah tersedia	Dinas Perhubungan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	teknologi sehingga tidak tergilas oleh era digital yang saat ini di kuasai oleh aplikasi telpon pintar.					
K.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan kembali penataan lalu lintas jalan terutama pada wilayah wilayah yang rawan kemacetan. Rekayasa lalu lintas yang sudah sering dilakukan bahkan hampir setiap tahun tetapi hasilnya	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Melakukan kegiatan Survey Lalu Lintas antara lain Survey Traffic Counting, Survey CTMC, Survey Perlengkapan Jalan dan Survey Daerah Rawan Kecelakaan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik lalu	Dinas Perhubungan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	masih belum mampu mengurai kemacetan lalu lintas. Sudah seharusnya di lakukan kajian serius untuk benar benar mengurai kemacetan, di antaranya mengoptimalkan kembali jalan raya Sultan Agung menjadi 2 sisi, atau menambah infrastruktur jalan alternative cerdas lingkar dalam kota.				lintas, unjuk kerja lalu lintas dan informasi prasarana kelengkapan jalan yang dibutuhkan	
K.5	Gagalnya trial trayek pesawat grand caravan new Cesna Jember – Surabaya yang seperti di gaung gaungkan oleh bupati bahwa	Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Koordinasi yang menghasilkan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan.	Dinas Perhubungan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	pesawat berpenumpang 12 orang tersebut akan terbang di langit Jember selama 90 hari ternyata hanya omong kosong belaka, Karena rakyat melihat bahwa Pemkab Jember tidak serius untuk maju dan melibatkan anggaran yang tidak sedikit dari bank milik Pemerintah yang sampai saat ini menyisakan persoalan sampai di lidik oleh Kepolisian. Hal ini harus menjadi evaluasi serius bagi Bupati dan OPD Dinas Perhubungan					



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
K.6	Untuk itu demi perubahan Jember lebih baik kami rekomendasikan kepala dinas Perhubungan untuk di ganti dengan pejabat yang lebih berkopoten dan berkomitmen untuk bersama sama membangun Jember	Pengembangan Sumberdaya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan, Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi	BKPSDM

L. Urusan Komunikasi dan Informasi

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
L.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian Indeks SPBE dengan melakukan moratorium pembangunan	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Melakukan pengembangan/update terhadap aplikasi yang sudah pernah dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dari OPD pemohon	Diskominfo



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	aplikasi dengan lebih mengutamakan peningkatan pemanfaatan aplikasi yang sudah beroperasi dalam mendukung pelayanan serta konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, hal ini sebagaimana arahan Menpan RB					
L.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memaksimalkan peran OPD dan PPID dalam menjalankan keterbukaan informasi publi dengan melaporkan 8 dokumen wajib dalam sistem informasi mereka masing-masing. Salah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Surat Edaran Sekda perihal Pemutakhiran Data PPID	Diskominfo



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	satunya rencana strategis tahunan, dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).					
L.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong pemberdayaan dan kelembagaan peran PPID terutama di desa.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Aktivasi website PPID Desa pada 226 Desa Pendampingan dan pembinaan PPID Desa Website PPID Desa aktif 159 Desa (70,35%)	Diskominfo
L.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu membentuk Komisi Informasi Publik Di daerah dalam optimalisasi keterbukaan informasi di daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public Pengelolaan media	Memperhatikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 26 ayat 3, bahwa Komisi Informasi Provinsi	Diskominfo



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
				komunikasi publik	dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi. Berdasarkan UU tersebut, bahwa tugas dan fungsi Komisi Informasi Kabupaten adalah memproses permohonan sengketa informasi. Sementara itu, data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, di Kabupaten Jember tidak pernah ada permohonan sengketa informasi.	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Hal tersebut disebabkan layanan permohonan informasi publik di Kabupaten dilaksanakan dengan baik. Data permohonan informasi pada tahun 2023, terdapat 409 permohonan informasi, sejumlah 399 telah ditindaklanjuti dan status selesai, sementara 10 permohonan dalam proses. 0 sengketa Berdasarkan data tersebut, maka Kabupaten Jember belum memerlukan membentuk Komisi Informasi Kabupaten.	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
L.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menjalin mitra kolaborasi dan strategis secara professional dengan beberapa pihak dalam penyediaan informasi pada publik terkait pembangunan.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Layanan Hubungan Media	Penyebarluasan informasi program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember	Diskominfo
L.6	Segera alokasikan anggaran untuk pembangunan Media Centre dan comand Centre untuk mengetahui aktifitas semua penjurur kabupaten Jember dengan efektif dan efisien sehingga mengoptimalkan waktu lebih banyak kepada bupati untuk	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public Pengelolaan media komunikasi publik	Tiga fungsi media center, yakni: 1. sebagai wahana diseminasi informasi publik (menyebarkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah), 2. pertukaran informasi, 3. pelayanan informasi dan komunikasi	Diskominfo



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	mengendalikan Wilayahnya dengan mengurangi banyak kegiatan ceremonial yang tidak efektif dan hanya terkesan pencitraan semata.				publik. Dari ketiga fungsi media center tersebut telah dilaksanakan oleh Diskominfo.	



M. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
M.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember program pemberdaaan dan perlindungan terhadap UMKM dan koperasi melalui peningkatan capaian target legalitas serta peningkatan kemampuan untuk naik kelas.	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.</i>	Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi & UM telah memberikan Fasilitasi Perijinan bagi KUMKM sebagai berikut: SKU : 391 NIB : 2.519 PIRT : 2.366 Fasilitasi Sertifikat Halal : 5.187 bekerjasama dengan 4 LP3H di Kabupaten Jember, yaitu : UIN KHAS Jember sebanyak 474 AL Falah Halal Centre sebanyak 2.300 Al Hidayah Halal	DINAS KOPERASI



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Centre sebanyak 1.220 UNMUH Jember sebanyak 226 Dinas Koperasi sebanyak 967 HKI – Merek : 568 BPOM : 527 Rekom Subsidi BBM Solar : 35	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
M.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Program pemberdayaan UMKM melalui perbaikan kualitas produk kemasan dan pemasaran sekaligus juga mendorong keperantaan pasar UMKM menuju UMKM mendunia yang bisa melakukan ekspor.	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.	Pelatihan peningkatan SDM melalui Pelatihan kemasan Produk UMKM sebanyak 100 peserta, serta bekerjasama dengan Akademi Mudah Eksport. Melakukan Bisnis Matching dengan Buyer dari Jeddah	DINAS KOPERASI



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
M.3	Pemerintah daerah Kabupten Jember harus mengurangi Kegiatan pemberdayaan UMKM yang sifatnya ceremonial melalui event kegiatan yang menyedot anggaran besar yang tidak terukur efektivitasnya dan jika tidak memiliki dampak signifikan dalam peningkatan UMKM untuk naik kelas	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro.	Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi dan UM telah melaksanakan Fasilitasi Bazar UMKM skala Kabupaten dan mengikuti pameran 3 (tiga) kali yaitu di Kediri, Majokerto dan Surabaya	DINAS KOPERASI



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
M.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kinerja Pusat Layanan Usaha KUMKM (PLUT UMKM) yang masih diragukan kompetensi SDMnya serta pola	Kewirausahaan , Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di daerah	Dukungan Pemberdayaan Daerah melalui Pendampingan PLUT	Keberadaan PLUT KUKM sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan UMKM. Konsultan/Pendamping PLUT KUMKM sejak operasional tahun 2021-2023 sebagai Tenaga Penugasan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, sehingga penggajian dan seluruh kegiatan dipantau langsung oleh Kemenkop melalui laporan harian, mingguan dan bulanan.	DINAS KOPERASI



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	pendampingannya , dan keberadaan dan fungsinya bisa diketahui secara luas				Konsultan/Pendamping PLUT KUMKM Jember sudah memiliki sertifikat Kompetensi sebagai Pendamping UMKM semenjak awal operasional PLUT KUMKM Jember pada tahun 2021. Konsultan/Pendamping PLUT KUMKM Jember mendapatkan penghargaan sebagai konsultan terinovatif dari Kemenkop dan UKM . PLUT KUMKM juga sering membuka kelas mandiri tematik dan inkubasi bisnis bagi UMKM, Mahasiswa dan Wirausaha	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
M.5	Sesuai dengan program prioritas bupati nomor 1 tentang pemberdayaan peningkatan ekonomi berbasis UMKM, sampai saat ini UMKM di Jember masih belum naik kelas. Bupati maupun kepala dinas koperasi masih belum bisa membedakan mana itu PKL yang tidak beridentitas mana itu UMKM yang menjadi symbol Pemkab Jember. Kepada kepala Dinas Koperasi agar segera me-reviu program kerja akan datang sebagai wujud mendukung program prioritas nomor wahid tersebut.	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Bahwa sesuai UU nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu: 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling	DINAS KOPERASI



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengacu dari ketentuan tersebut PKL adalah pelaku Usaha Mikro sebagaimana ketentuan pada UU No. 20 Tahun 2008.	

N. Urusan Penanaman Modal

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
N.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Untuk Mal Pelayanan Publik sudah launching pada tanggal 6 November 2023 Sesuai Peraturan Bupati Jember nomor 59 tahun 2023 tentang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terintegrasi secara Elektronik	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Tujuan dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) ialah memberikan dan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha di daerah. Dalam mempercepat proses perijinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					akan meluncurkan suatu aplikasi inovatif bernama “Jember Layanan Ijin Terpadu (JELITA)” yang bertujuan memberikan dukungan dan kemudahan bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha. Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah strategis dalam mendorong kondusivitas iklim Investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang.	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
N.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali keberadaan Forum CSR dan membuat regulasi berkenaan di CSR.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Forum CSR di Kabupaten Jember Telah diaktifkan kembali, dan telah banyak membantu melalui pemberian PMT bagi balita stunting di Kabupaten Jember	Bappeda

O. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
O.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kembali kejayaan dan prestasi olahraga di tingkat regional maupun nasional.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Memfasilitasi latihan atlet di stadion JSG, GOR PKPSO atau Stadion Notohadinegoro	Dispora



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
O.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan anggaran dan program pembinaan prestasi untuk cabang organisasi potensial.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pemberian hibah kepada KONI Jember untuk pembinaan (seleksi dan pemusatan latihan) atlet Porprov VII	Dispora
O.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan <i>reward</i> untuk atlet berprestasi baik regional maupun nasional.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian reward untuk atlet dan pelatih berprestasi	Dispora



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
O.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi Stadion JSG dan manajemen, kalau memungkinkan didorong pembinaan prestasi olah raga dan menghasilkan PAD.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ renovasi Stadion JSG, Stadion Notohadinegoro dan GOR PKPSO untuk persiapan Porprov VII 2022	Dispora
O.5	Dinas Pemuda dan Olah Raga harus betul betul faham terhadap semua potensi olah raga yang di miliki oleh putra putri daerah Jember, jangan hanya melaksanakan kerja kerja normative	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemusatan latihan Porprov VII Pengiriman atlet potensial untuk Porprov VII 2022	Dispora



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
O.6	Atlit dengan kemampuan khusus (atlit disabilitas) harus mendapatkan perhatian serius, jangan sampai menyakiti mereka karena tidak tersedianya anggaran untuk memberikan apresiasi kepada para atlit disabilitas. Jika memang kepala dinas tidak mampu untuk melaksanakan hal berarti tidak berkomitmen untuk mendukung kemajuan Pemkab Jember lebih baik mundur saja.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Fasilitasi pengiriman atlet difabel untuk mengikuti kejuaraan ke luar kota serta memfasilitasi latihan mereka di Stadion JSG	Dispora



P. Urusan Kebudayaan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
P.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rumusan strategi pemajuan kebudayaan dan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi salah satu acuan kerangka baru Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang. Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan Masyarakat yang pelakuna dalam daerah kabupaten/kota	Perlindungan, Pengembangan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pemerintah Kabupaten Jember melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai strategi pemajuan kebudayaan dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan dan kearifan lokal dalam arus globalisasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan					
P.2	Untuk mengoptimalkan pendataan dan program pembinaan pada kelompok dan pekerja seni dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jember.	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan Masyarakat yang pelakuna dalam daerah kabupaten/kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Menjaga keberlanjutan serta eksistensi bagi para pelaku seni, dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kab. Jember	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
P.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merumuskan pengelolaan penggunaan Gedung Kesenian atau J Klab digunakan sebagai rumah inspirasi masyarakat untuk dimanage dengan baik dan berkelanjutan	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Menampung inspirasi masyarakat dalam bidang kesenian untuk di manage dengan lebih baik dan berkelanjutan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
P.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk membangun kolaborasi dengan komunitas seni dan budaya dan juga mengoptimalkan peran dewan Kesenian Jember	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Pemerintah Kabupaten Jember melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai upaya kolaborasi dengan komunitas seni budaya dan mengoptimalkan peran Dewan Kesenian Jember	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
P.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera mungkin menyusun kalender event seni dan budaya unggulan Jember yang selaras dengan slogan bupati Jember makin keren	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan Masyarakat yang pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan kalender event pegon, drama kolosal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Q. Urusan Perpustakaan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
Q.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong budaya literasi pada masyarakat dengan kolaborasi dan pemberdayaan pada komunitas literasi yang ada di Jember.	Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Melaksanakan kegiatan sarasehan pegiat literasi dengan tema bedah buku dan silaturahmi literasi dengan tujuan untuk meningkatkan budaya literasi pada masyarakat Kabupaten Jember	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember
Q.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatkan jumlah koleksi buku fisik dan buku digital perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
Q.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong pembinaan perpustakaan di fasilitas publik, kantor-kantor pemerintah serta di desa.	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Peminjaman buku bergulir sebanyak 500-1.000 eksemplar dengan 1 rak buku di tempat publik, sekolah dan kantor pemerintah dan desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

R. Urusan Perikanan dan Kelautan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
R.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember. PR besar Jember adalah penataan ruang sepadan pantai yg di miliki oleh Kabupaten Jember dengan potensi sumber daya alamnya mulai dari tambang,	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Jember melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan berupa Sosialisasi Rencana peng-HPL-an, Pemasangan Papan pengumuman dan papan larangan mendirikan bangunan,	Dinas Perikanan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	tambak, pertanian dan wisata. Kami apresiasi dan mendukung sepenuhnya Pemkab Jember telah melaksanakan kegiatan pandataan asset sepadan pantai dengan rencana di HPL kan bekerja sama dengan Kantor ATR BPN Jember guna menertibkan asset milik pemerintah. Dengan potensi yang ada terutama untuk sector perikanan air payau sesuai dengan salah satu subtransi dari Perda RTRW yang di terbitkan tahun 2015, bahwa di sana telah berdiri puluhan tambak baik legal maupun illegal yang sering kali terdapat konflik kepentingan. Untuk itu				Pematokan dan pengukuran lahan dalam rangka penataan ruang sepadan pantai yg dimiliki oleh Kabupaten Jember dengan potensi sumber daya alamnya	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	kami rekomendasikan agar Bupati Jember segera merubah SK Bupati tentang penertiban tambak agar Pemkab bisa bergerak lebih leluasa dan merumuskan regulasi agar para pelaku tambak illegal bisa segera mendapatkan kepastian hokum keberlangsungan usaha mereka, selain itu agar Pemkab Jember juga mendapatkan manfaat salah satunya adalah peningkatan PAD dari pengelolaan sepadan pantai.					
R.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Penjaminan keselamatan kerja dan peningkatan kesejahteraan	Dinas Perikanan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	pemberdayaan Nelayan dengan peningkatan anggaran kesejahteraan dan perlindungan Nelayan yang berkelanjutan.				nelayan sebanyak 1500 orang dan dilaksanakan secara kontinyu dengan peserta yang berbeda. Kendala : tidak semua nelayan melanjutkan program asuransi secara mandiri Solusi : sosialisasi dengan BPJS Ketenagakerjaan secara massif untuk kepesertaan secara mandiri oleh nelayan	
R.3	Terdapat program 1000 kampung ikan dengan membuat 5000 kolam ikan di masing-masing rumah penduduk. Program ini bahkan sudah dipamerkan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menjawab tentang program 1000 kampung ikan pada Dinas Perikanan yang dimaksud adalah penyediaan 1000 kolam dalam bentuk 1 kolam 1 keluarga sebagai perwujudan program dalam	Dinas Perikanan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Trenggono dan program ini sudah 2 tahun dianggarkan namun pada LKPJ 2022 ini juga juga tidak tersampaikan atau gagal dilaksanakan padahal sudah di sediakan anggaran yang memadai sesuai dengan perencanaan. Oleh Karena itu Pemerintah daerah melalui Bupati untuk serius mengevaluasi kinerja dari pimpinan di dinas perikanan dan kelautan. Jika di rasa perlu karena di anggap kepala dinas tidak mampu melaksanakan amanah APBD tersebut di carikan saja pengganti pejabat yang lebih berkopenten untuk Menterjemaahkan cita cita bupati yang sudah				peningkatan ketahanan pangan, penanganan inflasi, pengendalian stunting dan peningkatan produksi perikanan. Program 1 kolam 1 keluarga telah berjalan selama 2 tahun sejak tahun 2022 sebanyak 35 kolam sebagai pilot project dan dilanjutkan di tahun 2023 sebanyak 150 kolam. Selanjutnya program 1 kolam 1 keluarga ini akan dilaksanakan secara kontinyu dan bertahap dengan maksud untuk memudahkan di dalam evaluasi serta untuk meminimalisir kegagalan. Program 1	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	di janjikan kepada masyarakat.				kolam 1 keluarga ini akan dilaksanakan secara berlanjut dengan target 1000 kolam, dimana hal ini sesuai dengan program unggulan Bupati.	

S. Urusan Pariwisata

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
S.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Selling Mission yang mendatangkan Buyer dan seller dari luar kota dan Pameran Pariwisata yang dilaksanakan di Jogja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan	Meningkatkan kunjungan pada destinasi wisata sehingga PAD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
				Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	menjadi meningkat dengan melaksanakan penyelenggaraan acara di destinasi wisata serta penambahan fungsi bangunan di destinasi wisata	
		Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Acara Familiarization trip yang mengundang pelaku wisata luar kota untuk berkeliling ke tempat tempat wisata di kabupaten jember yang bertujuan untuk lebih mengenalkan ke masyarakat luar kota bahwa ada banyak destinasi wisata yang bisa	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					dikunjungi sehingga bisa meningkatkan PAD dari sector wisata.	
S.2	Pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan destinasi yang menjadi aset daerah seperti Watu Ulo, Rembangan, bahkan sekarang muncul Pantai Payangan atau Teluk Love.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Meningkatkan kunjungan pada destinasi wisata sehingga PAD menjadi meningkat yaitu dengan cara sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan acara di destinasi wisata 2. Menambah fungsi bangunan di destinasi wisata 3. Renovasi jalur air di destinasi wisata 4. Perbaikan Kantor di destinasi wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
S.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih inovatif dalam menyusun <i>Calender of Event</i> yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Jember, bukan menyusun <i>Calender of Event</i> yang terkesan tidak focus dalam mempromosikan potensi wisata unggulan dan terkesan meluas bahkan dipersepsikan bukan agenda promosi wisata namun justru dipersepsikan sebagai <i>Calender Of Event Bupati</i> .	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Diskominfo Jember dalam pembuatan kalender event 2023 untuk menarik kunjungan wisatawan ke Jember	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
S.4	Pemerintah daerah perlu membentuk Badan Promosi Pariwisata daerah yang diisi orang-orang profesional yang mampu mengangkat kembali Jember sebagai Kota Pariwisata yang masuk dalam peta wisata nasional bukan Kota bisnis event	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri untuk mengangkat kembali Jember sebagai Kota Pariwisata yang masuk dalam peta wisata nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
S.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lembaga biro perjalanan, pengelola destinasi dan desa wisata serta pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pelatihan Pokdarwis 3 paket dan Bimtek pelaku pariwisata peserta 20 orang sekaligus uji kompetensi untuk pelaku wisata di hotel dan restoran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
S.6	Tahun 2022 yang lalu Pemkab Jember telah melaksanakan program wisata gratis pada destinasi wisata milik Pemkab Jember yaitu Rembangan, Pemandian Patemon, kolam renang Kebong Agung dan pantai Watu ulo di tambah satu destinasi lagi milik Perhutani yaitu Pantai Pasir putih Malikan (Papuma) pada saat hari raya Idul Fitri tahun lalu. Namun banyak dampak negative yang di timbulkan karena tidak pernah ada kajian sebelumnya, di antaranya pasca lebaran sampah menggunung berceceran di mana mana, factor keamanan dan keselamatan yang kurang di perhitungkan oleh Pemkab sampai	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD maka Pemerintah Kabupten Jember di tahun 2023 tidak melaksanakan wisata gratis.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	memakan korban jiwa, rebutan lahan parkir oleh masyarakat karena tidak terkoordinasi dengan baik, berjubelnya pengunjung sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang sangat panjang, pedagang baik PKL maupun UMKM yang tidak terintegrasi sehingga mereka mengaku dengan ramainya pengunjung tetapi tidak meningkatkan pendapatan karena banyak pengunjung yang ternyata justru membawa makanan dari rumah dan sampahnya di tinggalkan begitu saja serta persoalan persoalan yang lain					



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	termasuk kumuhnya fasum Karena tidak ada anggaran untuk pembersihan. Dari pengalaman tersebut DPRD merekomendasikan agar idul fitri tahun 2023 destinasi wisata Watu Ulo dan Papuma, termasuk destinasi wisata lain tidak di gratiskan, selain agar tidak terulang lagi pengalaman pahit tahun kemaren juga untuk memecah keramaian sehingga destinasi wisata yang lain (milik swasta) tidak sepi pengunjung.					



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
S.7	Apabila dinas Pariwisata dan kebudayaan tidak mampu berinovasi untuk menterjemahkan cita cita bupati maka DPRD Jember merekomendasikan lebih baik kepala dinas Pariwisata dan Kebudayaan di ganti saja dengan pejabat yang lebih mampu, karena kami menilai peran dinas pariwisata gagal dalam upaya pengembangan pariwisata serta konsolidasi pelaku dalam pengembangan wisata jember oleh karena itu Bupati harus serius mengevaluasi kinerja dari pimpinan di dinas pariwisata dan kebudayaan	Kepegawaian Daerah	Promosi dan Mutasi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Telah dilaksanakan pergantian Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melalui mekanisme sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	BKPSDM



T. Urusan Pertanian

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
T.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kesejahteraan petani.	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Kelompok Tani yang melakukan pengendalian OPT untuk menekan serangan OPT pada usahatannya	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
T.2	Pemerintah daerah harus menyusun formula yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor pertanian sebagai sektor dominan terutama peada pemberdayaan petani berbasis komoditas yang rentan penyumbang inflasi tinggi yaitu cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Menekan Laju Inflasi yang disebabkan kenaikan harga cabai rawit, bawang merah dengan memberikan bantuan bibit cabai dan bibit tomat	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
T.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	membantu petani mulai dari proses pengolahan lahan hingga pengolahan hasil pertanian dan membantu mengatasi jumlah tenaga kerja pertanian yang berkurang.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
T.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun kebijakan perlindungan petani serta peningkatan program perlindungan dan pemberdayaan pada petani.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan berupa bantuan pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Buruh Tani	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
T.5	Pemerintah daerah harus mendorong program pertanian yang sebaiknya difokuskan pada Pengembangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Memberikan bantuan sarana pasar tani untuk mendorong petani menyelenggarakan pasar tani di	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian yang dapat dilakukan dengan : mewujudkan pasar hasil Pertanian, mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian; mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang				wilayahnya/wilayah sentra penghasil produk pertanian dengan tujuan mengembangkan sistem pemasarannya. Membantu peningkatan korporasi petani dan memberikan informasi harga pasar setiap hari melalui laporan petugas PIP. Mendorong petani mengikuti misi dagang dan kemitraan dengan pelaku ekspor buah, membantu petani melakukan sertifikasi organik produknya sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi syarat di pasar internasional	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	saling memerlukan, mempercayai, memperkuat melalui Badan Usaha Milik Petani; mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian; menyediakan informasi pasar; dan mengembangkan lindung nilai					
T.6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan terbitnya SK Bupati Nomor 188.45/472/1.12/2022 tentang Luasan dan Sebaran LP2B dan KP2B tanggal 17 November 2022	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
T.7	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan.	Penyuluhan Pertanoian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan peran penyuluh pertanian di kelompok tani, sehingga anggota kelompok tani dapat ditingkatkan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap (PKS).	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

U. Urusan Perdagangan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
U.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif mendorong pasar berstandart SNI sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Program revitalisasi salah satu upaya mendorong pasar berstandart SNI dan diharapkan pasar rakyat /tradisional diperlukan pengelolaan secara Profesional. Juga upaya untuk	Disperindag



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang didalamnya mengatur Pedoman pasar Rakyat serta Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.				mengubah Imej pasar rakyat yang kurang diminati menjadi lebih baik. Pasar mendapat SNI jika memenuhi persyaratan diantaranya bersih, sehat, zonasi kios, pengelola pasar yang professional, pengelolaan sampah dan sebagainya. Semua komponen harus dipenuhi, kalau ada bagian yang lebih rendah harus ditingkatkan lagi.	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Skema Sertifikasi Pasar rakyat digunakan sebagai acuan untuk sertifikasi terhadap hasil kegiatan/jasa yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan pasar dalam menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli. Tinjauan permohonan sertifikasi Lembaga Sertifikasi harus melakukan tinjauan terhadap kelengkapan	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan SNI.	
U.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan dan program perlindungan pedagang / pasar tradisional ditengah fenomena gempuran masuknya pasar modern dan berjaringan.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Program perlindungan pedagang/pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat dan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri. Berdasarkan PERDA Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun	Disperindag



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan, menjadi pedoman perlindungan bagi penyelenggara pasar rakyat, serta penataan perbelanjaan dan toko swalayan.	
U.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Untuk Menumbuhkan Wirausaha Baru yang berbasis potensi alam	Disperindag



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
U.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasis potensi unggulan daerah.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Untuk Menumbuhkan Wirausaha Baru yang berbasis potensi alam	Disperindag
U.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau	Disperindag



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
U.6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau	Disperindag

V. Urusan Industri

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
V.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Untuk Menumbuhkan Wirausaha Baru yang berbasis potensi alam	Disperindag



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
V.2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasis potensi unggulan daerah.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Untuk Menumbuhkan Wirausaha Baru yang berbasis potensi alam	Disperindag
V.3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau	Disperindag



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
V.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau	Disperindag
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Melaksanakan penganggaran DBHCHT di Kabupaten Jember berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai. Anggaran DBHCHT dioptimalkan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, bidang Kesehatan dan penegakan	Bappeda



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					hukum. Amanat PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai juga dapat dimanfaatkan untuk bidang prioritas daerah. Kegiatan prioritas daerah dana DBHCHT tahun 2023 digunakan untuk Penanggulangan stunting Penanggulangan inflasi Mendukung pabrik pupuk organik	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
V.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan program untuk peningkatan peran dan fungsi Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ).	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau	Disperindag

W. Urusan Administrasi Pemerintahan

Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
W.1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 bisa bertahan di Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPKAD



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
W.2	Pemerintah daerah harus mengoptimalkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan terutama dalam penggunaan SIPD.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengoptimalan kapasitas SDM dalam penggunaan SIPD Perencanaan Anggaran	BPKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengoptimalan kapasitas SDM dalam penggunaan SIPD Penatausahaan	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengoptimalan kapasitas SDM dalam penggunaan SIPD Pelaporan Keuangan (AKLAP)	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
W.3	Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Perbaikan Tata Kelola Pengelolaan Barang Dan Jasa Dan Manajemen Asset Daerah Melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Secara Mandiri, Lalu Diikuti Dengan Perubahan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK).	Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Penataan Organisasi	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemerintah Kabupaten Jember Melakukan Perbaikan Tata Kelola Pengelolaan Barang Dan Jasa Dan Manajemen Asset Daerah Melalui pembentukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.	Bagian Organisasi
W.4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dan asset daerah dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan	Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi	Meningkatkan budaya kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember dengan menerapkan kebijakan pengurangan TPP kepada PD berdasarkan hasil evaluasi SAKIP PD. Meningkatkan kualitas	Bagian Organisasi



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
	nilai SAKIP.				seluruh aspek dalam SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan meningkatkan sinergisitas PD pengampu. Meningkatkan kualitas pemahaman SDM aparatur perencanaan PD.	
W.5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih professional melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan	Pemerintah Kabupaten Jember melalui program dan kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah melalui sosialisasi, pendampingan, dan penjangkaran inovasi daerah kepada perangkat daerah di	BAPPEDA



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
					lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sampai unit kerja di bawahnya untuk memenuhi indicator inovasi daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini fungsi Penelitian dan Pengembangan di Bappeda masih melekat di Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pembangunan Daerah di Bappeda. Tentunya peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan di Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi sebagai bentuk dukungan upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah. Oleh karena itu, sesuai	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
					amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka telah diusulkan perubahan SOTK dan Nomenklatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan menambahkan 1 (satu) Bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mandiri dan terpisah dari Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah. Usulan perubahan SOTK dimaksud dalam proses pembahasan di DPRD.	



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
		Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	Meningkatkan kualitas seluruh aspek dalam Reformasi Birokrasi, yaitu dengan meningkatkan sinergisitas PD pengampu RB General , yaitu: Aspek Manajemen SDM Aspek pengawasan, yaitu SPIP/Sistem pengendalian Internal pemerintah Aspek SPBE Aspek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Aspek Akuntabilitas Kinerja Aspek Pelayanan Publik Aspek Tata Kelola Kearsipan Dan sinergisitas PD pengampu RB tematik , yaitu : Aspek pengentasan	Bagian Organisasi



Kode	Rekomendasi Tahun 2022	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-kegiatan		
					kemiskinan Aspek pengendalian inflasi Aspek peningkatan penggunaan produk dalam negeri / PPPDN Aspek peningkatan investasi Aspek digitalisasi penanganan stunting	

4**Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan**

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan merupakan capaian kinerja atas Tugas Pembantuan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (11) bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekosentrasi sehingga pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum serta ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.



4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya dalam rangka mendukung kebijakan nasional, provinsi ataupun kebijakan pemerintah kabupaten dengan pendekatan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran-anggaran dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan kepada daerah untuk penyelenggaraan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau disebut juga dengan tugas pembantuan, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa tugas pembantuan adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*. Sedangkan



merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 9 bahwa *“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan”*.

Laporan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun 2023 ini meliputi tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tugas tertentu dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jember menerima tugas pembantuan pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Tugas pembantuan tersebut diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.709.600.000,- yang terealisasi sebesar 1.590.159.500 atau 93,01%.

Laporan lebih detail mengenai pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel 4.1
Tugas Pembantuan Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Jember
Tahun 2023

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Output
1	Surat Sekda Pemprov Jawa Timur tanggal 16 Januari 2023 No. 412.2/304/112.3/2023 perihal Penyampaian Pagu Indikatif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2023	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	64.000.000	47.259.500	73,84	Terlaksananya fasilitasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di 12 desa penerima yaitu: Desa Mojomulyo dan Wringintelu Kec. Puger, Desa Kemuningsari Kidul dan Jenggawah Kec. Jenggawah, Desa Ngampelrejo Kec. Jombang, Desa Dukuhdempok Kec. Wuluhan, Desa Semboro dan Sidomekar Kec. Semboro, Desa Ledokombo Kec. Ledokombo, Desa Badean Kec. Bangsalsari, Desa Suco Kec. Mumbulsari, Desa Tegalwangi Kec. Umbulsari.



No	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Output
		dan Masyarakat Hukum Adat				
2	Surat Sekda Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/2812/112.2/ 2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.645.600.000	1.542.900.000	93,76	Terlaksananya pemberian honorarium untuk kepala desa dan perangkat di 226 Desa di Kab. Jember

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jember tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jember sehingga laporan mengenai tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya adalah Nihil.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Hambatan / Permasalahan Tugas pembantuan di Kabupaten Jember menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan pada tahun yang akan datang. Berikut hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang

diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2023 serta upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut:

Tabel 4.2
Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan
Tugas Pembantuan yang Diterima Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	- Pencairan BKK kepada Desa tidak dilaksanakan secara bersamaan sehingga kesulitan dalam proses pendampingan persiapan pelaksanaan kegiatan - Terdapat efisiensi penggunaan anggaran (Silpa)	- Meningkatkan intensitas kegiatan monitoring dan evaluasi kepada 12 desa lokasi sasaran penerima BKK - Efisiensi penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp16.740.500 telah disetor kembali ke kas daerah Provinsi Jawa Timur
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Adanya jabatan Perangkat yang kosong/belum terisi - Pengiriman berkas dari desa yang terlambat	- Melaksanakan updating data perangkat desa - Melaksanakan monitoring lebih intens terkait dengan laporan pertanggungjawaban penerima honorarium agar



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Solusi
			sesuai dengan jadwal - Silpa BKK Kabupaten sebesar Rp102.700.000 akan dikembalikan kepada Pemprov Jatim melalui BPKAD Kab. Jember

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024

5

Penutup



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun 2023 merupakan penyampaian LKPJ Bupati periode tahun 2021-2024 tahun ketiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Tentunya kinerja pelaksanaan pembangunan beserta *output* dan *outcome* yang telah dihasilkan selama ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak (*stakeholder*) dalam rangka akselerasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, kami berharap semoga kerja sama selama ini dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga seluruh rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan menjadi cita-cita bersama dapat terwujud dengan baik. Tidak lupa kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra pembangunan Kabupaten Jember atas partisipasi aktif dalam memberikan saran, masukan dan dukungan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jember selama tahun 2023 sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan pembangunan daerah di tahun 2023 telah diupayakan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah dengan menggunakan segala



sumber daya yang ada. Adapun kinerja pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang optimal, namun di sisi lain masih ada kinerja pembangunan yang perlu menjadi perhatian kita bersama sebagai bahan evaluasi dan analisa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Jember di tahun selanjutnya. Tentunya hal ini dapat dimaklumi karena pada hakikatnya terdapat dinamika dalam proses pembangunan daerah yang merupakan suatu proses multidimensi, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, serta keamanan dan ketertiban yang diantaranya berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

Sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa Rekomendasi DPRD sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Jember perlu mendapat saran dan masukan dalam bentuk Rekomendasi DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami berharap semua yang telah kita laksanakan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhlo-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.

Jember, Maret 2024

BUPATI JEMBER

Ir. H.HENDY S, ST. IPU, ASEAN.Eng

